

**STUDI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA
BATU DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ISMAIL PRIYO WICAKSONO
14503010111128**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTO

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,

Sampaikan dengan Amal.

Yakin Usaha Sampai!

SATYAM EVA JAYATE

“Pada Akhirnya Kebenaranlah yang akan Menang!”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Studi Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam Pemenangan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

Disusun oleh : Ismail Priyo Wicaskono

NIM : 145030101111128

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 30 Mei 2018

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP. 19610204 198601 1 001



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP

NIP. 19840713 201504 1 004



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 30 Mei 2018

Mahasiswa



METERAI
TEMPEL
No. 3B33CADF206739
6000
ENAM RIBURUPIAH

Nama : Ismail Priyo Wicaksono

NIM : 145030101111128



LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Juli 2018

Waktu : 08.15 - 09.15 WIB

Skripsi Atas Nama : Ismail Priyo Wicaksono

Judul : Studi Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

Anggota

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA
NIP. 2011078504211001



repository.ub.ac.id

Ismail Priyo Wiacksono, 2018. **Studi Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Santoso Haryono, MS & Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP. 147 halaman + xiv

RINGKASAN

Strategi komunikasi politik adalah seluruh keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Komunikasi dapat berbentuk pemberian informasi dari penguasa politik kepada warga negara ataupun aduan atau aspirasi oleh rakyat ke penguasa. Kekuasaan adalah sumber dari politik, dan pelaksanaan politik yang efektif berawal dari komunikasi politik. Komunikasi politik yang disusun melalui strategi tertentu dibutuhkan oleh partai politik untuk menduduki kekuasaan melalui cara meyakinkan masyarakat bahwa partai politik dapat menjadi saluran aspirasi politik bagi masyarakat.

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Batu, sedangkan situsnya berada di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil analisa dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi penelitian terkait strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017 dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu: (1) Pemanfaatan bentuk citra politik Kota Wisata Batu yang sebelumnya dipimpin kader partai; (2) Pemanfaatan peran media dan instrumen hubungan masyarakat; (3) Pemanfaat metode *blusukan* yang digunakan sebelum dan sesudah masa penetapan calon untuk mempertahankan; (4) Membangun relasi dengan partai politik lain untuk memperluas dukungan; (5) Merawat aktivis dan relawan untuk bekerja sama demi satu kepentingan; (6) Strategi ditujukan mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Selain itu, selama strategi komunikasi politik berjalan, terdapat pula faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya strategi, yaitu : (1) Hubungan kelembagaan partai yang kuat dari hierarki tertinggi hingga terendah; (2) Kuantitas yang cukup namun memiliki catatan negatif pada sebagian aktivis dan simpatisan partai; (3) Dukungan dana yang mencukupi dari pasangan calon; (4) Kapabilitas Tim Pemenangan dapat memenuhi harapan partai dalam memenuhi sasaran kemenangan; (5) Isu Dinasti yang berkembang menjadi faktor penghalang untuk meyakinkan pemilih; (6) Basis massa lawan di suatu daerah menjadi bagian kesulitan saat memperluas dukungan pemilih. Strategi komunikasi politik yang dijalankan dapat dikatakan berhasil mengingat tercapainya tujuan kemenangan bagi calon yang diusung serta sasaran raihan persentase kemenangan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Partai Politik, Pilkada

repository.ub.ac.id

Ismail Priyo Wiacksono, 2018. **Study of Political Communication Strategy Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) at Batu City to Winning of Local Leaders Election in 2017**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Advisor Lecturers: Dr. Bambang Santoso Haryono, MS and Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP. 147 Pages + xiv

SUMMARY

Political communication strategy is all conditional decision from action to run at this time, to achieve politic purpose in the future. politic communication is has a political element in the implementation. Communication can take form of giving the information from political rulers to citizens, complaints or aspirations by people to the ruler. Power is source from politic, and Effective political implementation begins with political communication. Political communication developed through specific strategies is required by political parties to assert power by convincing people that political parties can become channels of political aspiration for society.

This research metode uses descriptive research type with qualitative approach located in Batu City, meanwhile, the site is in the Board Branch of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Batu City. Primary data sources were obtained from interviews with related informants, while the secondary data is obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through observation, interview, and documentation. The research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results of analysis and discussion data obtained from research result and observation of research related political communication strategy PDIP Batu City on the winning of local leaders election in Batu City of 2017 done, i.e: (1) Utilization of political image form Batu Tourism City previously led by party cadres; (2) Utilization of media roles and public relations instruments; (3) Utilization method “*blusukan*” that used before and after period of determination of the candidate to defend; (4) Building relationships with other political parties to expand support; (5) Caring for activists and volunteers to work together for an interest; (6) The strategy is aimed from rural to urban communities. In addition, as long as the political communication strategy runs, there are also operational factors and human factors that influence to running of the strategy, i.e : (1) Strong party institutional relationships from the highest to the lowest hierarchy; (2) Quantity is sufficient but has a negative record on some activists and sympathizers of the party; (3) Adequate funding support from candidate pairs; (4) Winning Team Capabilities can meet the party's expectations in meeting the victory targets; (5) The issue of dynasties that developed into a factor of censure to convince voters; (6) The opponent's mass base in an area becomes part of the difficulty of extending voters support. The strategy of political communications that is executed can be said to succeed in considering the achievement of the victory goal for the candidate and the winning percentage goal.

Keyword : Political Communication Strategy, Political Party Local Election

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia pula dalam mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua penulis, Bapak Narwita, S.Pd. dan Ibu Sunarti selaku orang tua penulis yang memiliki cinta kasih yang tak ada habisnya kepada penulis dan memberikan doa serta segala dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu
9. Bapak Ir. Sutiyo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDIP Kota Batu & Ketua Tim Pemenangan Dewanti-Punjul
10. Bapak Dwi Yuniar Saniman selaku anggota Tim Pemenangan & Sekretaris Badan Pelatihan Saksi Nasional (BPSN) DPC PDIP Kota Batu.
11. Keluarga Besar HMI FIA UB, terutama Forsilader 2014, dan Senior serta junior kader yang telah menyertakan semangat dan doa kepada penulis
12. Rekan-rekan Administrasi Publik 2014 yang telah menemani perjuangan kuliah dan penelitian dari penulis
13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2018



Penulis

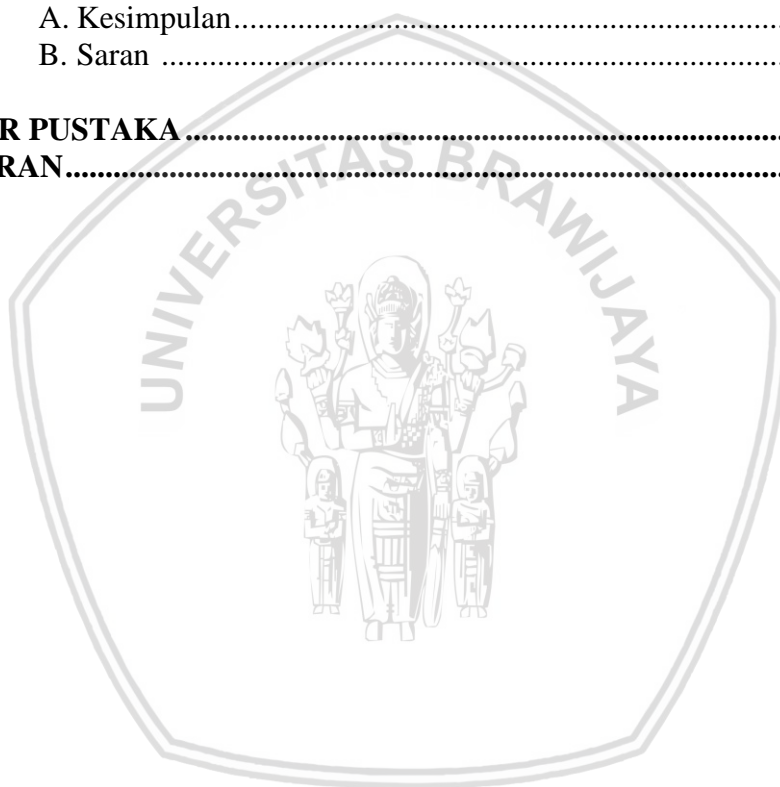
DAFTAR ISI

	Halaman
MOTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	18
1. Definisi Administrasi Publik	18
2. Pendekatan Administrasi Publik.....	19
3. Hubungan Administrasi Publik dengan Politik	21
B. Strategi Politik	22
1. Definisi Strategi Politik	22
2. Jenis-Jenis Strategi Politik	23
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenangan Strategi	31
C. Komunikasi Politik.....	36
1. Definisi Komunikasi Politik	36
2. Proses Komunikasi Politik.....	37
3. Tujuan dan Peran Komunikasi Politik.....	39
4. Strategi Komunikasi Politik.....	40
5. Pemasaran Politik	44
D. Partai Politik	49
1. Definsini Partai Politik.....	49
2. Terbentuknya Partai Politik di Indonesia	50
3. Partai Politik dan Aspirasi Politik.....	51
E. Pemilihan Umum.....	52
1. Definisi Pemilihan Umum	52



2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	53
3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah	55
4. Tinjauan Filosofis Pemilihan Kepala Daerah	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Fokus Penelitian	60
C. Lokasi dan Situs Penelitian	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Instrumen Penelitian	65
G. Teknik Analisis Data	66
H. Validitas Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	70
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
a. Geografis	70
b. Demografis.....	71
c. Visi & Misi Kota Batu Tahun 2017-2022.....	72
d. Pemerintahan.....	74
e. Peta Politik Kota Batu.....	74
2. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	75
a. Asas, Jatidiri, dan Watak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	75
b. Struktur Organisasi DPC PDIP Kota Batu.....	75
c. Gambaran Umum Tim Kampanye Dewanti Rumpoko- Punjul Santoso.....	77
B. Penyajian Data.....	80
1. Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017.....	80
a. Strategi Mempertahankan Pasar PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017	82
b. Kampanye Pemilihan PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017	91
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017	102
a. Faktor Pendukung	102
b. Faktor Penghambat	112
C. Pembahasan	115
1. Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017.....	115

a.	Strategi Mempertahankan Pasar PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017	117
b.	Kampanye Pemilihan PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017	129
2.	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017	134
a.	Faktor Pendukung	134
b.	Faktor Penghambat	141
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	144
B.	Saran	146
DAFTAR PUSTAKA		148
LAMPIRAN		152



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Periodisasi Pergantian Tata Cara Penetapan Kepala Daerah	2
Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Batu 2017	8
Tabel 3 Perolehan Suara Pasangan Calon yang diusung DPC PDIP Kota Batu dalam Pilkada Kota Batu.....	8
Tabel 4 Jenis-Jenis Strategi Politik	24
Tabel 5 Tinjauan tentang Pendekatan-Pendekatan dalam berbagai Strategi	28
Tabel 6 Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik	48
Tabel 7 Susunan Pengurus DPC PDI-P Kota Batu	76
Tabel 8 Susunan Tim Kampanye Dewanti Rumpoko – Punjul Santoso.....	78
Tabel 9 Tinjauan Pendekatan Strategi Mempertahankan Pasar	124
Tabel 10 Kampanye Pemilihan oleh PDIP Kota Batu	132
Tabel 11 Praktik-Praktik Penunjang Pemasaran yang Sukses	133
Tabel 12 Matriks Faktor Operasional Ketergantungan Waktu dalam strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Komunikasi Politik	38
Gambar 2 Metode Analisis Data Creswell.....	67
Gambar 3 Peta Wilayah Kota Batu	70
Gambar 4 Dewanti Rumpoko membuka Pameran Batik di Kota Batu.....	87
Gambar 5 Poster Kampanye Pemilu Dewanti-Punjul.....	97
Gambar 6 Undangan Pertemuan Pertama Relawan “Sahabat Dewanti”	99
Gambar 7 <i>Twibbon</i> Dukungan untuk Dewanti-Punjul.....	100
Gambar 8 Perlombaan Dukungan Kreatif kepada Dewanti-Punjul	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah melakukan pergantian metode pemilihan pemimpin politik eksekutif tingkat Kepala Daerah ditandai dengan munculnya tiga tata cara penetapan Kepala Daerah. Tata cara pertama pada masa kemerdekaan, Kepala Daerah ditetapkan melalui metode penunjukan. Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh Komite Nasional Daerah (KND) yang sejak periode UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan istilah DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan KND dan atau DPRD Kabupaten/ Kota.

Tata cara berikutnya setelah jatuhnya Soeharto, menjadi salah satu hal yang diperdebatkan adalah reformasi pemilu Indonesia terkait pemilihan kepemimpinan eksekutif dari pemerintah provinsi dan kabupaten (Choi, 2007). Parlemen menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam UU tersebut Kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, berjalannya Undang-Undang ini memunculkan masalah tersendiri seperti munculnya tuduhan bahwa calon bisa membeli suara parlemen daerah untuk mempertahankan legitimasinya dalam kekuasaan daerah (Rasyid dalam Chou, 2007).

Meningkatnya desakan reformasi dari daerah diikuti dengan perubahan signifikan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Tata cara penetapan terakhir, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dengan prinsip *One Man One Vote*. Melalui revisi UU ini maka hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi mitra atau koordinatif. Berbeda dengan fase sebelumnya dimana DPRD memiliki kekuasaan lebih besar karena memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Tabel 1
Periodisasi Pergantian Tata Cara Penetapan Kepala Daerah

	Bentuk Penetapan	Sistem Pemilihan Kepala Daerah	Dasar Hukum
Pertama	Penunjukan	Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh Komite Nasional Daerah (KND) yang sejak periode UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan istilah DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan KND dan atau DPRD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Kedua	Periode Pemilihan Tidak Langsung	Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Ketiga	Periode Pemilihan Langsung	Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk periode pemilihan dimulai dari disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini dirasa perlu diperbaiki sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota). Peraturan tersebut diperbaiki kembali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU tersebut menjelaskan pada Pasal 7 poin (1) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pada Pasal 40 dijelaskan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. UU tersebut juga menegaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara proses pemilihan Kepala Daerah dan Badan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang mengawasi pemilihan sehingga tercipta pemilihan yang adil dan demokratis.

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono dalam Labolo & Ilham (2017: 50) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum

setidaknya memiliki lima fungsi. Menurut Rose & Mossawir dalam Labolo & Ilham (2017: 53) fungsi pemilihan umum antara lain:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
4. Sarana rekrutmen politik.
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Laporan Akhir Kompendium Pemilihan Kepala Daerah tahun 2007 menyebutkan konsep pilkada hampir tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah. Artinya, ada korelasi yang signifikan analisis pemilihan kepala daerah dengan pergeseran konsep otonomi daerah, bahwa otonomi daerah merupakan konteks bahkan prasyarat dari adanya pemilihan kepala daerah. Dalam hal demikian, masyarakat (lokal) yang menerima otonomi harus diberdayakan dan harus mampu bertindak demi kepentingan tersebut. Masyarakat lokal yang menerima otonomi dalam satu yurisdiksi wilayah tertentu tersebut dikenal sebagai daerah otonom. Pertama-tama tentu harus ada demokrasi perwakilan dan kemudian disusul oleh lembaga eksekutif yang akan menjadi pengendali pemerintahan. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sudah dipastikan berkedudukan kuat, politis dan cenderung tunggal. Kemudian kedudukan yang kuat ini harus dibandingkan pula dengan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, baik Kepala Daerah berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat pula (*dual function*) atau tidak.

Sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik memiliki tujuan khusus yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan khusus tersebut dapat disimpulkan sebagai usaha Partai Politik dalam mencapai cita-cita politik dari Partai Politik dengan menyertakan aspirasi warga negara sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi melalui agenda-agenda politik. Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk rekrutmen politik dimana Partai Politik berfungsi sebagai salah satu proses dalam rekrutmen politik yang harus melakukan proses-proses demokrasi sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Poin e UU Nomor 2 Tahun 2008. Adanya proses rekrutmen politik tersebut maka Partai Politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum, Partai Politik juga memiliki kewajiban untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, serta menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Partai Politik harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Pilkada serentak tahap pertama yang telah berhasil dilaksanakan pada 10 Desember 2015, dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Kota Batu termasuk salah satu Kota yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak mengingat Pilkada Kota Batu sebelumnya dilakukan pada tahun 2012 lalu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik yang selalu ikut andil dalam sejak Pilkada Kota Batu digelar secara langsung. Pada Tahun 2007, PDIP mengusung Edi Rumpoko dan H.A. Budiono untuk maju sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota (www.suarasurabaya.net). Hasil rekapitulasi KPUD Batu, pasangan calong yang diusung PDIP memperoleh 28.008 suara dari 78.082 suara sah atau setara 35,86%. Pada Pilkada berikutnya, tahun 2012 sesuai Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 oleh KPUD Batu (2012) PDIP tanpa berkoalisi mengusung Eddy Rumpoko-Punjul Santoso menjadi peserta Pemilukada 2012. Hasil Pemilukada tersebut pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso kembali meraih kemenangan dengan perolehan 46.724 suara dari 104.428 suara sah yang setara dengan 44,74% suara sah.

Dilansir dalam *website* KPU RI (dalam pilkada2017.kpu.go.id), Pilkada Kota Batu memiliki empat pasangan calon. Nomor urut satu yaitu Rudi-Sujono yang didukung oleh koalisi tiga partai politik PAN, Hanura, dan Nasdem. Nomor urut dua Dewanti Rumpoko-H. Punjul Santoso, SH, MM diusung oleh PDIP. Pasangan nomor urut tiga yaitu H. Hairuddin-Hendra Angga Sonatha yang didukung PKB dan Demokrat. Lalu pasangan terakhir yaitu Abdul Majid, S.Psi-Drs. H. A. Kasmuri Idris yang berstatus independen.

Tabel 2
Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Batu 2017

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Perolehan Suara
1	Rudi-Sujono	PAN, Hanura, dan Nasdem	24.228
2	Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso	PDIP	51.754
3	Hairuddin-Hendra Angga Sonatha	PKB dan Demokrat	20.508
4	Abdul Majid- H. A. Kasmuri Idris	Independen	19.634

Sumber: KPUD Batu, 2017

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut Pilkada Kota Batu 2017 dimenangkan oleh pasangan Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasangan calon tersebut menang dengan perolehan 51.754 suara atau setara dengan 44,57% suara dari total suara sah sebagaimana Keputusan KPU Kota Batu No. 22/HK.03.1.Kpt/3579/KPU-Kota/IV/2017 tanggal 5 April 2017.

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon yang diusung PDIP Kota Batu dalam Pilkada Kota Batu

Tahun	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Suara Sah	Persentase
-------	---------------------	-----------------	------------------	------------

2007	Eddy Rumpoko- H.A. Budiono	28.008	78.082	35,86%.
2012	Eddy Rumpoko- Punjul Santoso	46.724	104.428	44,74%
2017	Dewanti Rumpoko- Punjul Santoso	51.754	116.380	44,57%

Sumber: KPU RI dan KPUD Batu, diolah oleh penulis

Administrasi publik dapat disimpulkan menjadi rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Studi penelitian ini menempatkan kesimpulan pada pendekatan politik yang dikemukakan oleh Thomas J. Davy. Thomas J. Davy memperkenalkan empat pendekatan yaitu manajerial, psikologis, politis, dan sosiologis. Pendekatan politis melingkupi seluruh agenda-agenda politik yang akan berpengaruh pada proses berjalannya administrasi publik. Mengingat administrasi publik adalah bentuk implementasi atas perumusan politik. Fokus penelitian ini adalah agenda kegiatan dalam penentuan siapa yang duduk pada jabatan politis melalui partai politik yang juga termasuk badan publik. Menduduki jabatan politik memerlukan usaha komunikasi politik yang dilaksanakan pada masa sebelum dan saat kampanye seperti yang diatur secara konstitusional pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah.

Melihat kondisi tersebut, PDIP Kota Batu dipastikan memenangkan kontestasi politik di Kota Batu secara tiga periode menggunakan perencanaan strategi dan perencanaan taktis. Partai politik yang lebih modern memiliki tingkat pelembagaan yang lebih sempurna dan sistematis. Alfian (2013) mengatakan akan berbeda dengan partai politik modern dengan partai politik tradisional yang mengandalkan karisma tokoh bukan sistem. Hal itu dilandasi pada pendapat Max

Weber dalam Alfian (2013: 208) bahwa karisma tidak dapat diturunkan, begitu sang tokoh wafat, wafat pula organisasi partai politik. Mengingat pernyataan tersebut maka partai perlu memiliki gambaran strategi komunikasi politik yang jelas untuk mempengaruhi masyarakat. Konsep strategi meluas ke berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang politik. Hal ini bertujuan untuk memimpin kelompok-kelompok masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi kepada sasaran khusus. Strategi itu selalu ditujukan untuk “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dan perolehan tambahan suara dalam kemenangan pemilihan bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan (Schroeder: 2010).

Penggunaan strategi komunikasi politik dalam kegiatan pemenangan Pilkada mempengaruhi hasil kemenangan dan juga menjadi acuan sebagai kunci keberhasilan dari pasangan calon. Penelitian Saputra, dkk mengenai pemasaran politik pasangan Calon Kepala daerah dalam Pemilkuda di Kota Malang pada tahun 2013 membuktikan bahwa kemenangan pasangan calon Anton-Sutiaji (AJI) dipengaruhi pemasaran politik yang dibangun oleh Tim Sukses Pemenangan AJI. Hal yang dilakukan oleh Tim Sukses AJI berbentuk promosi periklanan melalui media massa dan sosialisasi rumah ke rumah penduduk. Selain itu, Tim Sukses AJI menggunakan agenda religi dan kedekatan dengan muslimat NU untuk menentukan *positioning* politik. Berikutnya, Rembang & Walandouw (2015) menyajikan hasil penelitian dimana strategi kampanye pemenangan yang disusun oleh tim pemenangan calon Jantje W Sajow-Ivan Sarundang terbukti berjalan baik dan berhasil memenangkan pasangan calon tersebut. Studi tersebut menyebutkan

kekuatan finansial menjadi salah satu kekuatan. Selain finansial, memobilisasi birokrasi menjadi hal yang digunakan untuk menggerakkan massa ke TPS. Sedangkan, hasil penelitian Anwar (2015) menyebut Partai Keadilan Sejahtera Kota Samarinda menggunakan strategi komunikasi politik untuk meningkatkan elektabilitas pada Pilkada Kota Samarinda tahun 2015. Strategi komunikasi telah dilakukan oleh partai keadilan sejahtera dengan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan elektabilitas masyarakat dan penyiaran pesan melalui media yang berupa ajakan seperti radio, televisi, surat kabar. Semua program tersebut dilakukan bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Partai politik harus melakukan strategi komunikasi politik berdasarkan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan saat ini guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan kader partai, memantapkan kelembagaan, menciptakan solidaritas, dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi politisi (Arifin: 2011). Sebagai pemenang Pilkada secara dua kali berturut PDIP harus memiliki *positioning* yang tepat dalam menentukan jenis strategi dalam pemenangan Pilkada. Untuk dapat menetapkan pilihan strategi yang tepat, partai harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan.

Kemenangan PDIP bersama Dewanti-Punjul tidak lepas dari serangan isu dari lawan politiknya. Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang, Priyo Bogang mengatakan pengaruh sosok Edy Rumpoko di PDIP sangat luar biasa. Hal itulah yang menjadikan rekomendasi PDIP jatuh pada Dewanti Rumpoko

yang notabene istrinya sendiri saat maju sebagai pemilihan Calon Bupati Malang periode sebelumnya. Bogang melanjutkan, ketika dirinya siap maju dalam Pilwali Batu melawan dinasti dengan harapan agar politik dinasti yang dibangun Edy Rumpoko bisa membuka mata masyarakat di Kota Batu. Bogang menambahkan, ia memandang politik dinasti yang coba dibangun Edy Rumpoko, berupaya mengatur partai seenaknya sendiri. PDIP dibuat mirip perusahaan keluarga. Karena yang dapat rekom hanya istrinya saja (Beritajatim.com). Berkembangnya isu yang bersifat menjatuhkan semakin menegaskan bahwa PDIP Kota Batu memerlukan strategi komunikasi politik untuk menjaga popularitas dan elektabilitas calon Kepala Daerah yang mereka usung.

Walaupun isu dinasti terus berkembang. Simon Purwo Ali yang juga Ketua Tim Lima DPC PDIP Kota Batu mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan gentar bersaing dengan koalisi parpol besar dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Kota Batu. Itu berkat strategi yang dijalankan PDIP di daerah di bawah bimbingan dan arahan DPP PDIP. Apalagi PDIP memiliki banyak kader dan tokoh partai yang sangat mumpuni untuk diusung dalam Pilkada serentak di berbagai daerah (suryamalang.tribunnews.com). PDIP merawat kader dan ketokohan sehingga memiliki karakter kepahlawanan politik. Pembentukan karakter kepahlawanan politik merupakan bentuk strategi politik dilakukan untuk memiliki sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, keberanian dan sebagainya. Hal itu juga dipublikasikan oleh media massa atau media sosial, sehingga tercipta citra dan opini publik yang positif bagi kalangan publik (Schroeder:2010).

Selain memelihara ketokohan, menurut Schroeder (2010) langkah strategis utama dan pertama yang harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Haris El Mahdi, pengajar Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya Malang dan pengamat sosial politik nasional mengatakan Dewanti ditunjuk oleh DPP PDIP dengan pertimbangan bahwa ia mempunyai kesempatan paling besar untuk memenangkan Pilkada Kota Batu. Posisi sebagai istri walikota dengan seabrek kegiatan sosial merupakan modal bagi Dewanti meraih popularitas dan mengerek elektabilitas. Namun, penunjukan Dewanti bukan tanpa catatan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Dewanti ditunjuk sebagai "petugas partai" untuk mengawal kepentingan ideologi PDIP dan merawat tumbuh-kembang internal PDIP. Catatan ini penting karena selama 10 tahun Eddy Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu, tumbuh-kembang internal PDIP tidak diperhatikan. Ada kesan bahwa Eddy Rumpoko "mengambil jarak" dengan PDIP. Eddy Rumpoko lebih sibuk membangun kemesraan dengan investor ketimbang dengan partai dan kepentingan partai. Eddy Rumpokk lebih dekat dengan Paul Sastro (*owner Jatim Park Grup*) ketimbang dengan Suliadi, ketua DPC PDIP Kota Batu (timesindonesia.co.id).

Selain menyatukan solidaritas internal partai melalui penetapan pasangan calon. Kusnadi selaku Ketua DPD PDIP Jawa Timur memberikan isyarat kepada seluruh kader PDIP Jawa Timur untuk bahu membahu dalam membantu DPC PDIP Kota Batu memenangkan Pilkada Batu 2017. Kusnadi mengingatkan bahwa pada 2015 ada 19 Pilkada di Jawa Timur yang dikeroyok 38 DPC dan pada 2017 hanya 1 Pilkada yang akan dikeroyok 37 DPC maka itu akan menjadi lelucon apabila tidak

menang (pdiperjuangan-jatim.com). Bentuk dukungan DPC lain adalah DPD PDIP melibatkan 292 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk ikut memenangkan pasangan Dewanti Rumpoko dan Cawawali Punjul Santoso. Jumlah anggota DPRD sebanyak 292 orang ditugaskan untuk mengawal berjalan pemungutan suara di tiap TPS, setiap satu orang dapat memantau dua TPS. Sedangkan ketua DPRD mendapat tugas di tiga TPS. Para anggota dewan ini bisa sosialisasi dan mencari suara sebanyak mungkin di TPS yang menjadi kewajibannya tersebut. Selain ditingkat elit politik, Kusnadi menjelaskan sejak awal PDIP telah memiliki format pergerakan yang sudah tersosialisasi secara baik, mulai tingkat RT dan RW sampai Kota. Jadi, format pergerakan tersebut cukup mendukung dalam memenangkan Pilkada Kota Batu. (suryamalang.tribunnews.com)

Kemenangan yang dicapai dengan beberapa langkah yang dijabarkan diatas tidak sepenuhnya sesuai harapan. Dewanti mengatakan bahwa ia memiliki target kemenangan mencapai 50% suara yang tidak tercapai. Hal itu didasari oleh hasil survei yang memperlihatkan tingkat kepuasan rakyat Batu terhadap Pemerintahan Kota Batu dibawah suaminya, Eddy Rumpoko mencapai lebih dari 80 persen. Terlebih lagi, laporan dari para relawan dan masyarakat Kota Batu yang ditemuinya menunjukkan tingkat elektabilitasnya cukup tinggi. (tribunnews.com)

Berdasarkan pemaparan dinamika, langkah-langkah, dan sasaran kemenangan di atas, peneliti ingin memfokuskan penelitian ini terhadap strategi yang digunakan PDIP Kota Batu selaku Partai Petahana dalam Pemilihan Walikota Kota Batu Tahun 2017 sehingga menjadi pemenang dan menjabat sebagai Walikota

dan Wakil Walikota untuk periode berikutnya. Dengan demikian peneliti mengambil judul, **“Studi Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran di latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi :

1. Bagaimanakah startegi komunikasi politik PDIP Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu pada tahun 2017?
2. Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis startegi komunikasi politik PDIP Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu pada tahun 2017.
2. Mendeskripsikan faktor apakah yang mempengaruhi strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu pada tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan diperolehnya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis :

- a. Sebagai sarana pengembangan keilmuan dalam ilmu administrasi publik dan sarana peningkatan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan terkait dengan topik yang bersangkutan.
- b. Sebagai sumbangan informasi bagi peneliti yang mempelajari fenomena terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan atau masukan pemikiran kepada instansi terkait dalam menghadapi agenda-agenda demokrasi lokal atau biasa diistilahkan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas penjelasan latar belakang mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjabarkan sejumlah kondisi atau situasi saat ini yang ditemui di lapangan, yang nantinya akan diteliti untuk mengantarkan kepada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur yang terdiri dari teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian sebagai acuan untuk menganalisis data.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang bagaimana penelitian untuk proses skripsi dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar mencakup deskripsi atau gambaran umum mengenai obyek penelitian, analisis dan interpretasi data yang diawali dengan penyajian dan selanjutnya akan diuraikan dan dibahas analisis masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang ditemukan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berisi tentang temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi telah ada sebelum administrasi dijadikan ilmu pengetahuan. Administrasi publik akan lahir dari tatanan masyarakat yang teratur dan terorganisir. Catatan sejarah memberitahukan kepada manusia modern sesungguhnya administrasi sudah digunakan oleh seluruh peradaban yang tertata seperti Mesir, Cina, termasuk Indonesia. Sistem penataan yang dilaksanakan oleh zaman kuno disebut administrasi publik/negara (Thoha, 2015:13).

Namun definisi atau batasan konsep administrasi publik belum memiliki kesepakatan pasti seperti yang ditinjau dari beberapa pendapat ahli di bawah ini:

Barton dan Chappel mengatakan bahwa administrasi publik sebagai *the work of Government* atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah (dalam Keban, 2014:5). Definisi ini menjelaskan bahwasanya sebuah administrasi adalah kegiatan pelayan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kemudian menurut Dimock, Dimock dan Fox (dalam Keban, 2014: 5) Administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi ini

memaknai administrasi sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang dihasilkan untuk memenuhi ketersediaan barang dan jasa untuk publik.

Administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktek yang berkembang dimasyarakat untuk mengatur dan mencapai suatu hal dengan nilai dan normanya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Nicholas Henry dalam Keban (2014: 6):

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administarasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan secara baik.(2014:6).”

Dilihat dari segi proses politik, administrasi publik adalah salah satu fungsi menjalankan sebuah pemerintahan atau cara yang mendasar untuk melakukan fungsi-fungsi negara. Oleh karena itu, administrasi publik dapat disimpulkan menjadi usaha dan/atau kegiatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan rasionalitas dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pendekatan Administrasi Publik

Dilihat dari latar belakang sejarah, umur administrasi publik memang sudah tua. Akan tetapi, administrasi publik yang modern baru lahir pada akhir abad kesembilan belas atau awal abad kedua puluh. Kelahirannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat administrasi publik berlangsung. Administrasi publik dapat disimpulkan menjadi rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bagi Thomas J. Davy berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam

administrasi publik tidak secara otomatis menunjukkan adanya pembagian waktu secara kronologis. Sebaliknya, Davy hendak menekankan bahwa setiap pendekatan mempunyai aksentuasi sendiri-sendiri, yang dalam perkembangan selanjutnya cenderung terjadi pembauran di antara empat pendekatan yaitu manajerial, psikologis, politis, dan sosiologis. Studi penelitian ini menempatkan kesimpulan pada pendekatan politik yang dikemukakan oleh Thomas J. Davy. Pendekatan politis melingkupi seluruh agenda-agenda politik yang akan berpengaruh pada proses berjalannya administrasi publik.

Secara epistemologis, NPS berakar dari filsafat politik tentang demokrasi. Denhardt dan Denhardt menspesifikasikannya menjadi demokrasi kewargaan. Demokrasi merupakan suatu paham pemerintahan yang berdasarkan pada aturan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks demokrasi kewargaan, demokrasi dalam hal ini dimaknai sebagai pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Warga negara memiliki hak penuh memperoleh perhatian dari pemerintah dan warga negara berhak terlibat dalam setiap proses pemerintahan (politik dan pengambilan kebijakan). Mengingat administrasi publik adalah bentuk implementasi atas perumusan politik. Fokus penelitian ini adalah agenda kegiatan dalam penentuan siapa yang duduk pada jabatan politis melalui partai politik yang juga termasuk badan publik. Menduduki jabatan politik memerlukan usaha komunikasi politik yang dilaksanakan pada masa sebelum dan saat kampanye seperti yang diatur secara konstitusional

pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah.

3. Hubungan Administrasi Publik dengan Politik

Pembahasan mengenai fungsi dan sistem administrasi publik lekat erat dengan dikotomi politik dan administrasi. Dalam Syafri (2012: 137) disebutkan Frank J Goodnow melalui buku *Politics and Administration* tahun 1990 membagi kekuasaan politik dan administrasi dengan batasan yang jelas. Pendapat Goodnow politik berkaitan pada kebijakan negara dan pernyataan negara tapi administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara dan pernyataan negara. Perkembangan selanjutnya dijelaskan pula dalam Syafri (2012: 138) Leonard D. White memberi penjelasan bahwa pada sebuah tingkatan politik dan administrasi terjalin sebuah hubungan timbal balik yang disebut *interpenetration*. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebenarnya ada pemisahan fungsi pada politik dan administrasi.

Namun memiliki keterikatan terkait komunikasi dalam pencapaian tujuan yang termuat dalam kebijakan publik. Komunikasi ini dituntut untuk memiliki kerja sama yang erat agar proses administrasi publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai tujuan kenegaraan yang diinginkan secara efisien. Komunikasi publik terjadi dalam hubungan antara Partai Politik dengan warga negara dimana Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi dan aspirasi politik sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat 1 Point c dan d. Hasil

komunikasi tersebut berguna dalam perumusan dan penetapan kebijakan negara yang melibatkan semua pihak secara demokratis.

B. Strategi Politik

1. Definisi Strategi Politik

Politik dan strategi adalah sebuah pertanyaan yang berulang kali diajukan oleh para politisi dan partai, bahkan terkadang oleh pemerintah. Jawaban yang biasa diberikan adalah “Kita tidak sedang berada dalam situasi perang.” Atau, “Lawan politik kita bukan lah musuh.” atau “Maksud dan gagasan kita sangatlah baik sehingga kedua hal tersebut dapat terwujud tanpa strategi sekalipun.”

Machiavelli, seorang yang bukunya tentang kekuasaan menjadi sangat terkenal di dunia mengetahui benar hal ini. Setiap perubahan menciptakan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Schroeder (2010: 25) hal ini hampir selamanya begitu, karena dalam politik, kecenderungan yang berlaku adalah yang dikenal dengan istilah permainan jumlah nol. Oleh karena itu, setiap ide pasti akan memiliki pendukung dan penentang.

Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar pemilu, agar dapat memiliki pengaruh atas pihak eksekutif secara

konstitusional. Definisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Schroeder yakni strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik (Schroeder, 2010:26).

Sedangkan, Arifin (2011: 235) bahwa strategi komunikasi politik adalah seluruh keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik. Dengan kata lain, setiap gagasan politik, betapapun baik niatnya, hanya dapat diwujudkan dalam konfrontasi dengan penentang gagasan tersebut. Implementasi sebuah gagasan tidak banyak berhubungan dengan alasan atau rasionalitas, tetapi lebih berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh. Hal yang sama berlaku pula bagi perencanaan strategi kampanye. Bahkan kata kampanye sesungguhnya menutupi isu yang sebenarnya, yakni suatu pertarungan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Oleh karena itu, Strategi politik dapat dirumuskan sebagai upaya perencanaan sumber daya dan digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang berujung pada kekuasaan dan legitimasi suatu kelompok masyarakat.

2. Jenis-Jenis Strategi Politik

Strategi politik harus dipertimbangkan dengan tepat untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Setelah pola dasar strategi

dibangun, ada satu pilihan dari sederetan strategi tunggal, di mana pilihan ini dipengaruhi oleh syarat-syarat kerangka kerja, *target image* serta sasaran-sasaran organisasi. Secara umum strategi politik dapat dikategorikan kepada dua jenis yaitu strategi *ofensif* (menyerang) dan strategi *defensif* (bertahan). Strategi *ofensif* dibagi menjadi strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Sementara strategi *defensif* dikategorikan sebagai strategi mempertahankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar (Schroeder, 2010: 185).

Tabel 4
Jenis-Jenis Strategi Politik

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

Sumber: Schroeder (2010: 185)

a. Strategi Ofensif

Strategi ofensif selalu diperlukan jika partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau jika seorang eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam kedua kasus tersebut, kampanye dapat berhasil hanya jika ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau proyek tersebut – dibandingkan sebelumnya. Schroeder (2010: 185) yang termasuk strategi ofensif adalah “strategi memperluas pasar” dan “strategi menembus pasar.” Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diterapkan saat kampanye pemilihan harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang kelompok

pemilihnya akan kita rebut. Strategi ofensif yang digunakan untuk menerapkan kebijakan harus menjual atau menampilkan perbedaan terhadap status quo atau keadaan yang berlaku saat itu dan menyoroti keuntungan-keuntungan yang diharapkan darinya.

1) Strategi Perluasan Pasar

Strategi perluasan pasar yang ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Schroeder (2010) mengatakan bahwa harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Jadi yang dimaksud di sini adalah strategi persaingan yang faktual, di mana berbagai partai yang berbeda saling bertarung untuk segmen kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi. Selain dalam pemilu penerapan kebijakan baru juga termasuk keuntungan dari propaganda perluasan pasar. Schroeder (2010: 187) Dalam hal ini, produk baru yang ditawarkan – yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru tersebut. Perluasan pasar tidak mungkin dilakukan dengan menjual produk lama dalam kemasan lama. Produk atau kebijakan yang sejak lama sudah ada di pasaran dan belum berhasil dijalankan, atau bahkan gagal, tidak dapat dijual di bawah nama yang sama.

2) Strategi Menembus Pasar

Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran

yang lebih baik atau baru. Schroeder (2010:188) Melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target di mana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Sasaran yang mungkin ditargetkan misalnya adalah, diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah kelompok target (misalnya dahulu 30%, sekarang 50%). Schroeder (2010) mengatakan investasi diutamakan untuk bidang kehumasan dan pelatihan.

b. Strategi Defensif

Schroeder (2010: 189) Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya.

1) Strategi Mempertahakan Pasar

Strategi ini adalah tipikal strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Schroeder (2010) Partai pemerintah akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Dalam merespon partai oposisi yang menyerang, partai pemerintah akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi. Partai yang ingin mempertahankan

pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran yang lebih menarik, sebaliknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan yang ada tidak dikenali. Partai-partai yang menerapkan strategi defensif akan berinteraksi secara intens dengan multiplikator dan aliansi. Investasi terutama dilakukan dalam bidang kehumasan/PR. Di dalam organisasi, proses semakin dipermudah dan rutinitas dikembangkan untuk menekan pengeluaran. Selama DPC PDIP Kota Batu memantau keberlangsungan daerah. Nama Dewanti Rumpoko ternyata memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Selain faktor tersebut PDIP ingin mempertahankan kekuasaannya di Kota Batu mengingat bahwa wilayah Malang Raya selain Kota Batu sudah dikuasai partai politik lain.

2) Strategi Melepas atau Menyerahkan Pasar

Schroeder (2010) mengatakan strategi melepas pasar dapat memiliki dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. Kasus ini tidak terlalu sering terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah kasus kedua. Dalam pemilu yang menggunakan kertas suara, di mana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sangat sering terjadi. Tetapi jika para kandidat

terpaksa menyerahkan pasarnya, mereka harus mempertegas ketidakikutsertaan mereka dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lain kepada para pemilih mereka. Dalam usulan inilah terdapat posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan tawaran kepada kandidat lain. Syarat-syarat yang diajukan kepada kandidat yang akan menerima “pasar” kita itu dapat bervariasi – dari konsesi politik hingga pembagian kekuasaan. Dan setiap ada perubahan atau kemajuan, sudah seharusnya disertai dengan sebuah kampanye informasi untuk para multiplikator.

Tabel 5
Tinjauan tentang Pendekatan-Pendekatan dalam berbagai Strategi

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku	Strategi ofensif memperluas pasar	Strategi ofensif menembus pasar	Strategi defensif mempertahankan pasar	Strategi defensif melepas/ menyerahkan pasar
Pemilih	Menarik kelompok pemilih baru	Memanfaatkan potensi yang ada agar lebih efektif	Memelihara pemilih tetap/ pemilih tradisional, memperkuat pemilih musiman	Memberikan alasan atas ketidakikutsertaan, mengusulkan pilihan yang lain
Partai pesaing	Memberi tawaran yang lebih baik (baru) bagi para pemilih kelompok pesaing	Merangkul pemilih partai pesaing	Mengaburkan perbedaan	Merundingkan syarat-syarat untuk usulan pemilihan
Multiplikator, perekrut, penasehat	Melakukan kampanye pengantar	Target-target untuk pembagian suara, insentif untuk berprestasi	Insentif, memelihara multiplikator	Kampanye informasi bagi multiplikator
Lingkungan Eksternal	Memanfaatkan perubahan nilai, perubahan struktural, teknologi informasi	Memanfaatkan teknologi komunikasi baru, memanfaatkan iklim yang ada.	Memanfaatkan data pemilih tetap, memanfaatkan data-data tentang keberhasilan	
Produk, Personil, Profil	Program baru yang melengkapi, perubahan dalam profil,	Pemasaran program yang sudah ada, mengintensifkan	Pemasaran program yang sudah ada, menunjukkan	Membatalkan langkah-langkah penarikan diri atau membatasi ruang

	mewujudkan keselarasan program/personal	keselarasan program/personal	keselarasan program-individu	waktu penarikan diri
Anggota, Pemegang jabatan	Perekrutan anggota/ pengembangan SDM	Memberi pelatihan, meningkatkan motivasi	Memberikan kompensasi untuk kemerosotan anggota	Menjamin pengalihan anggota atau menenangkan anggota jika penarikan melebihi batas waktu
Keuangan	Investasi dalam bidang pengembangan dan humas	Investasi dalam bidang humas	Investasi dalam bidang humas	Menghentikan investasi, memasarkan sumber daya yang tersisa sebaik mungkin
Organisasi	Mempersiapkan organisasi untuk kelompok target baru, memfasilitasi partisipasi kelompok target baru, memelihara anggota baru	Mengoptimalkan proses operasional, memperluas aplikasi teknologi informasi	Mempermudah proses, mengembangkan rutinitas, menurunkan biaya	Membongkar organisasi tahap demi tahap

Sumber : Schroeder (2010: 191-192)

c. Campuran Strategi Ofensif dan Defensif

Selain strategi ofensif dan defensif, terdapat pula strategi yang menggunakan keduanya. Schroeder (2010) mengatakan dalam keadaan tertentu, suatu partai bisa saja menerapkan strategi ofensif dan defensif sekaligus. Meskipun secara strategis keputusan ini selalu berisiko, tapi adakalanya cara ini membawa keberhasilan yang signifikan. Ada beberapa syarat penting untuk penerapan strategi kombinasi seperti ini, yakni bahwa strategi harus diarahkan secara tepat pada satu partai dalam waktu tertentu tanpa ambisi apa pun, terlepas dari apakah yang diambil sikap ofensif atau defensif. Strategi ini seringkali digunakan dalam waktu-waktu tertentu, bahkan dalam momen-momen pemilihan umum sekalipun. Strategi

campuran memiliki resiko yang lebih besar, namun apabila strategi ini berhasil dijalankan, maka kesuksesan yang dicapai juga amat besar. Dapat dicontohkan strategi ini digunakan oleh partai koalisi. Apabila kepala daerah mencalonkan diri kembali dalam pemilihan, maka partai pemenang akan melaksanakan strategi defensif, dan yang lainnya (partai koalisi) akan menggunakan strategi ofensif.

Sedangkan, Arifin (2011) membagi strategi komunikasi politik kedalam tiga langkah strategis. Pertama, ketokohan dan kelembagaan. Kedua, menciptakan kebersamaan. Ketiga, membangun konsensus. Berikut ini adalah penjelasan langkah strategis yang dikemukakan Arifin :

a. Ketokohan dan Kelembagaan

Arifin menyebutkan langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seorang politisi dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan hanya pesan politik saja, melainkan terutama siapa tokoh politik atau aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu.

b. Menciptakan Kebersamaan

Kebersamaan adalah perasaan yang dibangun oleh politisi dengan khalayak. Hal itu dibutuhkan untuk menciptakan kondisi perjuangan yang utuh dan direstui oleh seluruh masyarakat. Suasana *homofili* yang dibangun harus

berdasarkan pada kondisi khalayak sehingga khalayak memiliki empati terhadap politisi. Pemahaman politisi terhadap khalayak akan memudahkan politisi untuk menentukan metode komunikasi serta pesan persuasif yang akan disampaikan.

c. Membangun Konsensus

Tujuan komunikasi politik dicapai melalui penentuan bersama dimana keputusan diambil secara bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama. Konsensus dilakukan politisi tidak hanya ke dalam partai yang dijadikan sarana politik melainkan terhadap partai dan kelompok yang berbeda. Konsensus harus didasari pada paradigma interaksional melalui penciptaan kebersamaan yang manusiawi. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak memiliki rasa kebersamaan (*sense of belonging*) sehingga dapat berpartisipasi secara aktif.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenangan Strategi

Implementasi strategi dilakukan untuk menetapkan parameter, berdasarkan definisi sasaran taktis dan melalui penetapan target *image*. Selain itu, implementasi juga terjadi melalui partisipasi aktif di dalam menjalankan program dan aktivitas. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi strategi tergantung pada orang-orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini. Menurut Schroeder (2010: 394-409) faktor manusia dan operasional memegang peranan penting.

a. Faktor-Faktor Manusia

Para pimpinan politik, manajer kampanye dan orang-orang yang bekerja bersama para aktivis setempat memainkan peran penting dalam kaitannya dengan faktor manusia ini. Struktur partai di dalam organisasi yang demokratis kerap menimbulkan kebingungan. Faktor ini yang memberikan beberapa ide dasar tentang organisasi kampanye dan prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan.

1) Kepemimpinan Politik

Pimpinan politik – terlepas apakah ia pemerintah, menteri, pimpinan partai, walikota ataupun pimpinan sebuah NGO – harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, baik tugas-tugas yang diatur dalam konstitusi, Undang-undang Pemilu, AD/ART atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Pimpinan politik bertanggung jawab atas program, pemilihan kandidat, pembuatan rencana anggaran dan menyetujui kebijakan untuk implementasi strategi. Jika ketetapan-ketetapan ini telah dilaksanakan, pimpinan politik sebaiknya tidak lagi mencampuri keputusan yang berkaitan dengan manajemen kampanye, kecuali pimpinan kampanye itu sendiri yang menginginkan adanya konsultasi dengan pimpinan politik untuk keputusan- keputusan penting yang mereka buat. Karena itu, bagi para pimpinan politik berlaku prinsip berikut: "Pimpinan politik harus melaksanakan tugas mereka secara penuh dan tepat waktu, dan setelah itu tidak boleh mencampuri pekerjaan manajemen kampanye secara detail."

2) Manajer Kampanye Pemilihan Umum

Seorang manajer kampanye hendaknya mampu berpikir dan mengambil keputusan secara strategis dan politis. Seorang pimpinan kampanye bertanggungjawab untuk membuat perencanaan, tetapi terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tekad atau keberanian untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan dan kejelasan menjadi prasyarat penting yang harus dimiliki seorang manajer kampanye. Keputusan yang ragu-ragu dan tidak jelas dapat membahayakan seluruh proyek. Seorang manajer kampanye tidak boleh menunda-nunda pengambilan keputusan. Sikap mengulur-ulur waktu karena mengumpulkan data tanpa akhir sebelum mengambil keputusan bukanlah sikap yang cocok untuk seorang manajer kampanye. Selain itu, Seorang manajer kampanye harus mampu memotivasi dan mengelola organisasi dan seksi-seksi di dalam organisasi yang berada di bawahnya. Untuk itu, ia harus memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas dan sekaligus memantaunya. Selain itu ia juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian yang adil, dan harus mampu mengelola kritik maupun pujian yang diterimanya

3) Aktivis

Aktivis adalah anggota-anggota partai yang bekerja untuk kegiatan-kegiatan partai, yang diharapkan membawa efek berita yang besar – yang tidak terbatas pada pemanfaatan kegiatan yang diliput oleh media saja. Yang termasuk dalam golongan aktivis ini adalah anggota-anggota

partai, sukarelawan pendukung kampanye dan fungsionaris di tingkat bawah yang berhubungan dan bekerja langsung dengan kelompok-kelompok target. Mereka inilah yang menjadi tulang punggung partai dalam setiap kampanye. Untuk dapat menilai dampak atau pengaruh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pertama-tama kita harus memeriksa kuantitas. Jumlah pekerja atau pendukung yang aktif dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kampanye.

4) Motivasi Sukarelawan

Apabila pimpinan tidak memiliki sasaran, maka akan sulit baginya untuk mengajak orang lain dalam menjalankan strategi politik, karena tidak seorang pun tahu ke mana arah tujuannya. Karena itu semuanya harus dimulai dengan penjelasan sasaran yang jelas. Tanpa ada sasaran, maka tidak ada motivasi yang digerakkan. Untuk itu kita harus mengenal orang-orang tersebut beserta pengalaman mereka, kemampuan mereka, tapi juga dengan ketakutan mereka, rasa hormat mereka dsb. Pada kenyataannya pihak pimpinan akan merasa senang apabila mereka mengetahui siapa nama orang-orang tersebut, di mana mereka tinggal dan kadang-kadang bahkan mereka tahu, pekerjaan apa yang mereka lakukan. Di sini tampak model gunung es. Kita hanya mengenal puncak gunung es, namun kita hampir tidak mengetahui apa yang ada di bawah permukaan gunung es tadi. Itulah alasan-alasan untuk mencari tahu tentang keikutsertaan atau pantangan mereka.

b. Faktor-Faktor Operasional

Selain faktor-faktor manusia, masih ada faktor-faktor operasional yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi sebuah strategi. Prinsip desakan waktu, prinsip penyesuaian yang fleksibel, dan prinsip ilusi. Faktor ini yang menunjukkan kondisi lapangan peperangan secara nyata dalam implementasi strategi politik.

1) Prinsip Desakan Waktu

Prinsip kecepatan harus diberi prioritas di sini. Berbeda dari proses perencanaan yang berlarut-larut dan memerlukan pertimbangan yang penuh kehati-hatian, implementasi harus berlangsung dengan cepat, karena semakin lama ditundanya pelaksanaan sebuah perencanaan, semakin sedikit pula faktor situasional aktual dipertimbangkan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya sebuah kebocoran juga semakin besar, sehingga dapat mengakibatkan bagian-bagian dalam perencanaan bocor ke publik dan menghambat tindakan yang akan dilakukan.

2) Prinsip Penyesuaian yang Fleksibel

Fleksibilitas merupakan pengenalan dan pemahaman yang lebih baik atas tantangan atau peluang spesifik dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi ini. Fleksibilitas bukan berarti sikap sesuka hati. Perencanaan strategis dan taktis sebisa mungkin harus dapat diwujudkan. Tetapi karena suatu kondisi dan situasi atau karena adanya kejadian tertentu, dimungkinkan bagi kita untuk menggeser batas waktu,

atau melakukan penyesuaian dengan budaya setempat, atau mempertimbangkan “kondisi cuaca”. Mengingat faktor-faktor ini, fleksibilitas bisa dikatakan sebagai cara halus untuk menyesuaikan pelaksanaan kampanye dengan kondisi lokal untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dalam kerangka waktu telah ditetapkan.

3) Prinsip Ilusi

Manuver-manuver tipuan atau ilusi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan strategis. Tipuan ini untuk mengalihkan perhatian lawan dari bidang-bidang tertentu yang tidak menguntungkan kita. Prinsip ini juga berguna agar lawan membangun pertahanan di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak akan kita serang, sehingga pertahanannya di tempat-tempat lain menjadi lemah.

C. Komunikasi Politik

1. Defisini Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang memiliki unsur politis di dalam pelaksanaannya. Komunikasi dapat berbentuk pemberian informasi dari penguasa politik kepada warga negara ataupun aduan atau aspirasi oleh rakyat ke penguasa. Kekuasaan adalah sumber dari politik, dan pelaksanaan politik yang efektif berawal dari komunikasi politik.

Brian McNair dalam Cangara (2016: 30) berpendapat bahwa komunikasi politik adalah murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomis, petugas yang

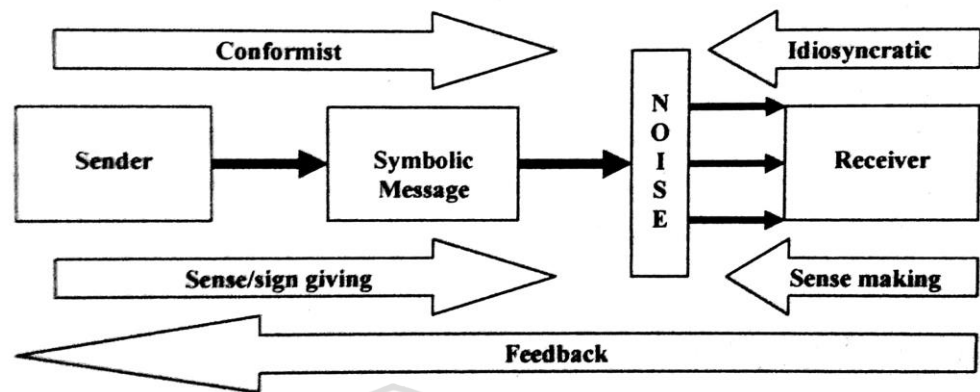
memiliki kewenangan untuk memberi keputusan dan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk benda atau hadiah.

Selain itu, menurut Susanto (2009: 4) komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap, dan tingkah laku orang-orang, lembaga-lembaga, atau kekuatan-kekuatan politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Dengan demikian digunakan sebagai sarana politik serta dilakukan bersamaan dengan kegiatan bidang diplomasi, ekonomi, dan militer. Subiakto & Ida (2014: 20) membatasi komunikasi politik merupakan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang mempunyai konsekuensi atau akibat politik, aktual potensial, terhadap fungsi sistem politik.

Oleh karena itu, secara teknis, komunikasi politik dapat dikatakan sebagai proses atau mekanisme komunikasi aktor-aktor politik untuk menyampaikan suara politik melalui hubungan langsung atau tidak langsung. Karena itu, komunikasi politik harus mencerminkan interaksi yang konsisten antara penguasa politik dengan warga negara dengan maksud menyerap aspirasi warga negara untuk diterjemahkan menjadi program kerja ataupun pandangan perumusan kebijakan publik.

2. Proses Komunikasi Politik

Proses komunikasi adalah proses yang sangat kompleks, terutama ketika berusaha membangun image politik. Menurut Firmanzah (2008) hal yang penting bukanlah data dan informasi yang akan diterima namun pesan-pesan simbolis yang dapat membentuk image politik.



Gambar 1
Proses Komunikasi Politik

Sumber : Firmanzah, 2008: 260

Pesan simbolik yang disampaikan partai politik bertujuan untuk memiliki sikap *conformist*, yakni bahwa mereka yang mendapat pesan tersebut akan memiliki pemahaman yang sama. Namun, pada realita yang terjadi sering kali mendapat gangguan (*noise*) sehingga pesan yang disampaikan berbeda dari semula. Gangguan ini memunculkan ancaman seperti counter-attack dari lawan politiknya. Berbeda dengan pengirim pesan, penerima pesan politik cenderung mengartikan pesan secara berbeda (*idiosyncratic*). Hal ini terjadi karena setiap masyarakat memiliki kerangka acuan individu secara berbeda-beda. Selain itu, dalam proses komunikasi terlibat pula umpan-balik (*feedback*) yang ditujukan untuk pengirim pesan. Umpan-balik ini menjadi penting bagi pengirim pesan sehingga mereka dapat mengetahui apakah pesan yang mereka kirim sudah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Tujuan dan Peran Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi politik bukan hanya sekedar memberikan data dan informasi kepada publik, namun lebih dari itu komunikasi politik merupakan proses yang dimaksudkan untuk menghasilkan persepsi yang sama dari semua aktor politik. Menciptakan persamaan persepsi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keterbukaan masing-masing pihak yang terlibat untuk saling bertukar informasi dan menerima informasi tersebut. Selain itu, harus ada keinginan bersama yang dilandasi dengan kepercayaan bersama bahwa hal yang dilakukan akan berimbas positif pada lingkungan.

Firmanzah (2008: 258) mengatakan bahwa salah satu kendala utama dalam komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan atau tanggapan adalah bias persepsi. Komunikasi politik memiliki peran yang penting untuk mereduksi rumor-rumor tentang politisi yang menjauhkan politisi dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh informasi dari politisi dapat terserap masuk ke dalam masyarakat dan dapat diterima dengan benar tanpa adanya kesalahpahaman. Selain untuk memahami informasi dari politisi kepada masyarakat, komunikasi politik yang efektif juga berperan untuk memudahkan para penguasa politik memahami dan merasakan apa yang dipikirkan oleh masyarakat.

Konteks komunikasi politik ini diutamakan pada sistem pemilihan umum. Pemilihan umum memerlukan tindakan pemberian suara dalam pemilihan umum melalui berbagai pertimbangan. Arifin (2011: 231) mengatakan bahwa pemberi suara mengalihkan pilihannya dari satu partai ke partai lain atau dari

satu kandidat kepada kandidat lain disebabkan karena adanya atribut sosial dan demografi. Selain itu Arifin (2011:232) mengatakan bahwa pemberi suara akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang dipandang paling ideal. Ideal yang dimaksud adalah kandidat yang memiliki kedewasaan, kejujuran, kecerdasan, kesungguhan. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menjatuhkan pilihan. Partai politik atau kandidat harus mampu merencanakan strategi yang tepat dengan pertimbangan-pertimbangan yang berpengaruh kepada khalayak.

4. Strategi Komunikasi Politik

Arifin (2011: 235-265) membagi strategi komunikasi politik kedalam tiga langkah strategis. Pertama, ketokohan dan kelembagaan. Kedua, menciptakan kebersamaan. Ketiga, membangun konsensus. Berikut ini adalah penjelasan langkah strategis yang dikemukakan Arifin :

a. Ketokohan dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seorang politikus dan kemandirian lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik.

1. Merawat Ketokohan

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan,. Menurut Arifin (2010) beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai citra

jabatan ideal baginya. Oleh karena itu, politis harus mampu mengkomunikasikan rekam jejak keberhasilan dan keputusannya dalam memimpin.

2. Memantapkan Kelembagaan

Selain memelihara ketokohan, mengembangkan dan membesarkan kelembagaan menjadi bagian pertama. Lemaga yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik, lembaga itu dapat berupa partai, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi, termasuk lembaga non-politik. Oleh karena itu, lembaga merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif.

b. Menciptakan Kebersamaan

Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politisi dan khalayak (rakyat). suasana *homofili* yang harus diciptakan adalah persamaan simbol komunikasi dan nilai politik.

1. Memahami khalayak

Berdasarkan teori khalayak kepala batu dan paradigma psikologis maka komponen psikologis yang harus dikenal dari khalayak yang berkaitan dengan politik adalah keyakinan, kepentingan, motivasi baik bersifat politik dan non-politik. Arifin (2010) mengatakan beberapa hasil studi menunjukkan bahwa para pemilih memberikan

suaranya kepada partai atau kandidat, yang memiliki kesesuaian ideologi.

2. Menyusun Pesan

Harus disadari bahwa individu-individu dalam saat yang bersamaan selalu dirangsang oleh banyak pesan dari berbagai sumber, termasuk pesan politik. Sebagai syarat komunikasi politik, sebuah pesan harus mampu menimbulkan perhatian atau perbedaan dengan pesan-pesan yang lain. Kedua hal itu ditujukan terutama dalam penggunaan tanda-tanda komunikasi dan penggunaan medium/media.

3. Menetapkan Metode

Pemilihan metode dan media ini harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Dalam komunikasi politik dikenal adanya momentum penting yang harus dilewati yang hasilnya dapat diukur secara matematis adalah pemilihan umum. Suara yang diraih dalam pemilihan umum merupakan hasil konkrit dari keseluruhan kerja politik termasuk komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan metode yang digunakan.

4. Memilah & Memilih Media

Penggunaan mediaum (tunggal) atay media (jamak) dalam komunikasi politik, perlu dipilah dan dipilih dengan cermat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi khalayak, dengan memperhatikan sistem komunikasi politik di suatu negara bangsa. Penggunaan salah satu di antara semua kebutuhan atau tersedia itu

sangat tergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayakn menerima dan mencerna pesan-pesan politik yang akan disampaikan. Oleh karena itu, penentuan media didasarkan pada kemampuan penerima pesan politik bukan pada kekuatan pengirim pesan politik.

c. Membangun Konsensus

Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik, yaitu membangun konsensus baik antara para politis dan dalam satu partai politik maupun antara para politikus dari partai partai yang berbeda.

1. Seni Berkompromi

Dalam membangun konsensus, seorang politisi atau aktivis harus memiliki kemampuan berkompromi, yang merupakan suatu seni tersendiri. Seni atau kiat berkompromi merupakan bakat atau bawaan lahir dan pasti dimiliki oleh seorang politisi. Bakat itu harus dikembangkan terus menerus sehingga kemampuan membangun konsensus semakin mantap.

2. Bersedia Membuka Diri

Para politisi yang akan melakukan lobi untuk mencari solusi dengan membangun konsensus harus memulai dengan kesediaan membuka diri. Memang, dalam lobi terjadi proses saling memberi dan menerima pesan. Para pelobi harus siap membuka diri, yaitu menerima pengalaman baru atau gagasan baru, sesuai dengan konsep diri yang ada pada masing-masing politisi yang berbeda pendapat. Konsep diri

merupakan faktor yang sangat menentukan komunikasi politik interaksional atau lobi karena setiap orang termasuk politisi, bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya.

5. Pemasaran Politik

a. Definisni Pemasaran Politik

Bentuk pengorganisasian dan pengelolaan dalam komunikasi politik yang turut dikembangkan saat ini adalah pemasaran politik. Arifin (2011) menyebutkan istilah pemasaran yang selama ini dikenal dalam bidang ekonomi diterapkan ke dalam politik dengan sebutan “Pemasaran Politik” dipahami sebagai penyebaran gagasan-gagasan politik dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran komersial. Hal itu menunjukkan kecendrungan konvergensi anantara dunia politik dan dunia bisnis.

Pemasaran politik dapat didefinisikan sebagai

“...penerapan prinsip-prinsip dan prosedur pemasaran dalam kampanye politik oleh berbagai individu dan organisasi. Prosedur yang terlibat termasuk analisis, pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan kampanye strategis oleh calon, partai politik, pemerintah, pelobi dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mendorong opini publik, memajukan ideologi mereka sendiri, memenangkan pemilu, dan meloloskan peraturan dan referendum dalam menanggapi kebutuhan dan keinginan orang-orang dan kelompok tertentu dalam masyarakat.” Newman dalam Kaid (2015: 22)

McNair mengatakan bahwa partai memiliki jatidiri dan karakter sendiri, seperti halnya citra diri para pemimpinnya, bisa dibentuk dan dicetak melalui strategi komunikasi (McNair, 2016:214). Hal tersebut mengandung pernyataan pemosisian, sebuah analisis yang jelas mengenai untuk suatu apa merek itu, untuk siapa merek tersebut,

mengapa merek tersebut menarik untuk dipilih. Sedangkan Butler & Collins dalam Arifin (2011: 146) mengatakan bahwa pemasaran politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan citra publik. Hal itupun ditekankan oleh Dean & Croft dalam Arifin (2011: 146) bahwa dalam membangun kepercayaan dan citra ini hanya bisa dilakukan dalam jangka panjang, tidak hanya masa kampanye. Sesungguhnya pemasaran politik tidak dimaksudkan untuk menjual kandidat atau partai politik kepada rakyat. Bahkan pemasaran politik menjadikan calon pemilih sebagai subjek dan mengajarkan agar kandidat atau partai politik mampu merumuskan secara jelas tentang produk politik melalui pengembangan simbol, citra, platform, visi, misi dan program yang ditawarkan dengan mengacu pada ideologi politik masing-masing.

b. Peran Pemasaran dalam Politik

Membangun suatu *image* politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan-balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat (Firmanzah, 2008). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pasar komersial berlaku pula pada pasar politik perusahaan sukses memiliki orientasi pasar dan selalu terlibat dalam menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Dengan kata lain pemasaran harus mengantisipasi kebutuhan pelanggan mereka

dan terus-menerus mengembangkan produk-produk dan layanan inovatif untuk mempertahankan pelanggan mereka tetap puas. Kotler & Kotler dalam Kaid (2015:22) mengatakan politisi memiliki orientasi yang sama dan terus mencoba untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka dengan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan keuntungan terbanyak dengan biaya terendah. Dalam bisnis, segmentasi dan *targeting* untuk mengidentifikasi segmen pelanggan kepada siapa pelaku pasar mengarahkan produk dan kampanye promosi. Kaid (2015: 27) mengatakan dalam politik, segmentasi pasar digunakan sejak dulu oleh masing-masing partai politik untuk memilih kelompok yang mereka targetkan dengan daya penarik mereka. McNair (2016) menambahkan bahwa pemasaran politik menjadi penting untuk ‘menjajakan produk’. Penggunaan istilah komersil berkonotasi dengan upaya promosi dan iklan untuk sebuah produk politik tertentu.

c. Menjalankan Pemasaran yang Sukses

Kaid (2015: 30) mengatakan dalam pengembangan produk harus memiliki beberapa aturan dasar, yaitu :

- 1) Perusahaan yang sukses menghabiskan banyak waktu mempelajari kebutuhan pelanggan untuk proses pengembangan.
- 2) Menjadikan pelanggan sebagai bagian tim pengembangan.
- 3) Mendapatkan dukungan dari pimpinan dan advokat.
- 4) Menghabiskan waktu dalam pengumuman produk baru dan tidak membiarkan langkah berjalan kebetulan.

Secara umum, perlu ada perbaikan terus-menerus dan dalam beberapa kasus, perlu rekayasa ulang untuk meningkatkan posisi seorang pemimpin dalam jajak pendapat. Selain itu, Newman dalam Kaid (2015: 30-31) mengutarakan keberhasilan calon, partai politik atau organisasi yang ingin mendorong opini publik akan bergantung pada praktik-praktik berikut:

- 1) Memahami apa yang dicari pemilih.
- 2) Menjalinkan hubungan emosional dengan orang-orang.
- 3) Kita hidup di era produksi citra.
- 4) Gunakan satu visi sentral untuk terhubung isu-isu dan kepribadian calon.
- 5) Bicaralah tentang keprihatinan pemilih, bukan keprihatinan anda sendiri.
- 6) Pemilih selalu menginginkan perubahan.
- 7) Pasarkan diri anda ke media.
- 8) Dapatkan dukungan dari elit partai.

Akhirnya, pengembangan produk baru yang sukses menuntut perusahaan untuk membangun organisasi yang efektif untuk mengelola proses pengembangan produk.

d. Kampanye Politik dan Kampanye Pemilihan

Kampanye politik memiliki perbedaan dengan kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan adalah aktivitas politik yang ditujukan untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sementara

kampanye politik bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus-menerus untuk membangun citra politik (Firmanzah, 2008: 276).

Tabel 6
Kampanye Pemilihan dan Kampanye Politik

	Kampanye Pemilihan	Kampanye Politik
Jangka dan Batas Waktu	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	<i>Image</i> politik
Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung <i>Push Marketing</i>	Membangun dan membentuk reputasi politik <i>Pull-Marketing</i>
Komunikasi Politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan harapan politik kalau menang pemilu	Interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat
Sifat Hubungan antara Kandidat dan Pemilih	Pragmatis/Transaksional	Hubungan Relasional
Sifat Program Kerja	<i>Market-oriented</i> dan berubah-ubah dari pemilu satu ke pemilu lainnya	Konsisten dengan sistem nilai partai
Produk Politik	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi Ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai
Retensi Memori Kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
Sifat Kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

Sumber : Firmanzah, 2008: 277

Kampanye pemilihan adalah bagian kecil dari kampanye politik. Meskipun tidak dalam masa pemilihan umum, setiap ucapan dan tindakan dapat dikategorikan sebagai kampanye politik. Kampanye pemilihan dan kampanye politik bersifat saling melengkapi. Firmanzah (2008) mengatakan kampanye pemilihan akan menyegarkan kembali citra politik yang dibangun melalui kampanye politik. Mengingat perlunya penegasan dan penguatan ulang melalui kampanye pemilihan untuk memobilisasi massa.

D. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Menurut Lapalombara & Weiner dalam Labodo & Ilham (2017: 4) terdapat tiga teori asal muasal terbentuknya partai politik, yaitu: Pertama, teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Sigmund Neumann dalam Labodo & Ilham (2017: 11) mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (1981: 14) partai politik adalah organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.

Menurut pendapat beberapa ahli diatas tentang konsep partai politik, dapat dilihat bahwa setidaknya partai politik memiliki unsur organisasi resmi, aktivisi politik, aktivitas politik, dan tujuan politik.

Indonesia memiliki UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang Partai politik. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Terbentuknya Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Labodo & Ilham (2017: 1) menyebutkan pada awal perkembangannya, akhir abad ke-18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja.

Labodo & Ilham (2017: 2) menjelaskan bahwa di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tidak lepas dari munculnya iklim kebebasan yang luas bagi

masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Sebenarnya cikal bakal partai politik di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan. Partai politik yang muncul dalam masa penjajahan tidak lepas dalam bentuk gerakan untuk menuju pembebasan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan.

Partai-partai pelopor tersebut mewakili beragam ideologi yang mendasari dibentuknya partai politik seperti nasionalis, agamis, dan komunis. Masing-masing ideologi masih mendasari berbagai macam landasan ideologis partai politik hingga saat ini kecuali partai komunis yang dihentikan sejak berdirinya masa Orde Baru. Dihentikannya partai komunis juga diikuti pelarangan ideologi komunis untuk seterusnya melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

3. Partai Politik dan Aspirasi Politik

UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan secara umum tujuan Partai Politik adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara melalui jalur-jalur politik. Berikutnya secara khusus partai politik memiliki tujuan untuk memperjuangkan cita-cita partai dan konstitusi politiknya untuk mencapai kesejahteraan rakyat banyak sesuai dengan pandangan politiknya. Cita-cita tersebut dicapai apabila Partai Politik menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan, penyalur aspirasi politik, wadah partisipasi politik masyarakat, dan rekrutmen politik dalam jabatan politik. Semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh partai politik dengan komunikasi politik kepada masyarakat sehingga dapat membentuk reputasi yang baik bagi partai politik dan kehidupan politik.

E. Pemilihan Umum

Konsep demokrasi pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilihan umum yang akan dibahas. Berangkat dari pengertian demokrasi oleh Abraham Lincoln dalam Labodo & Ilham (2017: 45) yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemilihan umum lahir dan dipercaya sebagai satu bentuk atau cara bagaimana rakyat dapat menentukan dan mengangkat pemimpin negara atau suatu daerah.

1. Definisi Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang terbaru tentang pemilihan umum yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Labodo & Ilham (2017: 50) Pemilihan umum dapat memiliki dua pengertian yaitu pemilihan umum secara konseptual dan pemilihan umum secara operasional. Secara Konseptual Ibnu Tricahyono dalam Labodo & Ilham

(2017: 50) mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang abstrak dan filosofis bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Berikutnya secara operasional Umaruddin Masdar dalam Labodo & Ilham (2017: 51) mengartikan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil rakyat. Secara lebih luas, Andrew Reynolds mengatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose & Mossawir Rose & Mossawir dalam Labolo & Ilham (2017: 53) fungsi pemilihan umum antara lain:

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh warga negara atau wakil mereka di parlemen.

- b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.

Pemilu merupakan ajang untuk pemilih menentukan pejabat publik yang berbentuk sarana umpan balik. Ketika pemerintahan yang berkuasa dianggap tidak mampu memberikan kinerja yang baik maka pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih pada periode berikutnya.

c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.

Setelah proses penghitungan suara selesai dan pemenang pemilu dapat ditentukan. Aktivis politik dapat mengukur seberapa kuat dan besar dukungan kepada mereka. Semakin besar angka pemilih dan selisih kemenangan maka kekuatan penguasa semakin kuat.

d. Sarana rekrutmen politik.

Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sebelum dilaksanakan pemilu dan rangkaiannya seperti kampanye. Maka kontestan politik memerlukan seluruh informasi terkait tuntutan masyarakat yang akan mereka sesuaikan untuk paket kebijakan yang akan mereka jual dalam masa kampanye agar terpilih dan mempertahankan kekuasaan setelah dilantik menjadi jabat publik.

Selanjutnya, Ramlan Surbakti dalam Labodo & Ilham (2017: 55) menyebutkan terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan

alternatif kebijakan umum dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat namun pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan di masyarakat kepada badan-badan tertentu melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga intergrasi masyarakat tetap terjadi. Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan pemimpin politik eksekutif tingkat Kepala Daerah ditandai dengan munculnya tiga tata cara penetapan Kepala Daerah. Tata cara pertama pada masa kemerdekaan, Kepala Daerah ditetapkan melalui metode penunjukan. Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh Komite Nasional Daerah (KND) yang sejak periode UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan istilah DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan KND dan atau DPRD Kabupaten/ Kota.

Tata cara berikutnya setelah jatuhnya Soeharto, menjadi salah satu hal yang diperdebatkan adalah reformasi pemilu Indonesia terkait pemilihan kepemimpinan eksekutif dari pemerintah provinsi dan kabupaten (Choi, 2007). Parlemen menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam UU tersebut Kepala daerah dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, berjalannya Undang-Undang ini memunculkan masalah tersendiri seperti memunculkan tuduhan bahwa calon bisa membeli suara parlemen daerah untuk mempertahankan legitimasinya dalam kekuasaan daerah (Rasyid dalam Chou, 2007). Seperti halnya dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota, sebelumnya dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat di DPRD. Namun karena arus reformasi meningkatkan untuk penegakan demokrasi secara murni, maka pemilihan pemimpin mulai tahun 2004 sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat dengan prinsip *One Man One Vote*. Melalui revisi UU ini maka hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi mitra atau koordinatif. Berbeda dengan fase sebelumnya dimana DPRD memiliki kekuasaan lebih besar karena memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Cangara (2016: 217) menjelaskan mengingat biaya politik yang tinggi, utamanya dalam biaya pelaksanaan pemilu untuk memilih legislatif maupun eksekutif cukup besar, maka pemerintah mulai tahun 2015 melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pilkada tahap pertama yang telah berhasil dilaksanakan pada 10 Desember 2015, dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada 27 Juni

2018 sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

4. Tinjauan Filosofis Pemilihan Kepala Daerah

Dilihat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengertian ‘demokratis’ dalam konstitusi tidak secara otomatis dapat diganti dengan ‘pemilihan langsung’, karena tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pemilihan tak langsung melalui parlemen lokal (DPRD) adalah pemilihan yang tidak demokratis. Sebaliknya juga demikian, tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung otomatis demokratis.

Kompendium Pemilihan Kepala Daerah tahun 2007 menyebutkan konsep pilkada hampir tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah. Artinya, ada korelasi yang signifikan analisis pemilihan kepala daerah dengan pergeseran konsep otonomi daerah, bahwa otonomi daerah merupakan konteks bahkan prasyarat dari adanya pemilihan kepala daerah. Dalam hal demikian, masyarakat (lokal) yang menerima otonomi harus diberdayakan dan harus mampu bertindak demi kepentingan tersebut.

Masyarakat lokal yang menerima otonomi dalam satu yurisdiksi wilayah tertentu tersebut dikenal sebagai daerah otonom. Pertama-tama tentu harus ada demokrasi perwakilan dan kemudian disusul oleh lembaga eksekutif yang akan menjadi pengendali pemerintahan. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sudah dipastikan berkedudukan kuat, politis dan cenderung

tunggal. Kemudian kedudukan yang kuat ini harus dibandingkan pula dengan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, baik Kepala Daerah berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat pula (*dual function*) atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) pendekatan kualitatif dapat disebut mejadi metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kembali menurut Sugiyono (2015:24) kepentingan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan seperti tindakan partisipasi yang verbal maupun non-verbal.

Sedangkan untuk jenis penelitian deskriptif Menurut Usman dan Setiady (2008:129) kata deskriptif berasal dari Bahasa Inggris "*descriptive*" yang artinya bersifat melukiskan atau menggambarkan sesuatu hal, peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Penelitian ini menekankan pada upaya pengumpulan data berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, arsip institusi, dan temuan lapangan. tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah agar peneliti dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan strategi PDIP dalam menjaga elektabilitas calon Kepala Daerah pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan kepada substansi penelitian yang akan dilakukan pada objek yang akan diteliti agar terpusat kepada masalah yang sedang diteliti sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah dan tidak melebar. Oleh sebab itu peneliti memberi batasan fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2017
 - a. Strategi Mempertahankan Pasar
 - 1) Pemilih
 - 2) Multipliaktor
 - 3) Lingkungan Eksternal
 - 4) Produk, Personil, Profil
 - 5) Organisasi
 - 6) Organisasi
 - b. Kampanye Pemilihan
 - 1) Jangka dan Batas Waktu
 - 2) Tujuan
 - 3) Strategi
 - 4) Sifat Hubungan Antara Pemilih dan Kandidat
 - 5) Produk Politik
 - 6) Sifat Kampanye



2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu tahun 2017.

a. Faktor Pendukung

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia
- 2) Faktor Operasional

b. Faktor Penghambat

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia
- 2) Faktor Operasional

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2014) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan lokasi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena penetapan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditentukan sehingga mampu memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu. Alasan pemilihan Kota Batu sebagai lokasi penelitian adalah terjadinya fenomena menangnya calon Kepala Daerah selama tiga kali berturut yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Situs penelitian adalah lokasi sebenarnya peneliti melakukan observasi atau menggambar keadaan objek penelitian, sehingga keakuratan informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dapat diperoleh. Situs penelitian ini

adalah DPC PDIP Kota Batu. Alasan pemilihan situs penelitian ini adalah agar memudahkan peneliti mengumpulkan data yang akurat dan lengkap.

D. Sumber Data

Moleong (2014:157) menjelaskan bahwasanya kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dapat didokumentasikan melalui catatan terutulis atau perekaman, pengambilan foto, atau film. Sumber data yang mendukung informasi yang mendukung informasi yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang didapatkan melalui wawancara. Informasi dalam kegiatan wawancara yang ada di lapangan antara lain:

- a. Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu.
- b. Ir. Sutiyo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDIP Kota Batu & Ketua Tim Pemenangan Dewanti-Punjul.
- c. Dwi Yuniar Saniman selaku anggota Tim Pemenangan & Sekretaris Badan Pelatihan Saksi Nasional (BPSN) DPC PDIP Kota Batu.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu Sumber Data yang diperoleh dari sumber tertulis, yang dapat dibagi atas catatan-catatan, sumber buku, majalah, jurnal, peraturan tertulis, arsip, data statistik, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber

data tambahan dalam penelitian. Sumber data sekunder digunakan peneliti sebagai data pendukung dari data primer.

Selain mengumpulkan sumber data melalui wawancara, peneliti akan memanfaatkan hasil dokumentasi kegiatan, baik yang didokumentasikan oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Adapun kegiatan yang akan didokumentasikan untuk menjadi sumber data utama tersebut antara lain kegiatan kajian, diklat formal, diklat non-formal serta program lain yang terkait dengan program pembinaan minat baca.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui mengenai teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2015:225) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. *Observation* (pengamatan)

Metode Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistemik. Observasi

dilakukan untuk mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat (Sugiyono, 2015). Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah metode observasi tanpa partisipasi (nonpartisan). Alasan peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan karena pada saat peneliti akan meneliti Pilkada Kota Batu Tahun 2017. Pilkada Kota Batu Tahun 2017 sudah berlangsung dan sudah ditetapkan bahwa pasangan calon Dewanti Rumpoko – Punjul Santoso menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Periode 2017-2022.

2. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber/ orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan yang ditentukan sesuai dengan tema penelitian dan fokus penelitian. Pertama adalah anggota tim pemenangan sekaligus Sekretasi BPSN DPC PDIP Kota Batu. Kedua, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDIP Kota Batu & Ketua Tim Pemenangan Dewanti-Punjul. Ketiga, Ketua DPC PDIP Kota Batu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah, surat kabar, internet, koran dan juga dokumen lain yang berhubungan langsung dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang ada di Kantor DPC PDIP Kota Batu serta data-data dari KPUD Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang lebih baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2015:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Berikutnya Sugiyono (2015:222) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data. Sehingga instrumen penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data, menilai kualitas data, analisis data, mentafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman Wawancara

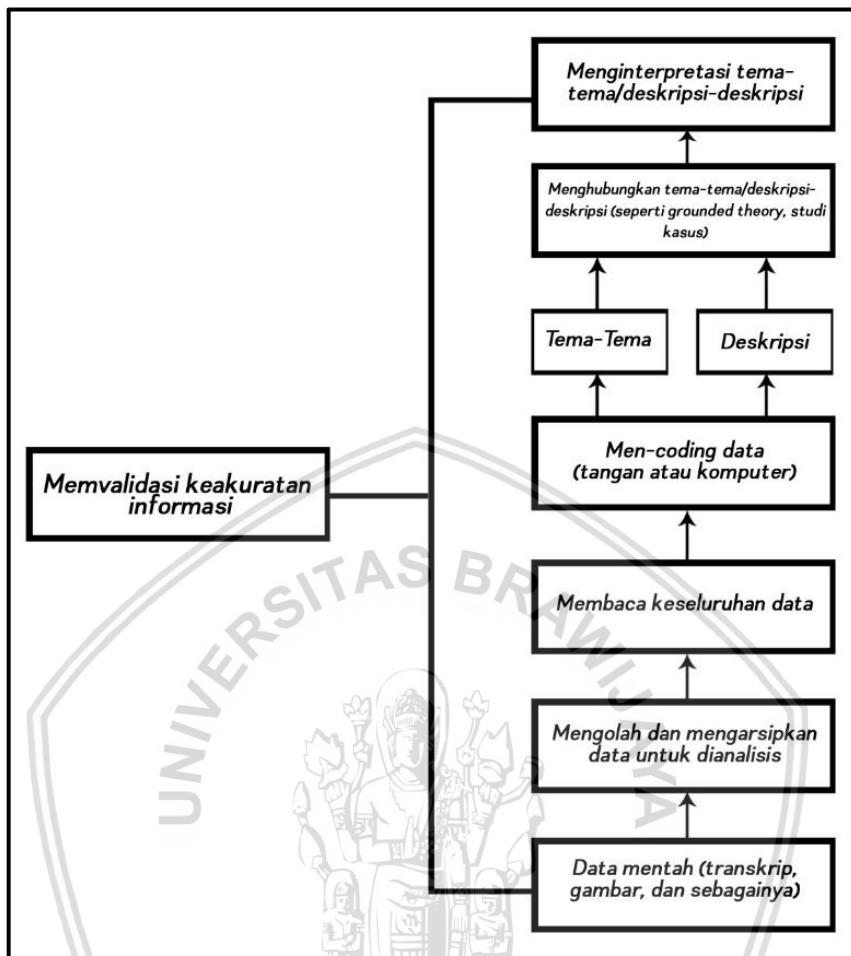
Penelitian ini disusun secara sistematis dalam mengumpulkan data. Oleh karena itu peneliti menyusun serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada informan.

3. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat atau teknologi tertentu dibutuhkan sebagai pembantu peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga mendapatkan data yang sesuai dan valid. Dalam penelitian ini perangkat yang digunakan antara lain telepon genggam dan kamera untuk mendokumentasikan data baik audio atau visual.

G. Analisis Data

Penelitian deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Creswell. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Dalam model ini, terdapat enam kegiatan analisis sehingga peneliti harus aktif untuk mendapatkan data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2
Model Analisis Data Creswell

Sumber: Creswell (2012:277)

Ilustrasi tersebut bersifat linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah keatas. Namun Cresweel menjelaskan untuk lebih interaktif setiap langkah tidak selalu harus sesuai tahapan hierarkis seperti yang disajikan. Creswell (2012: 276) menjelaskan lebih detail langkah-langkah tersebut berikut ini:

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.



Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses pengolahan materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan.

Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Dalam hal ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

H. Validitas Data

Peneliti perlu menyampaikan langkah-langkah yang ia ambil untuk memeriksa akurasi dan kredibilitas hasil penelitiannya. Validitas pada penelitian kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, Creswell (2010) merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.

Pada penelitian ini setidaknya peneliti melakukan tiga strategi validitas sebagai berikut.

1. *Triangulate* (Triangulasi)

Triangulasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

2. *Peer de-briefing* (Tanya-jawab sesama peneliti)

Proses ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan rekan peneliti yang ditujukan untuk melakukan review hasil penelitian dan laporan sehingga laporan penelitian kualitatif dapat dirasakan oleh orang lain.

3. *Bias Clarification* (Klarifikasi Bias)

Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. Hal ini dilakukan mengingat reflektivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian kualitatif.

- 1) Batas wilayah utara :Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Batas wilayah selatan : Kabupaten Malang
- 3) Batas wilayah barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- 4) Batas wilayah timur : Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang

b. Demografis

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral. Menurut publikasi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Batu pada bulan Oktober tahun 2016. Penduduk Kota Batu berjumlah 218.021 jiwa yang tersebar dalam 3 Kecamatan. Kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 100.856 jiwa, disusul oleh Kecamatan Bumiaji dengan 62.807 jiwa dan terakhir Kecamatan Junrejo dengan 54.357 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang menjadi konstituen Pilkada Kota Batu 2017 menurut hasil rekapitulasi KPUD Batu berjumlah 147.975 jiwa dengan sebaran 68.155 jiwa di Kecamatan Batu, 44.092 jiwa di Kecamatan Bumiaji, dan 35.728 jiwa di Kecamatan Junrejo.

c. Visi & Misi Kota Batu Tahun 2017-2022

Kota Batu yang telah mengikuti Pilkada Serentak 2017 memiliki Visi dan Misi sesuai dengan cita-cita Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Walikota Kota Batu yaitu Dewanti Rumpoko bersama Wakil Walikota Kota Batu yaitu Punjul Santoso telah menetapkan Visi & Misi yang tertuang dalam Naskah Visi, Misi dan Program yang dikumpulkan untuk syarat administratif kepada KPUD Batu.

VISI :

Desa Berdaya Kota Berjaya : Mewujudkan Pedesaan yang Berkarakter, Berdaya dan Berdayaguna bagi Kejayaan Kota Batu.

MISI

‘Nawabhakti’ :

Yang terdiri atas bhakti-bhakti sebagai berikut :

1) *Eka Bhakti*

Pemerintah Kota senantiasa hadir untuk melindungi seluruh warga dan menjamin hak-hak warga akan rasa aman dan nyaman tinggal di Kota Batu dengan jalan menciptakan dan menjaga stabilitas politik, kerukunan kehidupan beragama dan jati diri daerah.

2) *Dwi Bhakti*

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif-terukur, bersih, demokratis dan terpercaya untuk dapat mengoptimalkan pelayanan publik secara profesional, mudah, cepat dan berkeadilan.

3) *Tri Bhakti*

Membangun Daerah Batu dari pinggiran, dengan jalan memperkuat sendi-sendi pedesaan dalam kerangka kemajuan dan pemerataan secara bersama, agar tercipta sumber daya desa yang berkarakter lokal guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

4) *Catur Bhakti*

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan gratis-berkualitas, kesadaran hidup sehat dan bersih, serta ketahanan keluarga dan partisipasi gender.

5) *Panca Bhakti*

Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab atas pengembangan potensi kepemudaan dan perempuan, serta menjamin terciptanya kualitas hidup sehat dan layak bagi ibu dan anak.

6) *Sat Bhakti*

Melanjutkan kemajuan pariwisata dengan mengembangkan model wisata berbasis desa dan budaya serta pertanian yang berorientasi organik, dengan ditopang oleh infrastruktur yang berkualitas dan berorientasi ekonomi kerakyatan.

7) *Sapta Bhakti*

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik di Kota Batu melalui pendayagunaan sumberdaya pedesaan berbasis koperasi dan UMKM, serta mendorong masuknya investasi bagi pembangunan daerah secara merata.

8) *Astha Bhakti*

Meningkatkan produktivitas rakyat agar berdaya saing tinggi, yang berintikan peran sentral warga Kota Batu sebagai subyek usaha dalam beragam bidang.

9) *Nawa Bhakti*

Komitmen Pemerintah Kota Batu untuk merawat dan mempertahankan area pertanian dan kelestarian lingkungan, utamanya sumber air, serta keanekaragaman hayati.

d. Pemerintahan

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha. Selain itu, Kota Batu juga memiliki 5 kelurahan dan 19 desa, berarti terdapat 24 kelurahan/ desa. Kota Batu memiliki jumlah RW sebanyak 231 RW dan RT dengan jumlah 1095 RT.

e. Peta Politik Kota Batu

Kota Batu sebelum dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2017 dipimpin oleh Eddy Rumpoko-Punjul Santoso sejak 2012. Kedua pasangan tersebut adalah Kader PDIP Kota Batu yang menang dengan perolehan 46.724 suara sah dari 104.428 suara sah. Selain memiliki kuasa atas eksekutif, kader PDIP Kota Batu juga mendominasi kursi legislatif dengan memiliki kader terbanyak dalam jajaran anggota DPRD Kota Batu yaitu 5 orang. Jumlah

tersebut sudah cukup menjadikan PDIP Kota Batu sebagai partai yang mampu mengusung pasangan calon Pilkada Serentak 2017 tanpa berkoalisi karena sudah memiliki 20% kursi di DPRD seperti yang diatur dalam UU. Selain itu, setelah melakukan komunikasi dengan partai politik lain, PDIP mendapatkan dukungan dari Gerindra, PKS, dan Golkar. Pasangan Dewanti-Punjul pada akhirnya mendapatkan dukungan dari 13 kursi di DPRD Kota Batu.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Asas, Jatidiri, dan Watak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Anggaran Dasar PDI Perjuangan menyebutkan bahwa Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Berikutnya jatidiri Partai dimaknasi sebagai sifat kebangsaan, kerakyatan dan keadilan Sosial. Sedangkan dalam mengambil sikap Partai harus memiliki watak seperti gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. Mengingat PDI Perjuangan adalah partai yang sentralistik terhadap pengaruh Ketua Umum Partai maka dapat dipastikan ideologi yang dijalankan akan sama dalam setiap hierarki organisasi.

b. Struktur Organisasi DPC PDIP Kota Batu

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional. Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi.

Selanjutnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota. DPC PDIP Kota Batu melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di Kota Batu dengan Masa bakti DPC Partai adalah 5 tahun. Anggaran Dasar PDIPerjuangan menyebutkan struktur dan komposisi pengurus DPC Partai terdiri dari:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil–Wakil ketua Bidang;
- 3) Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
- 4) Bendahara dan wakil Bendahara;

Struktur Organisasi DPC PDIP Kota Batu terdiri dari 13 orang dengan hierarki sebagai berikut :

Tabel 7
Susunan Pengurus DPC PDIP Kota Batu

No	Nama	Jabatan
1	Suliadi	Ketua
2	Sasmito Hari	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai dan Organisasi
3	Djajus Dwi Admojo	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi
4	Ir. Sutiyo	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik
5	H. Admojo	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6.	Wiriadi Noto	Wakil Ketua Bidang Maritim, Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7.	Siti Farita	Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani Nelayan, Perempuan dan Anak

8.	Sampurno	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya
9.	Sri Bawon	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	H. Punjul Santoso, SH, MM	Sekretaris
11.	Asmadi, SP	Wakil Sekretaris Bidang Internal
12.	Endang Susilaning Rahayu	Bendahara
13	Lily Riwayatiningasih	Wakil Bendahara

Sumber: DPC PDIP Kota Batu, 2017

DPC Partai bukan hierarki terbawah dalam hierarki PDI Perjuangan. Namun DPC Partai juga dibantu Pengurus Anak Cabang atau setingkat Kecamatan. Lalu PAC dibantu oleh Pengurus Ranting untuk setiap Kelurahan/Desa. Pengurus Ranting juga dibantu oleh Pengurus Anak Ranting untuk setiap tingkat RW. Pelaksanaan Pemenangan Dewanti-Punjul menjadi beban DPC setelah proses rekomendasi dan instruksi Dewanti-Punjul selesai ditingkat DPP.

c. Gambaran Umum Tim Kampanye Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso

Kegiatan komunikasi politik yang ditujukan pada agenda Pemilihan Kepala Daerah memerlukan pembentukan tim kerja atau tim kampanye. Berikut ini peneliti akan memberikan bagian-bagian dalam tim kampanye Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso dalam sebuah tabel.

Tabel 8
Susunan Tim Kampanye Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso

No	Nama	Jabatan
1	Sutiyo	Ketua Tim
2	Asmadi	Sekretaris
3	Hj. Endang Susilaning Rahyu	Bendahara
4	Djayus Dwi Atmojo	Koordinator Bidang Riset, Analisa, dan Strategi
5	H. Atmojo	Koordinator Bidang Sumber Daya Dana dan Logistik
6	Sasmito Hari	Koordinator Bidang Kampanye
7	Sampurno	Koordinator Bidang Penggalangan dan Pengerahan
8	Siti Farita	Koordinator Bidang Kesekretariatan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Hasil Pemilu
9	Andi Firasandi, SH.MH	Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi
10	Lily Riwayatningsih	Koordinator Kecamatan
11	Wiriadi Noto	Koordinator Humas

Sumber: DPC PDIP Kota Batu: 2016

Berikut peneliti jabarkan tugas yang dibebankan kepada masing-masing tim :

1. Ketua Tim Pemenangan : Penanggung Jawab seluruh kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemenangan Dewanti-Punjul.
2. Sekretaris : Pengelola kebutuhan administrasi Tim Pemenangan.
3. Bendahara : Pengelola pengeluaran dan pemasukan Tim Pemenangan.

4. Bidang Riset, Analisa, dan Strategi : Bidang yang menganalisa basis massa pendukung dan menentukan prioritas pergerakan anggota pemenangan.
5. Bidang Sumber Daya Dana dan Logistik : Bidang yang mencari sokongan dana untuk agenda pemenangan serta bertanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi alat peraga kampanye.
6. Bidang Kampanye : Bidang yang menyusun seluruh agenda dan bentuk kampanye yang akan dilaksanakan.
7. Bidang Penggalangan dan Pengerahan : Bidang yang bekerjasama dengan Bidang Riset, Analisa, dan Strategi dalam menggerakkan basis massa untuk mencari suara serta menggerakkan pemilih menuju TPS. Bidang ini juga mengakomodir kebutuhan Tim khusus yang dibentuk untuk menggerakkan pemilih dengan nama Regu Penggerak Pemilih (GURALIH).
8. Bidang Kesekretariatan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Hasil Pemilu : Bidang yang bekerjasama dengan Sekretaris dan bertanggung jawab pada tabulasi hasil Pemilu dan pembekalan saksi bersama BPSN.
9. Bidang Hukum dan Advokasi : Bidang yang bertanggung jawab untuk mempelajari tata aturan yang berlaku serta advokat apabila terjadi perselisihan dengan lembaga atau perseorangan lain.
10. Bidang Kecamatan : Penanggung Jawab komunikasi internal tim pemenangan atas seluruh kegiatan kampanye yang berada pada tingkat

Kecamatan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dari Desa/Kelurahan.

11. Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) : Bidang yang bertanggung jawab atas komunikasi eksternal kepada lembaga lain dan juga masyarakat.

B. Penyajian Data

1. Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemilihan secara langsung artinya, masyarakat sendirilah yang memilih kepala daerahnya secara langsung dengan cara datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS, mencoblos atau mencontreng calon pilihannya, lalu mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bukti dirinya telah memberikan hak suara yang akan menentukan daerahnya lima tahun ke depan. Sejak Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah dilakukan serentak untuk meningkatkan partisipasi serta penghematan biaya penyelenggaraan. Pada Tahun 2017, Kota Batu menjadi salah satu Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tentu meningkatkan persaingan menjadi lebih ketat, salah satu penyebabnya adalah calon Kepala Daerah harus menggunakan strategi tertentu untuk mengalahkan calon lainnya. Sebelum metode pemilihan langsung, calon kepala daerah hanya perlu membangun komunikasi ditingkat elit politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

namun setelah pemilihan langsung digelar para calon Kepala Daerah memerlukan komunikasi politik yang lebih luas terhadap masyarakat. Komunikasi politik ditujukan meraih simpati dan suara masyarakat melalui kampanye politik dan kampanye pemilihan.

Kampanye merupakan salah satu strategi calon kepala daerah yang paling mudah untuk ditemukan. Kampanye biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan tujuan agar lebih banyak masyarakat yang hadir dan berpartisipasi. Kampanye sendiri merupakan strategi untuk memasarkan calon ataupun partai.

Strategi komunikasi politik merupakan hal penting bagi calon dan partai pendukung guna menentukan pendekatan tertentu dalam memenangkan kontestasi politik yang akan diselenggarakan. Strategi politik sendiri sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni strategi ofensif (menyerang) atau memperluas pasar, strategi defensif (bertahan) atau mengamankan pasar, serta strategi campuran yang mengkombinasikan metode menyerang dan bertahan. Kampanye, yang disebutkan di atas, dapat dikategorikan menjadi strategi ofensif, namun dapat juga menjadi defensif. Penelitian ini memiliki fokus pada strategi bertahan dengan kategori strategi mempertahankan pasar mengingat objek penelitian merupakan partai politik petahana dan juga calon yang dimajukan memiliki kaitan dengan petahana.

a. Strategi Mempertahankan Pasar PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017

Strategi mempertahankan pasar merupakan salah satu bentuk strategi dalam Strategi Bertahan. Strategi mempertahankan pasar dilaksanakan jauh sebelum masa kampanye pemilihan dilaksanakan. Kegiatan tersebut didasari untuk membentuk citra politik yang diinginkan dan didasari melalui prinsip-prinsip kampanye politik.

Pasangan Calon yang diusung oleh PDIP Kota Batu memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda karena keduanya memiliki kedekatan status dan kegiatan dengan Pemerintahan Kota Batu yang berjalan saat itu. Dewanti Rumpoko sebagai Calon Walikota Kota Batu 2017 memiliki hubungan suami-istri dengan Walikota Kota Batu 2007-2017 yaitu Eddy Rumpoko. Selain sebagai Istri Walikota, Dewanti Rumpoko juga secara otomatis menjadi Ketua PKK Kota Batu yang membuatnya lebih dekat dan populer di kalangan masyarakat Kota Batu daripada calon lain. Selain itu, Punjul Santoso merupakan Wakil Walikota Kota Batu pada masa Pemerintahan berjalan yang membantu Eddy Rumpoko semenjak tahun 2012.

Memelihara pemilih untuk tetap konsisten memilih calon yang diusung partai adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan strategi mempertahankan pasar. Memelihara pemilih tetap akan memberikan stimulus dan pengaruh kepada pemilih musiman dan pemilih

tradisional. Dwi Yuniar Sanima selaku Pengurus Sekretarit dan Sekretaris BPSN PDIP Kota Batu menyampaikan.

“Konsep awalnya adalah semua turun ke masyarakat dan menyapa masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan hingga masyarakat perkotaan, kita mendatangi seluruh desa di kota batu yang berjumlah 24 desa” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Selain itu, Ir. Sutiyo ditemui di waktu lain mengaskan bahwa mesin partai harus disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Beliau menyampaikan,

“Jadi strategi dan *planning*-nya ya. Jadi gini pak punjul dan dewanti diusung satu partai. Itu langkah awal yang harus difungsikan adalah mesin partai mulai dari DPC, kecamatan ada PAC, lalu ranting, anak ranting hingga rw harus digerakkan ke masyarakat. Trus yang lain yang ada relawan dan aktivis tertentu yang dioptimaliasikan. Nah sebetulnya kemarin dalam perhitungan kemarin pdip jugakan pemenang legislatif pada 2014 jadi PDIP tidak terlalu sulit untuk mengejar itu. Tapi kalau hanya mengandalkan suara partai kita kurang dan makanya harus ditambah lagi.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PDIP memfokuskan kegiatan internal yang ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat saat masa kampanye politik dan kampanye pemilihan untuk menjaga dan menambah potensi suara partai.

Kesungguhan PDIP Kota Batu dalam mempersiapkan organisasi menuju Pilkada Kota Batu 2017 dengan melakukan rotasi kepengurusan Struktur DPC PDIP Kota Batu. Dwi Yuniar Saniman menyampaikan,

“DPC dilantik tahun 2015 di Surabaya, tapi sebelum masa penetapan calon Ketua Bappilu-nya itu Pak Sasmito tapi karena ada pertimbangan tertentu Pak Tiyo yang awalnya ada di Bidang Hukum dan Advokasi dijadikan Ketua Bappilu dan Pak Sasmito dipindak jadi Dewan Kehormatan Partai” (Wawancara dilakukan 27 Maret 2018, pukul 12.39 WIB)

Rotasi tersebut dikonfirmasi oleh Ir. Sutiyo selaku Ketua Tim Pemenangan bahwa penunjukan dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan oleh suatu hal, beliau menyampaikan,

“Agak melenceng ini juga merupakan strategi dari DPP, kemarin saya kan ikut mencalonkan diri cuma saya tidak dapat rekom, intinya gitu. Saya selaku Ketua Bappilu waktu itu saya ditarik dari kehormatan partai, terus terang kader 100% saat itu suara mengarah ke saya cuma itu mungkin keputusan partai maka saya diangkat jadi ketua tim pemenang Dewanti-Punjul. Nah dikhawatirkan seperti di kabupaten ada pak *genk* ingin mencalonkan tapi karena tidak mendapat rekom malah loncat dukungan.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Selain untuk menjaga stabilitas kader yang tidak mendapat instruksi partai agar tidak pindah dukungan beliau juga menyampaikan pada kesempatan yang sama bahwa,

“Bisa dua-duanya itu ranah DPC dan DPP menilai saya, maka langkah awal saya adalah mengalihkan suara saya kepada paslon bahwa saya tidak dapat *rekom* dan masih segaris dengan instruksi partai dan walaupun saya tidak mencalonkan alihkan dukunganmu pada Dewanti-Punjul.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Ir. Sutiyo juga mengakui bahwa pada akhirnya penunjukan dirinya sebagai bentuk menjaga keutuhan partai sehingga basis massa yang didapat sebelumnya juga dapat dipertahankan menuju Pilkada Kota Batu 2017. Mengenai komunikasi kepada aktor politik lain. Dwi Yuniar Saniman mengatakan bahwa PDIP selaku pengusung pasangan calon juga menjaga komunikasi dengan partai lain sehingga mendapatkan dari tiga partai politik lain. Beliau mengatakan,

“Sebelum kita juga mendapatkan partai pendukung. Gerindra, PKS, Golkar adalah partai pendukung kita. Namun karna pdip mendapatkan 5 kursi di Dewan dan satu-satunya partai yang dapat mengusung calon. Maka dari itu saat ke KPU walaupun tanpa koalisi kita juga dapat

mendaftar. Karena adanya partai pendukung maka tim dari masing-masing tetap berjalan. Sebenarnya adalah pendekatan itu. Gerindra juga kita dekati, sebenarnya tim DPP Partai Gerindra juga melakukan survey. Setelah melakukan survey, Bu Dewanti juga sempat keluar dalam survey Partai Gerindra sebagai nomor satu akhirnya rekom turun atas nama Bu Dewanti dan Pak Punjul. Karena keduanya bukan kader Gerindra maka tentu yang mendaftarkan adalah PDIP.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Pada kesempatan lainnya, Ir. Sutiyo mengatakan ada faktor lain selain adanya hasil survey kepada Dewanti-Punjul yang begitu kuat. Beliau menyampaikan,

“Itu pendukung ya kalau pengusung tetep PDIP. Itukan simpatisan dan juga ya maaf-maaf mungkin kalau dia partai sendiri tidak punya *jago* atau tidak cukupnya suara dan juga suara kursinya atau perolehan makanya mendukung kita” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Selain faktor survey dan calon dari partai lain. Ada pula faktor kedekatan secara kepartaian dan calon itu sendiri. Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu menjelaskan,

“Pertama harus adanya komunikasi tingkat Ketua Umum partai, kedua calonnya ga kaku-kaku untuk meraih hati partai lain. Contohnya Golkar kemarin ramai mau mencalonkan *eh* ujungnya juga merapat ke PDIP. Semua-semua itu bertahan sampai saat ini, kenapa kita juga bertahan itu karena ada masa pemilih tetap yang kuat dan ideologi yang jelas” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Komunikasi kepada multiaktor dari PDIP Kota Batu dapat dikatakan berjalan dengan baik karena terbukti mendapat dukungan dari partai politik lain yang mendukung tanpa mengajukan kadernya menjadi calon Wakil Walikota untuk Dewanti Rumpoko. Hasil dukungan tersebut Dewanti-Punjul menunjukkan bahwa Dewanti-Punjul didukung oleh 13 Kursi DPRD

Kota Batu atau setara dengan 50%+1 anggota Dewan yang ada di DPRD Kota Batu.

Ir. Sutiyo juga menjelaskan pentingnya memasarkan keberhasilan Pemerintah Eddy Rumpoko yang juga berasal dari PDIP untuk menunjang popularitas Dewanti- Punjul. Pemasaran tersebut melibatkan banyak pihak termasuk yang berkaitan dengan Pemerintahan berjalan. Beliau mengatakan,

“Karena dewanti juga *incumbnet* dan istri *incumbent* dan juga kita gerakan pada jalur-jalur yang memungkinkan ada komunikasinya. Saya tidak sebut pegawai negeri digerakkan karena itu salah dalam UU dan Peraturan KPU tapi strategi itu bahasanya seluruh elemen yang berkaitan dengan PDIP, Pemerintah, dan *incumbent* harus kita gerakan.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Selain menggerakkan seluruh elemen yang berkaitan dengan pemerintahan, pemasaran ini melibatkan media dalam mengangkat data-data keberhasilan Kota Batu dibawah kepemimpinan Eddy Rumpoko. Ir. Sutiyo menambahkan,

“Sebetulnya gini infokom atau tv, batu tv atau ATV itu sebagai media untuk men-*showing* keberhasilan dan program yang selama ini telah dilakukan dan bagaimana keberhasilan tersebut. Saya pikir investasi yang lain lebih untuk meng-*catch up* apabila aada ketinggalan atau untuk mengakomodir untuk satu suara lebih kepada apk(Alat Peraga Kampanye) itu wajar tapi yang lain hanya media-media ini yang kita gunakan. Seperti media sosial kita gunakan tapi tidak telalu mengingat sekarang banyak peraturan makanya kita sangat hati-hati untuk mengupload” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Selain itu, Suliadi juga menegaskan bahwa program dan keberhasilan itu disosialisasikan oleh semua saluran politik yang dimiliki partai. Suliadi menjelaskan,

“Ya sebagian media kaya pengurus partai yang dijual ya program2 itu dan hasil2nya ke pada masyarkat dan perlu diingat itu dari siapa. Kalau untuk birokrasi secara otomotif isinya pemberitaan saja mas, kalau untuk menggerakkan ASN itu tidak bisa mengikuti politik dan hubungannya sama politik praktis sebatas komunikasi umum, bisa kena peraturan mas kalau kita ada instruksi langusng hahaha.” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, pukul 11.23 WIB)

Peneliti melakukan pencarian terhadap hasil pemasaran melalui media dan jalur komunikasi resmi yang dijalankan oleh Dewanti Rumpoko. Pertama, Dewanti Rumpoko hadir dalam pembukaan pameran batik dan lukisan yang diselenggarakan dalam Hari Batik Nasioanal di Batu melalui metia Batutimes.com.



Gambar 4

Dewanti Rumpoko membuka Pameran Batik di Kota Batu

Sumber : Batutimes.om

Selain melalui media massa. Melalui *Blusukan* atau kegiatan turun ke masyarakat dilakukan dengan membawa keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata dan perekonomian. Ir. Sutiyo menjelaskan,

“Bagaimana simpatisan dan masyarakat kita gerakan ya harus *showing*, kita tunjukan bahwa apa saja yang telah berhasil. Katakanlah Kota Wisata, dimana Bapak Eddy Rumpoko direncanakan untuk Kota Wisata. Kenapa wisata karena temperatur, alam, usaha, dan iklim inikan Batu-kan cocok dan tidak dimiliki daerah lain., inikan unik jadi bagaimana kita

mem-*promote* dan me-*maintain* Kota Batu ini bagaimana jadi Kota Wisata”(Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa *city branding* Kota Batu mengenai pariwisata menjadi komoditas utama yang diangkat ke publik oleh PDIP Kota Batu. Hal itu memudahkan calon dari PDIP mudah diterima masyarakat mengingat banyaknya hasil pembangunan di Kota Batu bersumber dari nilai-nilai pariwisata yang tidak dimiliki daerah lain dan dapat dirasakan oleh warga Kota Batu.

Muatan yang dibawa oleh anggota dan simpatisan tersebut tentunya melalui pemantauan dari DPC. Secara sepintas Ir. Sutiyo mengatakan adanya pemantauan terhadap kinerja internal partai. Beliau mengatakan,

“Jadi jelas ada *punishment* ada *reward* jelas ada tapi *reward* tidak langsung hadiah.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu menegaskan bahwa perjuangan untuk partai tidak boleh sembarangan. Partai memberikan pernyataan yang tegas dan keras terhadap seluruh jajaran untuk mau bekerja apabila tidak ingin mendapatkan hukuman. Suliadi mengatakan,

“PDIP kan terkenal kejam walaupun sukanya rame2 saat masa bakal calon tapi setelah nama calon ada ya semua harus kompak gerak jadi bisa fokus solanya kalau gamau kompak dan gabisa fokus kita pecat mas kalo di Dewan langsung bisa PAW apalagi kalo calonnya gabisa menang. hahaha. Soalnya berat gak kaya 10 tahun lalu. Terlebih apalagi kalo kena kasus tertentu misal OTT besok langsung pecat hahaha.” Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Hal tersebut dimaksudkan untuk memotivasi seluruh kegiatan lapangan yang langsung dilaksanakan oleh semua lini sampai ditingkat *grassroot* atau lini tingkat bawah.

Strategi mempertahankan berjalan selama partai yang menguasai pemerintah ingin melanjutkan kembali kepemimpinan di pemerintah. Strategi mempertahankan pasar meliputi langkah kampanye politik dan kampanye pemilihan. Kampanye politik memiliki perbedaan dengan kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan adalah aktivitas politik yang ditujukan untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sementara kampanye politik bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus-menerus untuk membangun *image* atau citra politik (Firmanzah, 2008: 276). PDIP Kota Batu sesungguhnya tidak menyiapkan begitu dalam mengenai konsep kampanye politik dalam membentuk citra yang terporos bagi salah satu kadernya. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Itu tidak disiapkan, ya walaupun Bu Dewanti sering hadir itu adalah secara implisit, tetapi partai dan kader tidak mesti instruksi maju tapi melihat jiwa kader dan nasionalisnya. Setelah calon ditetapkan ada sekolah kader yang khusus kepala daerah gitu dan di dalam sekolah kader diberikan muatan dari DPP terkait dengan persiapan kalau memang menang dan juga disusupkan beberapa strategi seperti apa dia harus apa saat berkostum dan berbuat apa.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Hal itu ditandai dengan adanya pergantian Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu & Komunikasi Politik yang otomatis menjadi Ketua Tim Pemenangan apabila menghadapi Pilkada termasuk Pilkada Kota Batu 2017. Pergantian Sasmito menjadi Ir. Sutiyo dilandasi sebagai strategi menjaga stabilitas internal serta mempertahankan basis massa yang dimiliki Ir. Sutiyo yang juga sempat mendaftarkan diri untuk menjadi calon Kepala Daerah Kota Batu pada tahun 2017. Selain itu, Ir. Sutiyo berpendapat,

“Itukan *goal*-nya tapi kan tidak semua masyarakat mau dan juga ada *paslon* (pasangan calon) dan ini yang kita harus monitor (pantau) perkembangannya maka kita lakukan untuk mengukur kekuatan kita sampai. Selain melihat hasil survey ada juga orang khusus yang melihat *sample-sample*” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ir. Sutiyo bahwa tujuan kemenangan dapat dicapai apabila sudah terbangun pemikiran politik yang baik dari masyarakat terhadap PDIP Kota Batu. Namun, dalam menjalani kepengurusan partai tingkat cabang. Ir. Sutiyo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai tetap menyebutkan bahwa kader tetap turun bermasyarakat dari awal dengan mengatakan,

“Saat turun tentunya itu dibangun (ideologi), itulah fundamental, karakter nasionalis harus dibangun. Ini adalah saat saat kita kaderisasi saat saat kita raker (rapat kerja). Inikan harus kita jaga harus partai berideologi nasionalis. Ini harus masuk kedalam masyarakat. Ini tidak hanya dalam rangka pemilu atau pilkada” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Selama Dewanti Rumpoko menjadi PKK Kota Batu, beliau memiliki relawan pribadi yang terus membantu dirinya dalam menjaga kualitas kepemimpinannya. Melalui program bantuan kesehatan Dewanti Rumpoko dapat dikatakan menyasar segmentasi pemilih tingkat bahwa yang sebagian besar membutuhkan pertolongan kesehatan. Agenda tersebut dijalankan untuk memunculkan pandangan bahwa Dewanti Rumpoko akan selalu hadir dalam kebutuhan dan kehidupan masyarakat Kota Batu. Selain Dewanti Rumpoko, calon-calon dari internal PDIP Kota Batu sesungguhnya sudah mengantongi suara partai yang dibangkitkan kembali oleh anggota, kader, dan simpatisan partai. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Jadi gini semenjak kader dicalonkan ini semua harus sudah kerja. Kalau kampanye resmi yang ditunjuk KPU-kan ini setelah penetapan calon sampai h-3 pemilihan tapi kita harus kasih pondasi bahwa metode *blusukan* harus sudah dilakukan.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Hal tersebut harus dilakukan mengingat tujuan kemenangan dapat dicapai dengan adanya komunikasi yang intensif antara partai dan masyarakat Kota Batu. Membentuk pondasi ideologi partai juga disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan citra politik dari pasangan calon dan identitas partai. Seperti yang di jelaskan dalam sub-bab sebelumnya. PDIP Kota Batu beserta pasangan calon sebelum dan setelah ditetapkan memantapkan media massa untuk membentuk reputasi dan menonjolkan keberhasilan kader PDIP khususnya prestasi Eddy Rumpoko melalui televisi khususnya melalui stasiun televisi ATV dan Batu TV.

b. Kampanye Pemilihan PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017

Kampanye pemilihan adalah bagian kecil dari kampanye politik. Meskipun tidak dalam masa pemilihan umum, setiap ucapan dan tindakan dapat dikategorikan sebagai kampanye politik. Kampanye pemilihan dan kampanye politik bersifat saling melengkapi. Firmanzah (2008) mengatakan kampanye pemilihan akan menyegarkan kembali *image* politik yang dibangun melalui kampanye politik. Mengingat kampanye politik yang bersifat jangka panjang memerlukan penegasan dan penguatan ulang melalui kampanye pemilihan untuk memobilisasi massa.

Pada Pilkada Kot Batu 2017, Tim Pemenangan Dewanti-Rumpoko hanya mengatur jadwal secara detail dan bentuk kampanye menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh KPUD Batu, Ir. Sutiyo menuturkan,

“Itu dari KPU sehingga tidak adanya benturan atau bersamaan intinya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Mengenai jadwal kampanye yang diatur KPUD Batu, Ir. Sutiyo menanggapi bahwa hal tersebut hanya garis besar dalam pengumpulan massa dan tidak masalah untuk kepentingan menghindari konflik yang tidak diinginkan. Ir. Sutiyo juga menjelaskan,

“Kalau konser atau hiburan dan pengumpulan massa biar adanya orasi dan pemaparan program itu adalah sistem dan itu boleh dibilang gaya yang sudah lama dilakukan tapi kalau dulukan mengumpulkan masyarakat ada hiburan bisa cari orator. Bahkan sekarang orasi-orasi sekarang kecil intensitasnya dan lebih dominan ke *blusukan*. Selain konten kampanye yang ada lewat apk semua konten dapat dipindahkan ke dalam metode *blusukan*”. (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Secara implisit Ir. Sutiyo menganggap pengumpulan massa tidak terlalu penting untuk saat ini. Beliau menganggap lebih penting untuk mengerahkan pendukung untuk *blusukan* dengan baik dan terstruktur. Hal itu dilakukan dengan adanya bantuan Bidang Riset, Analisa dan Strategi dalam pemenangan. Bidang tersebut akan membantu Bidang Penggalangan dan Pengerahan untuk mengejar dan meraih massa pendukung dari daerah-daerah yang masih mekurangan kantong-kantong suara pemilih.

Bagi Dwi Yuniar Saniman, alasan pemilihan *blusukan* dikarenakan peraturan KPUD Kota Batu yang begitu ketat dalam masa kampanye. Beliau mengatakan bahwa,

“Jadi kemarin media massa kita pakai karena itu tidak diperbolehkan jadi oleh KPU dan sudah ditentukan setiap orang jumlahnya sekian dan tayang pada waktu sekian dan di televisi begitu pula. Untuk sosial media kita boleh, tapi dengan cara mendaftarkan akun pemenang untuk dipantau aktivitasnya dan ketika masa kampanye selesai maka semua kegiatan harus dihapus” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan penyikapan kondisi yang berbeda saat kampanye politik dan kampanye pemilihan. PDIP Kota Batu dapat dikatakan lebih sering memanfaatkan media massa disaat masa kampanye politik untuk membangun reputasi keberhasilan pasangan calon. Hal itu dapat dikatakan efektif karena dengan komunikasi *blusukan* partai dapat mengetahui secara terus menerus mengenai perkembangan pencalonan dan partai. Interaksi yang dibangun juga dapat dikatakan sebagai upaya mencari pemahaman serta solusi yang dapat dihadapi oleh masyarakat. Memasyarakatkan ideologi partai melalui komunikasi tingkat bawah yang dilaksanakan seluruh elemen partai dinilai sangat efektif. Ir. Sutiyo menambahkan,

“Jadi kampanye itu yang sebetulnya efektif seperti pak Jokowi (Joko Widodo) *blusukan* itu efektif dan masyarakat langsung ngenal calon dan masyarakat bisa nilai calon ini mau turun engga atau *care* engga.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB).

Kegiatan turun lapangan atau *blusukan* oleh seluruh elemen juga merupakan kegiatan tim pemenang untuk mengetahui fenomena di dalam masyarakat. Saat turun ke masyarakat elemen partai juga ditujukan untuk memantau popularitas partai dan calon. Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Kita menginstruksikan semua ranting, PAC Kecamatan. Jumlahnya sekitar 5 orang untuk memenangkan setiap tps terdiri dari 2 orang saksi dan 3 orang GURALIH (Regu Penggerak Pemilih) untuk ke rumah-

rumah warga melakukan survey kecil-kecilan.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Fakta tersebut menyatakan bahwa tim dan seluruh elemen bekerja dengan efektif selain *blusukan* untuk membangun reputasi partai dan calon. Seluruh elemen juga digerakan untuk mengetahui kondisi masyarakat mana yang harus dimenangkan. Dwi Yuniar Saniman menambahkan,

“Karakter kepemimpinannya DPC, DPD, DPP itu mendukung. Karakternya adalah rakyat jadi pada waktu itu semua DPC berada di Batu untuk membantu bu dewanti dan tim pemenang. Karena filosofisnya adalah partainya *wong cilik* walaupun zaman telah berubah.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Dukungan tersebut dilakukan untuk menunjukkan *positioning* politik dari partai. PDIP ingin menunjukkan bahwa berlakunya zaman tidak akan mengubah slogan partai dimana partai akan terus dekat dengan masyarakat kecil sehingga mampu mengakomodir aspirasi masyarakat mulai dari pinggiran desa hingga ke pusat kota.

Terkhusus pada Dewanti Rumpoko dalam pembangunan citra, tidak dipungkiri jabatan terikat yang dipegang selama suaminya Eddy Rumpoko menjadi Walikota Kota Batu. Dwi Yuniar Saniman menyebutkan bahwa,

“Tidak bisa dipungkiri walaupun kita tidak berjalan pasti warga juga tau Bu Dewanti karena kiprah beliau adalah ketuaa PKK Kota Batu. Tanpa kita turun ke lapangan pun warga sudah tau. Jadi selama beliau menjadi Ketua PKK ada yang namanya Sahabat Dewanti. Tim itu yang membawa orang-orang sakit yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Baptis Batu itu dibawah naungan PKK”. (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Walaupun dalam proses kampanye politik gerakan *grassroot* pendukung dianggap lebih penting. Ir. Sutiyo menilai bahwa selain mempertahankan basis massa yang ada juga harus ditambah,

“Namun strategi kemarin tidak *defensive only* tetapi tetap memiliki agresif dimana sayap, aktivis, *underbouw* tetap terus mencari tambahan suara partai” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu menambahkan,

“Selain kampanye terbuka, semua itu dimulai dari tataran terbawah. Di tingkat ranting dan anak ranting itu ada GURALIH satu TPS 3 orang diluar pengurus dan juga adalagi ada saksi 2 orang. Jadi minimal ada 5 orang satu TPS diluar pengurus. Saya selaku ketua tim internal partai ngeramut 19 desa 5 kelurahan dengan total TPS 420an TPS itu total 2000 orang. Kalo di total semuanya penggerak sampai relawan bisa sekitar 3000an karena seluruh pengurus 700an orang.” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Menurut dua pimpimnan PDIP Kota Batu tersebut dapat disimpulkan bahwa mesin partai yang didistribusikan ke dalam setiap daerah harus mampu membawa suara yang besar. Hal itu didukung dengan adanya pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan administrasi KPU terhadap saksi. Suliadi menjelaskan,

“Guralih udah pelatihan 4 kali, saksinya juga 4 kali melalui BPSN DPC Partai. Seluruh berkas harus dipahami fungsinya sehingga DPC tuh bisa tau hasil *quick count* kemenangan walaupun perhitungan baru selesai. Itu lewat sms sama *whatsapp*.” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Saat ditanyakan mengenai cara kerja Guralih, Suliadi menambahkan bahwa adanya gerakan *door to door* yang disokong oleh pengurus partai se-Jawa Timur. Suliadi mengatakan,

“Karena kemarin Dewanti-Rumpoko itukan satu-satunya di Jawa Timur. Akhirnya seluruh anggota Dewan itu digerakkan kembali ada 1 anggota memegang 5-6 TPS. Kalau dari daerah lain memantau TPS, memantau GURALIH, dan anggota dewan itu yang *door to door* itu untuk menyentuh masyarakat, Detua DPRD itu 5-6 anggota 2-3 tps ada 2 anggota dan diduduki bareng mas masyakatnya jadi sudah wes di keroyok TPS itu anggota DPRD itu banyak mas dari mana saja di Jawa Timur bahkan anggota dewan itu ada yang tidur di rumah warga yang dekat TPS sehingga kita bisa menjaga dan mengawasi tim calon. Jadi

selangkah di depan lah mas.” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Selain itu, pengerahan melalui instrumen pendukung di luar DPC yang memiliki kaitan dengan partai juga disebutkan oleh Dwi Yuniar Saniman melalui beberapa organisasi dengan segmentasi tertentu,

“PDIP memiliki BMI (Banteng Muda Indonesia, Pemuda Demokrasi & Taruna Merah Putih sebagai organisasi sayap pergerakan di segmentasi pemuda&pemudi. Selain itu ada BAMUSI atau Badan Muslimin Indonesia sebagai sayap penggerak kaum muslimin. (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Walaupun bentuk komunikasi tidak banyak berubah dari masa kampanye politik dan kampanye pemilihan. PDIP Kota Batu juga melakukan bentuk kampanye yang umum dan lumrah dalam memasarkan calonnya. Kampanye melalui alat peraga kampanye juga dilaksanakan untuk menegaskan calon yang mereka usung dan partai politik yang mendukung sehingga massa dari partai pendukung juga dapat mengerti arah politik mana yang didukung. Alat peraga kampanye yang dibuat berupa baliho, poster, brosur, pamflet, dan spanduk hingga mobil dengan stiker pasangan calon yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah batu serta mendukung mobilitas dari tim pemenangan Dewanti-Punjul.



Gambar 5
Poster Kampanye Pemilihan Dewanti-Punjul

Sumber : Tim Pemenangan Dewanti-Punjul

Selain Alat peraga kampanye resmi, Dewanti-Punjul juga memanfaatkan dan mengerahkan relawan dan simpatisan, Ir. Sutiyo menjelaskan dibuatnya perbedaan target antara DPC atau Tim Pemenangan dengan relawan sehingga lebih optimal, Ir. Sutiyo mengatakan,

“Sebetulnya relawan ada yang *direct to* atau juga ada yang tercatat di kpu. Kalau relawan mungkin hanya masuk listnya saja agar ini tidak bersinggungan satu sama lain maka adanya perbedaan lahan penggarapan antara partai dan relawan. Sebenarnya mereka memiliki ranah sendiri.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Terkait pembagian tugas dengan relawan. Suliadi menambahkan,

“Komunitas kalau sayap dan karang taruna dan lain lain kan terdaftar jadi kita panggil dan dikordinasikan disini. Kalau relawan di Sahabat Dewanti itu urusan calon jadi ada perbedaan juga anggota parpol di relawan. Itu bentuk politik etis. Kita hanya memantau tanpa perlu berkomentar banyak karena relawan juga punya keleluasaan toh mas dalam bergerak jadi kita tidak boleh masukan apa apa. Toh ketemunya diatas biar taktis dalam tujuan nantinya” (Wawancara dilakukan 3 Mei 2018, 11.23 WIB)

Pembedaan ranah tersebut dimaksudkan oleh Ir. Sutiyo dan Suliadi pada penjelasan berikutnya dimana selain mempertahankan suara yang sudah

kuat. Relawan diharapkan mampu bekerja untuk menggerus basis massa lawan dan mendapatkan dukungan-dukungan baru yang sebelumnya belum termasuk basis kekuatan Dewanti-Punjul. Relawan dari Dewanti-Rumpoko yang tercatat resmi di DPC adalah Sahabat Dewanti. Relawan Sahabat Dewanti pertama kali digaungkan pada tanggal 23 Oktober 2016 tepat 5 hari sebelum masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016. Persiapan ini dinilai bersifat secara umum untuk mengumpulkan masa yang akan digalang untuk memenangkan Dewanti-Rumpoko.

Mengingat relawan memiliki ranah pembeda dengan tim resmi dari DPC PDIP Kota Batu. Relawan terlihat lebih fokus pada publikasi kegiatan Dewanti selama kampanye untuk mengemas figur Dewanti Rumpoko ketimbang calon Wakil Walikota yaitu Punjul Santoto. Walaupun kegiatan “Kopi Darat 1” dari relawan Sahabat Dewanti resmi dilaksanakan pada 23 Oktober 2016. Nyatanya sosial media *facebook* sudah bergerak sebelum masa kampanye resmi dibuka oleh KPUD Batu. Sosial media tersebut mempublikasikan kegiatan-kegiatan resmi Dewanti Rumpoko yang dekat dengan seluruh elemen di Kota Batu menjelang masa kampanye di mulai. Dilihat dari konten publikasi yang diunggah ke dalam sosial media, “Sahabat Dewanti” terlihat ingin membangkitkan ingatan masyarakat mengenai Dewanti Rumpoko yang dekat dengan masyarakat.

Setelah memasuki masa kampanye yang dimulai pada pada 23 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Tidak begitu banyak publikasi mengenai kampanye ataupun kegiatan-kegiatan Dewanti Rumpoko ataupun Punjul

Santoso yang aktif berkampanye. Namun, relawan “Sahabat Dewanti” mengunggah konten-konten yang berkaitan dengan sosialisasi dan menarik partisipasi masyarakat salah satunya dorongan untuk melakukan kampanye bersih.



Gambar 6
Undangan Pertemuan Pertama Relawan “Sahabat Dewanti”
 Sumber : Facebook Relawan “Sahabat Dewanti”

Berikutnya, dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat. Relawan Dewanti juga membuat konsolidasi penerus kegiatan “Kopi Darat 1”. Kegiatan dengan nama “Nyambung Dhulur” tersebut dilakukan untuk mengumpulkan massa di Kecamatan Bumiaji. Selain itu, relawan juga menggalang simpatisan baru untuk bergerak bersama. “Nyambung Dhulur” diisi dengan kegiatan-kegiatan hiburan rakyat. Hiburan yang diadakan berupa Orkes Dangdut, Kesenian Reog Teatrika, Lomba *Joged*, bazar, dan lainnya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktif dalam Pilkada Batu 2017 tidak hanya dalam mengikuti kegiatan kampanye Pilkada. Bagi relawan memberikan positiong politik dalam diri masyarat juga merupakan

hal yang penting. *Positioning* ini menunjukkan rasa kepemilikan dan dukungan kepada pasangan calon yang akan dipilih. Mengikuti tren politik tahun 2014, “Sahabat Dewanti” menyebarkan sebuah gambar-bingkai atau yang biasa disebut *twibbon* karena mulai populer pada sosial media *Twitter* yang berisi kalimat kampanye Pilkada untuk digunakan masyarakat dalam profil foto di sosial media seperti facebook, whatsapp, twitter, dan lainnya.



Gambar 7
***Twibbon* Dukungan untuk Dewanti-Punjul**

Sumber : Facebook Relawan “Sahabat Dewanti”

Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat menunjukkan keberpihakan melalui sebuah *Twibbon*. “Sahabat Dewanti” juga mengadakan perlombaan pembuatan video testimoni. Perlombaan ini ditujukan sebagai salah satu media kampanye elektronik oleh relawan dan masyarakat. Mengingat pada saat ini media sosial sangat berpengaruh dalam menyakinkan masyarakat mengenai besarnya dukungan yang diterima oleh pasangan calon.



Gambar 8

Perlombaan Dukungan Kreatif kepada Dewanti-Punjul

Sumber : Facebook Relawan “Sahabat Dewanti”

“Sahabat Dewanti” juga tidak melupakan *positioning* politik mereka dimana mereka harus menekankan bahwa relawan merupakan komunitas yang tidak diorganisir oleh pihak partai politik namun memiliki ikatan atau tujuan untuk memenangkan kandidat politik. “Sahabat Dewanti” mengunggah profil singkat dari komunitas tersebut yang berisi ajakan mendukung, alasan mendukung Dewanti-Rumpoko, hingga penegasan kemandirian finansial dimana modal kegiatan bersumber dari sumbangan anggota atau pembelian souvenir kampanye dari masyarakat melalui “Sahabat Dewanti”

Namun, dalam publikasi masa kampanye hanya satu ditemukan konten *facebook* yang berkaitan langsung pada kegua figur Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso. Unggahan tersebut berisi mengenai Visi-Misi Dewanti-Punjul yang memiliki nama *Nawa Bhakti* atau sembilan bakti dalam bahasa sansekerta. Penjelasan dalam gambar tersebut juga dimbil langsung dari Visi-Misi yang didaftarkan ke KPUD Batu.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017

Implementasi strategi dilakukan untuk menetapkan parameter, berdasarkan definisi sasaran taktis dan melalui penetapan target *image*. Selain itu, implementasi juga terjadi melalui partisipasi aktif di dalam menjalankan program dan aktivitas. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi strategi tergantung pada orang-orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini. Menurut Schroeder (2010: 394-409) faktor manusia dan operasional memegang peranan penting.

a. Faktor Pendukung

Para pimpinan politik, manajer kampanye dan orang-orang yang bekerja bersama para aktivis setempat memainkan peran penting dalam kaitannya dengan faktor manusia ini. Struktur partai di dalam organisasi yang demokratis kerap menimbulkan kebingungan. Faktor ini yang memberikan beberapa ide dasar tentang organisasi kampanye dan prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan.

Kepemimpinan menjadi faktor awal dalam menggerakkan arah kemenangan politik. Pemimpin politik harus menjadi contoh dan cerminan bagi organisasi sehingga seluruh anggota memiliki panutan yang jelas dalam menunjukkan *positioning* politik bagi masyarakat dan khalayak. Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Karakter kepemimpinannya DPC, DPD, DPP itu sama semua. Karakternya adalah merakyat jadi pada waktu itu semua DPC berada di Batu untuk membantu Bu Dewanti dan tim kemenangan. Karena

filosofisnya adalah partainya *wong cilik* walaupun zaman telah berubah.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Karakter kepemimpinan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan garis kepartaian dimana PDIP merupakan partai sentralistik. Seluruh kegiatan demokrasi di internal PDIP akan diselesaikan melalui rekomendasi dan instruksi tertulis dari Ketua Umum menjadi faktor penentu yang harus diikuti oleh seluruh hierarki partai. Hal tersebut didasari pada Anggaran Dasar PDIP Pasal 28 ayat 1-4. Pasal 28 menjelaskan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai. Selain itu, Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai. Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai ditunjang oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi yang bertindak sebagai alat kelengkapan Ketua Umum.

Sifat sentralistik tersebut juga dikonfirmasi oleh Ir. Sutiyo yang juga sempat mencalonkan diri menjadi bakal calon Walikota. Ir. Sutiyo mengatakan dalam konteks perumusan calon,

“Itu prerogatif DPP, bisa lobby bisa macam-macam saya tidak mau mengupas itu dan itu bisa jadi subjektif dan bisa tidak elok saya membahas itu tapi karena instruksi itu tidak ke saya maka saya laksanakan” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa instruksi partai baik secara strategis dan politis merupakan kewenangan tingkat pusat yang diteruskan secara teknis ke dalam hierarki berikutnya. Ir. Sutiyo juga mengatakan dalam pengambilan langkah strategis dan politis saat itu ditunjukkan dengan penunjukan dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan.

“Agak melenceng ini juga merupakan strategi dari DPP, kemarin saya ikut mencalonkan diri Cuma saya tidak dapat rekom, intinya gitu. Saya selaku Ketua Bappilu waktu itu saya ditarik dari kehormatan partai, terus terang kader 100% saat itu suara mengarah ke saya cuma itu mungkin keputusan partai maka saya diangkat jadi Ketua Tim Pemenang Dewanti-Punjul. Dikhawatirkan seperti di Kabupaten ada Pak Genk ingin mencalonkan tapi karena tidak mendapat rekom malah loncat” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pertimbangan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu indikator dimana DPC mampu memiliki pertimbangan politis dimana harus menjalankan rekomendasi DPP serta menjaga keutuhan suara dan internal partai tingkat DPC Kota Batu.

Setelah dukungan kepemimpinan politik terhadap proses penunjukan manajer kampanye. Kepribadian dan kemampuan manajer kampanye juga menjadi kunci perumusan dan keputusan partai dalam strategi pemenangan.

Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Jadi semua bentuk strategi adalah kesepakatan tim pemenangan dan calon dimana masing-masing ide didiskusikan untuk disepakati sehingga jadwal turun lapangan calon pun juga harus mau menyelesaikan dan menjalani oleh tim pemenangan. Dan itu semua murni tanpa konsultan.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai bentuk kemandirian Ketua

Tim Pemenangan dalam mengorganisir struktur tim pemenangan dan calon untuk bergerak memenangkan pasangan calon. Selain itu, kesadaran

organisatoris dan politis juga dapat tercermin dari pernyataan Ir. Sutiyo selaku Ketua Tim Pemenangan dimana selaku bakal calon yang memiliki basis massa akan mengerahkan massanya untuk memindahkan dukungan kepada calon yang dia dukung dan siapkan untuk menang.

Menyiapkan pemenangan tentu membutuhkan variabel aktivis selaku pendukung keputusan elit politik untuk menggalang dan mengerahkan massa untuk memilih. Aktivis yang terdiri dari kader, anggota, simpatisan, dan relawan. Mengoptimalkan aktivis menjadi kebutuhan utama mengingat aktivis merupakan tulang punggung partai dalam pencapaian pemenangan.

Ir. Sutiyo mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan,

“Jadi gini Pak Punjul dan Bu Dewanti diusung satu partai. Itu langkah awal yang harus difungsikan adalah mesin partai mulai dari DPC, kecamatan ada PAC, lalu ranting, anak ranting hingga rw harus digerakkan. Terus yang lain yang ada relawan dan aktivis tertentu yang dioptimalisasikan” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Berikutnya dalam optimalisasi mesin partai, Tim pemenangan membedakan antara unsur internal partai dan eksternal partai. Ir. Sutiyo menjelaskan,

“Hal itu semua seperti yang saya sampaikan disesuaikan dengan jenjang kepengurusan sudah jelas. Itu harus bergerak merawat anggota, simpatisan perwilayah itu sudah jelas sehingga tidak terjadi benturan antara satu sama lain mengingat *goal*-nya ada itu menang” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Modal dari optimalisasi tersebut terdiri dari kuantitas dan kualitas aktivis.

Dwi Yuniar Saniman menyebutkan,

“Pengurusnya sekitar 1500-an mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC. Belum termasuk saksi itupun jumlahnya 840 orang belum GURALIH-nya 3 kali 420 itu sekitar 1200-an di luar pengurus. Untuk

kader non-pengurus sekitar 5000 orang” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Selain jumlah yang disebutkan oleh Dwi Yuniar Saniman. Ir. Sutiyo menegaskan adanya dukungan dari DPD Jawa Timur dan seluruh DPC di bawahnya. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Tapi kemarin karena Pilkada Kota Batu merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Petugas partai dari eksekutif – legislatif mulai dari provinsi dan daerah-daerah untuk turun dan kerja bareng, inilah bagaimana menggerakkan sebuah partai selain di internal DPC. Disanalah letaknya istilah gotong royong” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya kekuatan internal DPC PDIP Kota Batu beserta unsur pendukungnya. Namun bagi Ir. Sutiyo, kuantitas tersebut dirasakan masih perlu ditambahkan. Beliau mengatakan,

“Jumlah dalam kader cukup tidak nya bagi saya tidak ada cukupnya tapi semakin banyak semakin bagus dan harus bertambah sesuai rencana kaderisasi. Seperti saat pilkada kita juga mencari simpatisan” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Selain untuk kepentingan kemenangan, bagi Ir. Sutiyo penambahan jumlah anggota dan simpatisan merupakan tujuan ideologi dan kaderisasi dalam internal partai. Kemenangan yang dicapai oleh Dewanti-Rumpoko tidak semata-mata dapat dikatakan dari jumlah aktivis.

Berikutnya dalam memotivasi relawan untuk bergerak menuju tujuan yang jelas dilakukan oleh pasangan calon dan tim kemenangan itu sendiri.

Ir. Sutiyo mengatakan,

“Sebetulnya relawan ada yang *direct to* atau juga ada yang tercatat di KPU. Kalau relawan mungkin hanya masuk listnya saja agar ini tidak bersinggungan satu sama lain maka adanya perbedaan lahan penggarapan antara partai dan relawan. Sebenarnya mereka memiliki ranah sendiri. Terkadang paslon memiliki pertemuan khusus dengan

relawan dalam memotivasi.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi relawan disokong oleh elit politik di DPC dan pasangan calon itu sendiri. Selain memberikan motivasi kepada aktivis, tim pemenangan juga memberikan arahan melalui hierarki yang tersedia dalam organisasi. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Hal itu semua seperti yang saya sampaikan disesuaikan dengan jenjang kepengurusan sudah jelas. Itu harus bergerak merawat anggota, simpatisan perwilayah itu sudah jelas sehingga tidak terjadi benturan antara satu sama lain mengingat goalnya ada itu menang. Namun kadang ada juga skill *multitasking* untuk menggerakkan dilain daerah misalkan saya punya saudara di bumi aji bisa menggerakkan sehingga terkjadi kembali gotong royong.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, aktivis digerakan sesuai domisili dan ruang lingkup kehidupan masing-masing aktivis. Selain untuk fokus memenangkan daerah tertentu, hal itu juga berguna untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan pemenangan yang dilaksanakan. Namun, aktivisi juga diwajibkan untuk membantu daerah lain apabila memiliki relasi atau sumber daya pendukung tertentu di daerah lain untuk memenangkan pasangan calon di daerah lainnya.

Kompetensi aktivis dalam bergerak dikelola melalui tim pemenangan.

Dwi Yuniar Saniman menjelaskan,

“Struktur tim pemenangan itu sifatnya saling membantu. Awalnya peta massa dan kekuatan itu dianalisa melalui Bidang Riset, Analisa, dan Strategi. Bidang itu sifatnya mengukur dan menilai kekuatan basis partai. Nah, informasi tersebut didapatnya dari bidang-bidang lain khususnya Bidang Penggalangan dan Pengerahan soalnya berkaitan dengan guralih dan relawan” (Wawancara dilakukan 27 Maret 2018, pukul 12.39 WIB)

Melanjutkan pada pernyataan berikutnya, pernyataan diatas menunjukkan bentuk pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kekurangan basis massa serta penentuan daerah-daerah prioritas bagi pertahanan dan serangan tertentu dari Tim Pemenangan.

Selain faktor-faktor manusia, masih ada faktor-faktor operasional yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi sebuah strategi. Prinsip desakan waktu, prinsip penyesuaian yang fleksibel, dan prinsip ilusi. Faktor ini yang menunjukkan kondisi lapangan peperangan secara nyata dalam implementasi strategi politik.

Ir. Sutiyo selaku Tim Pemenangan menjelaskan PDIP bergerak spontan dan cepat pada awal waktu pencalonan pasangan calon. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Secara otomatis kalau calon ditetapkan ini ya tim kampanye sudah harus ada tim pemenang sudah harus ada yang non partai ataupun partai. Saya ditunjuk sebelum adanya penetapan calon sehingga dapat langsung bekerja.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut PDIP Kota Batu memanfaatkan popularitas yang ada sebelumnya untuk terjun ke masyarakat dalam meningkatkan elektabilitas serta mengetahui informasi yang terjadi di lapangan. Kecepatan dari PDIP Kota Batu menguntungkan Tim Pemenangan dalam mengelola aktivis yang digerakkan. Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Semua waktu yang ditentukan berjalan dengan baik. Seluruh saksi digerakkan dan dilatih selama 11 hari sehingga saat pelaksanaan yang tidak ada yang *mepet*.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penggalangan dan pengerahan massa berjalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Tim Pemenangan. Namun, Ir. Sutiyo menjelaskan hal yang tidak berbeda dalam kondisi penjadwalan di internal DPC PDIP Kota Batu dan Tim Pemenangan. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Terkadang ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. Namun hal tersebut hanya penyesuaian dengan program prioritas seperti rapat partai yang diutamakan daripada kampanye karena rapat partai maka rapat partai diutamakan untuk membahas kondisi terkini dan menyikapinya dan menurut saya ini tidak terlalu mempengaruhi karena adanya hanya penyesuaian jadwal karena evaluasi singkat.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Suliadi juga menambahkan,

“Tidak ada sebenarnya yang telat, semua itu hanya berjalan sesuai rencana yang ditentukan dari awal. Walaupun ada yang berubah itupun menyesuaikan agenda-agenda tertentu dan dikomunikasikan melalui grup *whatsapp* pemenangan jadi tetap sesuai jadi ya bisa menang akhirnya. Gamaslah lah kalau urusan jadwal dan tanggal2 dalam bergerak itupun sudah selesai sampai ke ranting.” (Wawancara dilakukan 3 Mei, 11.23 WIB)

Ir. Sutiyo menjelaskan ada kegiatan tertentu khususnya kampanye oleh Calon saat turun langsung yang tertunda. Hal itu dilakukan untuk keperluan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan serta untuk membuat resolusi mengenai informasi terbaru yang harus diikuti dilapangan. Informasi tersebut tentunya informasi yang didapat dan dibawa oleh aktivis di tingkat bawah yang tersebut di seluruh Kota Batu. Salah satu bentuk tambahan kegiatan pendukung strategi adalah pemberian bantuan terhadap masyarakat. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Munculnya info terbaru menjadikan acuan rapat sehingga dapat ditanggapi selain itu kadang program kita dibuntuti namun kita

menanggapinya dengan konsultasi masyarakat sehingga dapat memberikan hal tertentu semisal petani kita dapat memberikan traktor waktu itu untuk membantu petani.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Informasi tersebut dibutuhkan oleh Tim Pemenangan mampu menganalisa dan memantau seluruh kondisi yang mempengaruhi. Kondisi-kondisi tersebut ditanggapi dengan inovasi yang ditujukan untuk basis massa di suatu daerah. Ir. Sutiyo juga mengatakan selama kegiatan kampanye berlangsung ada otomisasi dalam menghadapi isu khususnya isu Dinasti Eddy Rumpoko di Kota Batu. Ir. Sutiyo mengatakan,

“Serangan tersebut hanya perlu ditunjukkan hasil saja, walaupun isu sangat berat dihadapi Tim Pemenangan. Namun, sekali lagi fokus pada keberhasilannya bukan pada isu dinasti-nya sehingga dapat menepis itu semua pada masyarakat seperti pendidikan hingga tingkat SLTA selain itu mengangkat keberhasilan Kota Batu itu kita showing” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan itu menunjukkan adanya kesiapan untuk menepis isu di kalangan masyarakat sehingga konten-konten kampanye yang dibawa kepada masyarakat tidak akan terdistorsi dengan isu-isu yang disebarakan lawan politik. Hal itu juga ditegaskan oleh Dwi Yuniar Saniman dengan mengatakan

“Jadi kita tetap seiasi berjalannya. Tetap terjun ke masyarakat. Untuk menanggapi isu-isu yang dibalas dengan hasil kerja nyata kita. Jadi kita tidak memunculkan kembali isu tertentu.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Beralih kepada kondisi strategi politik yang dirumuskan DPC PDIP Kota Batu, Tim Pemenangan, dan Aktivis. Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Strategi mungkin lawan tidak dapat membaca kita. Mungkin untuk Provinsi (Jawa Timur) Ketua Tim kita adalah PKB tapi disini (Kota Batu)

adalah PDIP sendiri. Walaupun kita memiliki partai pendukung kita juga tidak membuka strategi kita karena kita secara internal harus berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh.” (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas perumusan strategi ditutup dari pihak luar. Aliansi yang terbangun menuju pemenangan Dewanti-Punjul juga membentuk masing-masing strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, bagi Ir. Sutiyo selaku Ketua Tim Pemenangan yang memantau berjalannya kondisi kampanye calon mengatakan hal yang berbeda. Beliau mengatakan,

“Banyak, banyak yang terbaca. Bagia saya hampir sama sama saja namun bagaimana saja kita makin kuat dan kuat kuatan. Itu semua hanya bergantung kekuatan tertentu kader kita.” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan walaupun selama ini *blusukan* menjadi metode utama dalam berkampanye. Hal itu tentu bergantung dengan kekuatan mesin partai. Mengingat kekalahan basis massa tentunya berpengaruh pada sasaran perolehan suara yang mungkin tidak tercapai.

Implementasi di lapangan ternyata tidak hanya bergantung pada sumber daya manusia dan operasional. Dwi Yuniar Saniman menambahkan,

“Yang jelas adalah dana untuk pembiayaannya kampanye dan alat peraga kampanye harus diberikan seperti kaos dan stiker. Contoh saja pelatihan saksi kita menghabiskan 88 juta (Rupiah).”

Dwi Yuniar Saniman mengkonfirmasi bahwa sumber daya finansial juga berpengaruh pada implementasi. Komponen ini dipersiapkan secara cermat dan teliti sehingga mesin partai tidak berhenti bergerak karena kehabisan dana. Berdasarkan pelaporan dana kampanye pasangan calon ke pihak

penyelenggara, pasangan Dewanti-Punjul memiliki total dana kampanye Rp. 603.000.000. Pasangan calon yang memiliki total dana kampanye terbesar adalah Hairuddin-H.A. Sonata dengan jumlah Rp. 765.004.288. Selain itu, Rudi-Sudjono dengan jumlah Rp.250.000.000 lalu Abd. Madjid-Kasmuri dengan jumlah Rp. 105.000.000. Walaupun bukan sebagai pasangan calon dengan total dana kampanye terbanyak, pasangan dapat dikatakan mengelola dana kampanye secara efektif dan efisien dalam kampanye pemilihan sehingga berhasil mencapai kemenangan.

b. Faktor Penghambat

Namun, hal tersebut harus dinilai dari segi kualitas dalam kader bergerak.

Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Kalau kita melihat sesungguhnya suara PDIP itu tidak mungkin akan berpindah. Mulai dari Walikota pertama, pileg, kedua dst. Jadi PDIP itu sudah memenangkan 4 kali Walikota Batu mulai dari Pak Imam Khobul hingga Bu Dewanti karena kedekatan dari seluruh kader di masyarakat. (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivis partai sudah mampu mempengaruhi masyarakat untuk bergerak dan memilih kepada pasangan yang diusung oleh partai. Namun, kualitas Ir. Sutiyo mengakui adanya kekurangan dalam kepribadian aktivis partai dalam bergerak. Ir. Sutiyo menjelaskan,

“Dalam bergerak dalam pemilu menurut saya itu juga belum karena kalau dulu orang kampanye karena nasionalis-nya tinggi namun kalau sekarang mengingat kemajuan jaman kadang malah ada juga kader dan masyarakat yang kampanye karena pragmatis” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan dapat disimpulkan menjadi ungkapan kekecewaan terhadap aktivis karena sebagian aktivis partai hanya ingin bergerak menang untuk alasan individual yang menguntungkan diri sendiri. Walaupun dalam bergerak mengatasnamakan ideologi partai tapi dibalik itu semua Ir. Sutiyo menilai hal itu dilakukan untuk kepentingan pribadi setiap aktivis.

Selain itu, peran relawan diakui dapat membantu tujuan kemenangan Dewanti-Punjul selain adanya beberapa organisasi sayap partai. Relawan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang bergerak sebagaimana dinyatakan dalam faktor manusia yang mempengaruhi implementasi strategi oleh Schroeder (2010). Dwi Yuniar Saniman mengatakan,

“Jadi kemarin itu ada relawan dari Bu Dewanti yang namanya “Sahabat Dewanti” itu lapor kesini juga. Tapi sepertinya juga terlihat beberapa relawan yang bergerak namun tidak melaporkan diri kesini.” (Wawancara dilakukan 27 Maret 2018, pukul 12.39 WIB)

Dari pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan kemenangan Dewanti-Punjul muncul beberapa golongan relawan yang bersedia ikut membantu. Namun hal itu menjadi tidak optimal mengingat tidak terjadinya komunikasi timbal balik antara partai dengan beberapa golongan relawan. Walaupun komunikasi timbal balik yang diharapkan sebelumnya sudah dipaparkan yaitu optimalisasi gerakan dan tidak terjadinya tumpang tindih arah gerak. Tetap saja adanya kegagalan komunikasi tersebut mengurangi potensi kemenangan yang lebih besar.

Seperti pada faktor pendukung, pada faktor penghambat selain faktor-faktor manusia, masih ada faktor-faktor operasional yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi sebuah strategi.

Ir. Sutiyo selaku Ketua Tim Pemenangan menjelaskan hambatan pada informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Ir. Sutiyo menjelaskan,

“Isu dinasti tersebut adalah faktor yang sangat berat. Serangan tersebut hanya perlu ditunjukkan hasil saja, walaupun isu sangat berat dihadapi tim pemenangan. Namun sekali lagi fokus pada keberhasilannya bukan pada isu dinastinya sehingga dapat menepis itu semua pada masyarakat seperti pendidikan hingga tingkat slta selain itu mengangkat keberhasilan kota batu itu kita *showing*” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Hal serupa juga diakui oleh Dwi Yuniar Saniman dengan mengatakan,

“Jadi kita tetap seiasi berjalannya. Tetap terjun ke masyarakat. Untuk menanggapi isu-isu yang dibalas dengan hasil kerja nyata kita. Jadi kita tidak memunculkan kembali isu tertentu. (Wawancara dilakukan 15 Februari 2018, pukul 12.15 WIB)

Peneliti melihat bahwa isu dinasti yang dikembangkan oleh lawan politik pasangan calon dari PDIP memiliki dampak yang cukup berpengaruh. Isu-isu tersebut terlihat dikembangkan untuk menggerus basis pemilih/pendukung PDIP. Namun, penanggulangan yang dilakukan terhadap isu tersebut dijalankan melalui penyeberan berita keberhasilan Kota Batu yang lebih positif untuk warga Kota Batu.

Selain isu dinasti yang dikembangkan oleh lawan. Ada beberapa catatan dalam implementasi strategi untuk menggerus basis massa lawan. Mengingat Pilkada Kota Batu Tahun 2017 tentu daerah-daerah di Kota Batu sudah terkotak-kotak sebagai potensi suara partai kandidat. Mengenai potensi suara dari suatu daerah, Ir. Sutiyo selaku Ketua Tim Pemenangan menjelaskan,

“Walaupun kita sudah berkomunikasi dalam semua tingkatan ada beberapa temuan di lapangan yang terjadi. Dalam menggerus basis massa lawan kita lihat ada beberapa RW atau daerah yang sulit ditembus ya

paling itu daerah asal dari calon atau lawan. Tapi hasilnya tetap kelihatan bahwa Dewanti-Punjul masih dipercaya untuk memimpin Kota Batu” (Wawancara dilakukan 23 Maret 2018, pukul 14.18 WIB)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa kesiapan rencana untuk memluas basis massa yang menjadi potensi suara untuk Dewanti-Rumpoko memiliki kendala untuk menggerus beberapa daerah lawan.

C. Pembahasan

1. Strategi Komunikasi Politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017.

Pilkada serentak tahap pertama yang telah berhasil dilaksanakan pada 10 Desember 2015, dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Kota Batu termasuk salah satu Kota yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak mengingat Pilkada Kota Batu sebelumnya dilakukan pada tahun 2012 lalu.

Hingga kemenangan Dewanti-Punjul pada tahun 2017. PDIP Kota Batu juga sudah berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kota Batu sejak Tahun 2007 dan 2012 yang memenangkan Eddy Rumpoko sebagai Walikota Kota Batu selama dua periode. Melihat kondisi tersebut, PDIP Kota Batu dipastikan memenangkan kontestasi politik di Kota Batu secara tiga periode menggunakan perencanaan strategi dan perencanaan taktis. Partai politik yang

lebih modern memiliki tingkat pelembagaan yang lebih sempurna dan sistematis. Alfian (2013) mengatakan akan berbeda dengan partai politik modern dengan partai politik tradisional yang mengandalkan karisma tokoh bukan sistem. Hal itu dilandasi pada pendapat Max Weber dalam Alfian (2013: 208) bahwa karisma tidak dapat diturunkan, begitu sang tokoh wafat, wafat pula organisasi partai politik. Mengingat pernyataan tersebut maka partai perlu memiliki gambaran strategi komunikasi politik yang jelas untuk mempengaruhi masyarakat. Konsep strategi meluas ke berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang politik. Hal ini bertujuan untuk memimpin kelompok-kelompok masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi kepada sasaran khusus. Strategi itu selalu ditujukan untuk “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dan perolehan tambahan suara dalam kemenangan pemilihan bagi kandidat atau dalam memperoleh suara mayoritas untuk pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan (Schroeder: 2010).

Sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik memiliki tujuan khusus yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuan khusus tersebut dapat disimpulkan sebagai usaha Partai Politik dalam mencapai cita-cita politik dari Partai Politik dengan menyertakan aspirasi warga negara sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi melalui agenda-agenda politik. Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk rekrutmen politik dimana Partai Politik berfungsi sebagai salah satu proses dalam rekrutmen

politik yang harus melakukan proses-proses demokrasi sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Poin e UU Nomor 2 Tahun 2008.

a. Strategi Mempertahankan Pasar PDIP Kota Batu pada Pemenangan Pilkada Kota Batu 2017

Pilkada Kota Batu yang digelar tahun 2017 diikuti oleh 4 pasangan calon dari berbagai partai politik dan perseorangan. Pasangan nomor urut 1 Rudi-Sujono yang didukung oleh PAN, Hanura, dan Nasdem. Berikutnya nomor urut 2, Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso yang diusung oleh PDIP namun akhirnya mendapatkan dukungan dari Golkar, Gerindra, dan PKS. Lalu nomor urut 3, Hairuddin-Hendra Angga Sonatha yang didukung oleh PKB dan Demokrat. Terakhir nomor urut 4 yaitu Abdul Majid- H. A. Kasmuri Idris sebagai calon perseorangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut Pilkada Kota Batu 2017 dimenangkan oleh pasangan Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasangan calon tersebut menang dengan perolehan 51.754 suara atau setara dengan 44,57% suara dari total suara sah sebagaimana Keputusan KPU Kota Batu No. 22/HK.03.1.Kpt/3579/KPU-Kota/IV/2017 tanggal 5 April 2017.

Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso bukan pasangan yang asing di Kota Batu. Dewanti Rumpoko merupakan istri dari Pejabat Walikota yang masih menjabat yaitu Eddy Rumpoko, hal itu membuat Dewanti Rumpoko menempati jabatan menjadi Ketua Penggerak PKK Kota Batu. Selain faktor tersebut Dewanti Rumpoko merupakan Kader PDIP yang telah mengikuti dua kontestasi pemilihan yaitu pemilihan Walikota Kota Malang pada tahun

1999 melalui DPRD dengan hasil kalah lalu pada tahun 2015 bersaing pada Pilkada Kabupaten Malang dan kalah dengan Bupati yang masih menjabat yaitu Rendra Kresna dari partai Nasdem. Calon Wakil Walikota, Punjul Santoso merupakan adalah Wakil Walikota yang mendampingi Eddy Rumpoko pada masa jabatan 2012-2017. Hal itu menunjukkan bahwa Punjul Santoso merupakan calon Wakil Walikota yang diusung untuk kedua kalinya oleh PDIP Kota Batu.

Sebelum penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari DPP PDIP keluar. DPC PDIP Kota Batu membentuk Tim Lima yang diketuai oleh Simon Purwo Ali. Tim Lima berfungsi sebagai tim penjaringan bakal calon Kepala Daerah Kota Batu di tingkat DPC. Pada penjaringan ini terdapat empat kader PDIP Kota Batu yang mendaftar yaitu Sutiyo sebagai mantan anggota DPRD Jawa Timur, Wito Argo yang menjabat DPRD Kota Batu sejak 2014, Punjul Santoso yang menjabat sebagai Wakil Walikota tahun 2012-2017, dan Kustomo dari kader PDIP yang berasal dari masyarakat umum. Penjaringan nama bakal calon di tingkat DPC PDIP Kota Batu tidak ditemukan nama Dewanti Rumpoko selaku bakal calon Kepala Daerah. Namun, Dewanti Rumpoko mendaftarkan diri melalui proses penjaring bakal calon yang dibuka oleh DPD PDIP Jawa Timur. Nama-nama tersebut akhirnya diproses oleh DPP PDIP sebagai kekuasaan pengambil keputusan yang berhak memberikan rekomendasi dan instruksi. DPP PDIP mengeluarkan pasangan calon

Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso didasarkan pada survey yang dilakukan oleh DPP PDIP.

Berdasarkan teori yang dipaparkan pada Bab II, peneliti menggunakan teori strategi politik Schoreder. Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik (Schroeder, 2010: 26). Baik sebelum dan setelah penetapan pasangan calon Kepala Daerah DPC PDIP Kota Batu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berpengaruh pada kontestasi Pilkada Kota Batu Tahun 2017. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita politik untuk menjaga kekuasaan PDIP di lingkup Malang Raya mengingat sudah terjadinya kekalahan di Kota Malang tahun 2013 disusul kekalahan di Kabupaten Malang tahun 2015.

Di Kota Batu, PDIP mampu mempertahankan kadernya melalui Pilkada untuk memimpin selama 10 tahun sejak tahun 2007. Berikutnya PDIP Kota Batu mampu memenangkan kembali kader yang mereka usung yaitu Dewanti-Punjul. Peneliti akan melihat dan menelaah keadaan internal partai dalam menyiapkan dan memenangkan Pilkada Kota Batu tahun 2017 lalu dengan teori Schoreder. Menurut Schroeder strategi politik dibagi secara umum strategi politik dapat dikategorikan kepada dua jenis yaitu strategi *ofensif* (menyerang) dan strategi *defensif* (bertahan). Strategi *ofensif* dibagi menjadi strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Sementara strategi *defensif* dikategorikan sebagai strategi mempertahankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar (Schroeder, 2010: 185).

PDIP Kota Batu dikategorikan melakukan strategi *defensif* dengan kategori strategi mempertahankan pasar. Strategi PDIP Kota Batu dikategorikan strategi mempertahankan pasar didasari pernyataan Schroeder (2010) bahwa strategi ini adalah tipikal strategi yang digunakan oleh partai pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Pendekatan strategi mempertahankan pasar harus melalui pertimbangan terhadap beberapa faktor yang dijelaskan dalam Bab II.

PDIP Kota Batu menggunakan seluruh elemen yang dikuasai dalam Kota Batu mengingat PDIP Kota Batu mendominasi konstelasi politik Kota Batu baik eksekutif ataupun legislatif. Elemen tersebut digerakkan untuk mempertahankan citra positif pemerintahan yang dikuasai oleh kader PDIP Kota Batu. Citra positif ditujukan untuk menjaga nama baik kader dan partai sehingga memuluskan proses suksesi mendatang. Sebelum masa Pilkada Kota Batu tahun 2017. PDIP Kota Batu bersama kadernya fokus merawat instrumen dan institusi yang berguna untuk menyebarluaskan dan membentuk citra positif mulai dari aliansi partai politik, media massa, dan masyarakat atau simpatisan partai.

- 1) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, dimana program ini dapat dikatakan berhasil memberikan dampak bagi masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan fisik ini ditujukan untuk menunjang kegiatan wisata dan pertanian yang bermanfaat untuk masyarakat.

- 2) Citra pariwisata Kota Batu yang dikembangkan melalui istilah/*tagline* Kota Wisata Batu (KWB) dan logo *Shinning* Batu. *Tagline* tersebut dibentuk untuk memudahkan wisatawan mengenali Kota Batu yang sudah terpisah secara administratif dari Wilayah Kabupaten Malang.
- 3) Pendidikan gratis yang langsung menyentuh masyarakat berupa sekolah gratis mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Ajaran (SMA). Dana yang dianggarkan mencapai 19 miliar rupiah sehingga tidak ada alasan dari warga tertentu untuk tidak menyekolahkan anak usia pelajar dengan alasan terkendala biaya.
- 4) Program Pertanian Organik yang berjalan di Kota Batu. Walaupun program ini dikatakan dinyatakan belum maksimal namun pelaksanaan program yang sudah menyentuh kepada masyarakat seperti pelatihan dan sosialisas hingga pemberian bibit gratis dinilai sudah memberikan dampak kepada masyarakat.
- 5) Kinerja Pemerintah Kota Batu dinilai sukses dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup dalam segi kuantitas dan kualitas.

Penjabaran diatas merupakan beberapa program kerja yang berhasil dan memberikan penilaian positif terhadap Pemerintah Kota Batu dibawah kepemimpinan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso selaku Walikota dan Walikota dari PDIP Kota Batu. Perencanaan program hingga implementasi

kebijakan juga mendapat dukungan yang baik dari DPRD Kota Batu mengingat bahwa PDIP Kota Batu juga mendominasi kekuasaan legislatif di Kota Batu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kolaborasi yang dibangun diinternal partai sehingga Pemerintah Kota Batu baik dari eksekutif dan legislatif memiliki komunikasi yang sinergis.

Sinergitas antara partai dan pemerintahan berjalan merupakan bentuk implementasi awal dalam melaksanakan strategi komunikasi politik. Seperti yang disampaikan Arifin (2010) langkah awal dalam strategi komunikasi politik dimulai dari merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Ketokohan Dewanti Rumpoko dimulai dengan Jabatannya selaku Ketua Penggerak PKK Kota Batu yang diidentikan dengan kaum ibu di Kota Batu. Berikutnya Punjul Santoso selaku Wakil Walikota Kota Batu 2012-2017 berjalan semestinya yaitu pelayan masyarakat sebagai penggerak eksekutif. Kelembagaan PDIP Kota Batu dibangun melalui sinergitas antara Ketua DPC PDIP Kota Batu yang turun langsung di pemerintahan dengan mengambil peran sebagai anggota DPRD Kota Batu hingga tahun 2019. Jabatan ganda tersebut dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen partai politik dari internal dan eksternal partai dan juga masyarakat Kota Batu yang sudah berjalan 20 Tahun kiprahnya di Kota Batu.

Pembangunan citra yang dilakukan oleh partai dan calon tidak melakukan pendekatan investasi keuangan dalam bidang hubungan masyarakat. Mengingat seperti yang disebutkan sebelumnya Humas pemerintahan akan bekerja sebagai media yang menginformasikan kepada

publik baik langsung ataupun melalui perantara media. Baik dirasakan secara langsung atau tidak bagi masyarakat Kota Batu, hal itu merupakan sebuah bentuk pembangunan *image* politik tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.

Selain membawa komunikasi internal partai ke tahap kekuasaan eksekutif dan legislatif. PDIP Kota Batu bersama pasangan calon yang ditetapkan membangun komunikasi yang intens dengan partai-partai lain. Partai-partai lain diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan PDIP di Kota Batu. Interaksi tersebut dibangun dengan modal keberhasilan kepemimpinan Eddy Rumpoko selama 10 tahun menjabat Walikota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa partai penguasa berusaha untuk menjaga legitimasi partai serta pengaruh terhadap partai lain untuk mendukung mereka dalam kontestasi Pilkada Kota Batu 2017.

Menurut Teori Schroeder, partai yang ingin menjaga kekuasaan harus memberikan kompensasi untuk kemerosotan terhadap anggota atau pemegang jabatan. Namun, dalam menuju Pilkada Kota Batu 2017 tidak menerapkan hal tersebut dalam menjaga motivasi dan kekuatan internal partai. Hal itu diganti dengan konsep *reward and punishment* yang diawasi oleh pengurus DPC PDIP Kota Batu dimana anggota yang bekerja dengan baik akan mendapatkan dukungan tertentu dan juga adanya teguran atau hukuman terhadap anggota yang bekerja tidak sesuai sasaran bahkan adanya penindakan berupa pemecatan apabila sasaran kemenangan apabila tidak tercapai. Pemilihan konsep didasari mengingat perlunya keadilan dalam

internal partai. Konsep itu dinilai dapat mampu memberikan dampak terhadap kinerja anggota sehingga tidak ada anggota yang merasa aman atau tidak dibawah tekanan mengingat calon yang diusung adalah individu yang berbeda dari individu sebelumnya walaupun masih memiliki ikatan kepentingan suami-istri.

Secara organisasi, PDIP Kota Batu dapat dikatakan telah berhasil menyebarkan seluruh kader, anggota, dan simpatisan ke dalam berbagai elemen masyarakat. Bagi PDIP Kota Batu, hal ini memudahkan organisasi untuk membentuk ideologi dan pondasi politik untuk kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan mobilisasi massa seperti Pileg, Pilkada Provinsi, dan Pilpres mendatang. Hal ini juga mempengaruhi kestabilan partai karena memudahkan partai dalam membentuk rutinitas di masyarakat dalam membangun retensi politik serta meringankan beban anggaran partai untuk turun ke masyarakat.

Tabel 9
Tinjauan Pendekatan Strategi Mempertahankan Pasar

Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku	Strategi Mempertahankan Pasar	✓	Keterangan
Pemilih	Memelihara pemilih tetap/ pemilih tradisional, memperkuat pemilih musiman	✓	Mendekatkan struktur partai dengan masyarakat
Partai pesaing	Mengaburkan perbedaan	-	Tidak Dilaksanakan
Multiplikator, perekrut, penasehat	Insentif, memelihara multiplikator	✓	Membangun komunikasi dengan Elit Politik di Daerah
Lingkungan Eksternal	Memanfaatkan data pemilih tetap,	✓	Menyebarkan berita keberhasilan

	memanfaatkan data-data tentang keberhasilan		pemerintahan sebelumnya
Produk, Personil, Profil	Pemasaran program yang sudah ada, menunjukkan keselarasan program-individu	✓	Adanya penyesuaian program dengan kepemimpinan sebelumnya
Anggota, Pemegang jabatan	Memberikan kompensasi untuk kemerosotan anggota	-	Tidak Dilaksanakan
Keuangan	Investasi dalam bidang humas	-	Tidak Dilaksanakan
Organisasi	Mempermudah proses, mengembangkan rutinitas, menurunkan biaya	✓	Melanjutkan program-program kerja partai yang sudah tersusun sebelumnya

Sumber: Diolah Penulis

PDIP Kota Batu mengkonfirmasi bahwa selaku partai politik mereka membentuk rekayasa sosial untuk membentuk ingatan di dalam masyarakat Kota Batu bahwa PDIP merupakan partai kerakyatan yang berpihak pada rakyat kecil. Arifin (2010) mengatakan langkah kedua dalam strategi komunikasi politik, ialah menciptakan kebersamaan. Tindakan merawat menciptakan kebersamaan ternyata sudah dilaksanakan oleh PDIP termasuk di Kota Batu. Rekayasa tersebut sudah dibangun sejak dahulu dan dipertahankan dengan adaptasi zaman. PDIP memperkenalkan identitas partai rakyat tersebut menggunakan slogan *partaine wong cilik*. Identitas tersebut dibentuk melalui karakter kepengurusan dari DPC PDIP Kota Batu dan elemen yang berkaitan untuk siap berperilaku dekat dengan masyarakat dan memiliki intensitas terjun ke dalam masyarakat baik saat masa tugas ataupun diluar masa tersebut. Pembentukan identitas tersebut tentunya menunjang penyebaran ideologi politik dari PDIP mengingat bentuk

komunikasi tersebut memiliki kesempatan yang tinggi dalam menyosialisasikan identitas dan pemikiran partai. Selain itu, kedekatan tersebut digunakan untuk mencari isu dan rumor yang berkembang di masyarakat. PDIP Kota Batu menilai kegiatan tersebut mampu lebih tanggap dalam menginspirasi dan mewujudkan cita-cita partai dan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan suasana *homofili* dalam masyarakat sudah memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik.

Salah satu kebutuhan masyarakat mengenai fasilitas kesehatan juga memiliki program layanan diluar kewajiban resmi pemerintah. Dewanti Rumpoko selaku Ketua Penggerak PKK saat itu menggandeng RS Baptis Kota Batu melali relawannya untuk mendata dan membantu rakyat miskin dalam mengakses layanan kesehatan. Program tersebut tentunya akan meningkatkan simpati masyarakat kepada nama Dewanti Rumpoko serta partai yang melekat pada identitas Dewanti Rumpoko. Program jangka panjang tersebut dapat dikatakan mampu menguatkan *positioning* politik partai yang mengkampanyekan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Langkah berikutnya, layanan pendukung dan keberhasilan partai melalui kader di pemerintahan diangkat menjadi isu publik dan disoroti terus menerus oleh media pemerintah dan media massa dalam lingkup Kota Batu. Walaupun hal itu tidak secara langsung digerakkan oleh partai, hal itu disokong melalui Humas Pemerintah Kota Batu sebagai saluran komunikasi resmi pemerintah yang diteruskan oleh media massa sebagai lembaga independen yang memberikan informasi kepada masyarakat.. Melalui

pemberitaan positif seperti ini ditujukan untuk membangun ingatan kepada masyarakat Kota Batu dan membentuk rasa puas terhadap kepuasan dari pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Batu melalui program kerja.

Pemberitaan mengenai keberhasilan program kerja dari kepemimpinan politik dari kader PDIP Kota Batu selama 10 tahun kepemimpinan Eddy Rumpoko terasa atau tidak akan memperkuat basis massa pemilih tetap dan berpengaruh pada pemilih musiman dan tradisional yang merasakan dampak program tersebut. Citra positif tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada popularitas Punjul Santoso selaku Wakil Walikota. Punjul yang menjadi pendamping Eddy Rumpoko juga mendapatkan porsi pemberitaan yang dinilai memadai bagi partai. Hal itu ditandai dengan popularitasnya dalam berbagai macam survey politik Pilkada Batu 2017. Hasil-hasil dari survey yang dilakukan berbagai macam lembaga termasuk internal partai itu sendiri memantapkan langkahnya kembali untuk berkompetisi diajang Pilkada Kota Batu 2017. Arifin (2010) menyatakan langkah kedua dalam strategi komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan. Kebersamaan adalah perasaan yang dibangun oleh politisi dengan khalayak. Hal itu dibangun melalui adanya kedekatan dan kemudahan informasi bagi masyarakat melalui seluruh elemen yang dikuasai PDIP Kota Batu. Suasana homofili yang dibangun harus berdasarkan pada kondisi khalayak sehingga khalayak memiliki empati terhadap politisi. Pemahaman politisi terhadap khalayak akan memudahkan

politisi untuk menentukan metode komunikasi serta pesan persuasif yang akan disampaikan.

Seperti yang disebutkan dalam program layanan kesehatan. Perlu menjadi catatan, Dewanti Rumpoko yang merupakan istri dari Eddy Rumpoko sekaligus kader PDIP juga memiliki saluran komunikasi politik kepada masyarakat. Dewanti Rumpoko dapat dikatakan lebih siap dalam menjaga popularitas dirinya sebagai tokoh politik. Dilihat dari rekam jejaknya di perpolitikan daerah lingkup Malang Raya, Dewanti Rumpoko tentunya bukan tokoh yang asing bagi masyarakat Malang Raya khususnya Batu. Setelah melalui masa Pilkada Kabupaten Malang 2015, Dewanti Rumpoko meningkatkan intensitas kemunculan dalam ranah publik di Kota Batu. Dewanti Rumpoko sering mewakili Eddy Rumpoko dalam acara resmi pemerintah. Hal itu menegaskan dua hal, Dewanti Rumpoko sebagai bagian dari masyarakat Kota Batu yang peduli dengan masyarakat dan juga sebagai tokoh politik yang membutuhkan popularitas dan dukungan untuk menggantikan Eddy Rumpoko yang sudah tidak bisa maju mejadi Calon Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, membangun konsensus bersama rakyat adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh partai politik dalam strategi komunikasi politik. Arifin (2010) turut mengatakan tujuan komunikasi politik dicapai melalui penentuan bersama dimana keputusan diambil secara bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama. Kepemimpinan Eddy Rumpoko yang dikenal dekat dengan masyarakat dan seluruh elemen di Kota Batu

memudahkan Dewanti untuk masuk ke dalam bursa pencalonan berikutnya. Masuknya Dewanti sebagai bursa calon kepala daerah juga tidak mengalami begitu banyak gangguan atau *noise* kecuali rumor dinasti politik. Hal itu merupakan dampak upaya membangun konsensus yang didasari pada paradigma interaksional melalui penciptaan kebersamaan yang manusiawi. Upaya dimaksudkan agar semua pihak memiliki rasa kebersamaan (*sense of belonging*) sehingga dapat berpartisipasi secara aktif. Hasil dari komunikasi terhadap partai lain tersebut adalah terbentuknya aliansi partai pendukung terhadap PDIP yang diikuti oleh Gerindra, PKS, dan Golkar.

b. Kampanye Pemilihan PDIP Kota Batu pada Pilkada Kota Batu 2017

Kampanye pemilihan adalah bagian kecil dari kampanye politik. Firmanzah (2008) mengatakan kampanye pemilihan akan menyegarkan kembali image politik yang dibangun melalui kampanye politik. Mengingat kampanye politik yang bersifat jangka panjang memerlukan penegasan dan penguatan ulang melalui kampanye pemilihan untuk memobilisasi massa. Masa kampanye pemilihan ini mengharuskan PDIP Kota Batu memantau kondisi pencalonan meliputi basis massa yang ada serta isu-isu yang mempengaruhi pemilih untuk bergerak ke TPS memilih calon yang diusung.

PDIP Kota Batu terlihat membuat dua seluran yang digerakan dalam memastikan warga memilih calon yang mereka usung. Pertama adalah Tim Kampanye Resmi dari DPC PDIP Kota Batu yang didaftarkan ke KPUD Batu. Kedua adalah Tim Relawan yang dipantau langsung oleh Dewanti

Rumpoko. Kedua tim ini memiliki tujuan yang sama untuk menggerakkan seluruh pemilih ke TPS memilih calon yang mereka usung. Namun, kedua tim tersebut memiliki sasaran yang dibedakan. Tim Kampanye Resmi memiliki fokus untuk mempertahankan serta memobilisasi kembali suara yang sudah di dapat saat Pileg dan Pilpres 2014 serta suara Pilkada Kota Batu 2012. Sedangkan, relawan fokus untuk membantu Dewanti Rumpoko menysir daerah-daerah basis massa yang belum kuat sehingga dapat meraih dukungan-dukungan baru dari pemilih musiman dan tradisional.

Kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh PDIP Kota Batu sudah tidak berfokus pada kegiatan media massa dan media sosial. Hal itu karena adanya pembatasan dari KPUD Batu dalam melakukan penyiaran melalui media. Metode *blusukan* menjadi langkah yang diterapkan untuk mempengaruhi massa secara mendalam. Tim Kampanye Resmi membentuk Guralih atau Regu Penggerak Pemilih untuk menggerakkan pemilih secara *grassroot* dan Dewanti Rumpoko hanya hadir sebagai simbol dari *blusukan* tersebut untuk mempertahankan citra peduli dan dekat dengan masyarakat. Hal itu ditunjang dengan dukungan seluruh DPC PDIP Se-Jawa Timur yang mendapat instruksi dari DPD dan DPP PDIP. Baik dari Pengurus Partai, Kepala Daerah, Ketua DPRD Kabupaten/Kota termasuk anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk membantu DPC PDIP Kota Batu saat mendekati hari pemilihan. Terkhusus pada anggota Dewan yang membantu di Pilkada Kota Batu bahkan harus tidur dan menempati suatu daerah di dekat TPS untuk memantau gerak-gerik lawan. Kegiatan dapat dikatakan

memudahkan pendekatan elemen partai untuk mempengaruhi massa. Keberanian kader untuk tidur di rumah warga merupakan bentuk komunikasi yang menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang berbasis kerakyatan sehingga dapat memberikan sentuhan yang kuat kepada masyarakat bahkan mendekati masa pemilihan.

Selain itu, pergerakan anggota dan simpatisan melalui metode *blusukan* menggeser paradigma lama dimana dalam mempengaruhi massa diperlukan sebuah pengumpulan massa dengan menghadirkan orator untuk meyakinkan pemilih. Bentuk kegiatan komunikasi politik satu arah yang diungkapkan Schroeder (2010) ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan dikonsepsikan oleh PDIP Kota Batu. Kegiatan satu arah dinilai sudah tidak layak karena masyarakat cenderung fokus pada hiburan yang diberikan daripada konten kampanye yang diberikan oleh pasangan calon dan partai. Semua konten kampanye mulai dari program kerja dan janji kampanye dipindah ke dalam metode *blusukan* melalui aktivis partai.

Pada kampanye pemilihan 2017 oleh Dewanti Rumpoko tetap menggunakan isu yang sama dengan Walikota Kota Batu sebelumnya yang berasal dari PDIP dan sekaligus suami dari Dewanti Rumpoko. Dewanti Rumpoko tetap mempertahankan fokus pada sektor wisata dan pertanian. Hal tersebut berbeda dengan dengan pernyataan Schroeder (2010) yang mengatakan bahwa kampanye pemilihan memiliki sifat program kampanye yang berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan pasar. Namun, dalam kampanye kali ini Dewanti-Punjul mempertahankan hal tersebut karena

trademark terhadap Kota Batu yang dibangun selama 10 tahun oleh Eddy Rumpoko serta semangat pasangan calon serta PDIP Kota untuk memberlakukan pembangunan keberlanjutan untuk masyarakat Kota Batu.

Tabel 10
Kampanye Pemilihan oleh PDIP Kota Batu

	Kampanye Pemilihan	✓	Keterangan
Jangka dan Batas Waktu	Periodik dan tertentu	✓	Menyesuaikan agenda KPU sebagai penyelenggara
Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	✓	Pembentukan Guralih (Regu Penggerak Pemilih)
Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung <i>Push Marketing</i>	✓	Bidang Penggalangan dan Pengerahan sebagai ujung tombak pergerakan di masa kampanye pemilihan
Komunikasi Politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan harapan politik kalau menang pemilihan	-	Tidak Dilaksanakan
Sifat Hubungan Antara Pemilih dan Kandidat	Pragmatis/Transaksional	✓	Munculnya sebagaian kader dan simpatisan yang bergerak bukan untuk ideologi dan program
Sifat Program Kerja	<i>Market-oriented</i> dan berubah-ubah dari pemilihan satu ke pemilihan lainnya	-	Tidak Dilaksanakan
Produk Politik	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	✓	Penyebarluasan figur calon dan visi-misi dan program aksi Dewanti-Punjul
Retensi Memori Kolektif	Cenderung mudah hilang	-	Tidak Dilaksanakan

Sifat Kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	✓	Blusukan dan pengumpulan massa
-----------------------	--	---	--------------------------------

Sumber: Diolah Penulis

Setelah melalui analisa pendekatan strategi mempertahankan pasar dan kampanye pemilihan. Strategi Komunikas Politik PDIP pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017 dianalisis melalui pendekatan pemasaran yang sukses dari Newman dalam Kaid (2015:30-31) untuk dapat dikatakan sukses. PDIP Kota Batu dapat dikatakan berhasil dalam mengutarakan keberhasilan calon, partai politik dalam mendorong opini publik apabila bergantung pada praktik yang diutarakan Newman dalam Kaid (2015:30-31) :

Tabel 11
Praktik-Praktik Penunjang Pemasaran yang Sukses

Praktik	✓	Keterangan
Memahami apa yang dicari pemilih.	✓	Melaksanakan survey secara kelembagaan melalui lembaga survey dan kader atau simpatisan partai
Menjalin hubungan emosional dengan orang-orang	✓	Blusukan oleh seluruh elemen partai dalam menjalin hubungan relasional
Kita hidup di era Produksi Citra	✓	Membentuk citra positif melalui keberhasilan program dari Pemerintahan yang dipimpin kader partai
Gunakan satu visi sentral untuk terhubung isu-isu dan kepribadian calon	✓	Penajaman terhadap isu perkotaan dan pedesaan untuk melekatkan kepribadian calon yang dekat dengan seluruh elemen
Berbicara tentang keprihatinan pemilih, bukan keprihatinan anda sendiri	-	Tidak Dilaksanakan
Pemilih selalu menginginkan perubahan	-	Tidak Dilaksanakan
Pasarkan diri anda ke media	✓	Menunjukkan calon kandidat sebelum masa kampanye pemilihan melalui agenda resmi yang dipublikasikan media

Dapatkan dukungan dari elit partai	✓	Dewanti-Punjul mendapatkan dukungan DPC hingga DPP PDIP yang dibuktikan adanya surat rekomendasi partai serta dukungan partai-partai lain
---	---	---

Sumber: Diolah Penulis

Menurut tabel yang dibuat diatas, PDIP Kota Batu memenuhi enam dari delapan praktik yang diutarakan Newman. Walaupun tidak memenuhi semua praktik yang diutarakan. Strategi yang dilakukan oleh PDIP Kota Batu tetap terbukti berhasil dalam memenangkan pasangan calon yang mereka usung mengingat adanya tinjauan implementasi strategi melalui faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi politik dari Schroeder.

2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017

Implementasi strategi dilakukan untuk menetapkan parameter, berdasarkan definisi sasaran taktis dan melalui penetapan *target image*. Selain itu, implementasi juga terjadi melalui partisipasi aktif di dalam menjalankan program dan aktivitas. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi strategi tergantung pada orang-orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini. Menurut Schroeder (2010: 394-409) faktor manusia dan operasional memegang peranan penting. Untuk memudahkan analisa tersebut, maka peneliti mengkategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Seperti yang dijelaskan pada BAB II, faktor sumber daya manusia dibagi menjadi para pimpinan politik, manajer kampanye dan orang-orang yang bekerja bersama para aktivis setempat memainkan peran penting dalam

kaitannya dengan faktor manusia ini serta motivasi sukarelawan. Schroeder (2010) mengatakan prinsip sebagai pimpinan politik harus melaksanakan tugas mereka secara penuh dan tepat waktu, dan setelah itu tidak boleh mencampuri pekerjaan manajemen kampanye secara detail. Elit partai DPC PDIP Kota Batu dan hierarki di atas tidak pernah mencampuri perencanaan dan keputusan manajer kampanye. Pimpinan DPP, DPD, hingga DPC PDIP Kota Batu bekerja sebagai wadah penampung segala masukan sebelum Tim Pemenangan bekerja. Penentuan Ketua Tim Pemenangan juga dibentuk secara cepat sesuai dengan turunnya surat rekomendasi dari DPP PDIP dan disertai kepentingan strategis dan politis untuk menjaga kestabilan partai dan basis massa.

Suliadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu tidak mencampuri yang telah disusun oleh tim kampanye. Beliau menjalankan tugas masing-masing yang tidak berkaitan dengan tim kampanye. Oleh karena itu, pimpinan DPC PDIP Kota Batu dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas program, pemilihan kandidat, pembuatan rencana anggaran dan menyetujui kebijakan untuk implementasi strategi.

Selain pimpinan politik, manajer kampanye juga mempengaruhi keberhasilan akan strategi. Berdasarkan kriteria dari Schroeder (2010), manajer kampanye harus mampu:

- 1) Mampu berpikir dan mengambil keputusan secara strategis dan politis.
- 2) Mampu mewujudkan rencana-rencana yang sudah ditetapkan.

- 3) Mampu memotivasi dan mengelola organisasi dan seksi-seksi di dalam organisasi yang berada di bawahnya.

Melihat kriteria diatas, dapat dikatakan manajer kampanye yang ditunjuk DPC PDIP Kota Batu yaitu Ir. Sutiyo. Ir. Sutiyo dapat dikatakan mampu mengambil keputusan yang tepat seperti menggerakkan basis massa yang sebelumnya terkondisikan untuk dirinya beralih kepada Dewanti Rumpoko dan Punjul serta melanjutkan branding pariwisata dan pertanian yang sesuai antara Eddy Rumpoko dan Dewanti Rumpoko. Selain itu, dalam mewujudkan rencana kegiatan Ir. Sutiyo dapat mengakomodir seluruh kegiatan kampanye yang diatur terhadap calon dan relawan dibantu oleh bidang-bidang dibawahnya. Terakhir, dalam memotivasi dan mengatur anggota di bawahnya dengan konsep reward and punishment terbukti berhasil menggerakkan seluruh sumber daya manusia di bawahnya.

Aktivis adalah anggota-anggota partai yang bekerja untuk kegiatan-kegiatan partai, yang diharapkan membawa efek berita yang besar – yang tidak terbatas pada pemanfaatan kegiatan yang diliput oleh media saja. Schroeder (2010) menilai aktivis dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas.

Berikutnya menurut Schroeder (2010) selain faktor-faktor manusia, masih ada faktor-faktor operasional yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi sebuah strategi. Prinsip desakan waktu, prinsip penyesuaian yang fleksibel, dan prinsip ilusi. Prinsip desakan waktu mencakup aspek kecepatan, ketepatan, dan tren. Berikutnya, prinsip fleksibilitas mencakup kemampuan analisa kondisi dan inovasi. Terakhir

dalam prinsip ilusi adalah adanya manuver tipuan yang berfungsi mengecoh lawan dalam posisi menyerang atau bertahan.

Secara garis besar, strategi dari DPC PDIP Kota Batu untuk memenangkan Pilkada Kota Batu 2017. Untuk memudahkan analisa prinsip ketergantungan waktu, peneliti menggunakan tabel matriks.

Tabel 12
Matriks Faktor Operasional Ketergantungan Waktu dalam strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017

Aspek	✓	Keterangan
Kecepatan	✓	Schroeder (2010) implementasi harus berlangsung dengan cepat, karena semakin lama ditundanya pelaksanaan sebuah perencanaan, semakin sedikit pula faktor situasional aktual dipertimbangkan. Dengan demikian DPC PDIP terbukti cepat karena membentuk Tim Penjaringan Bakal Calon semenjak 1 tahun sebelum waktu pemilihan. Selain itu, persiapan relawan dan saksi yang disiapkan menuju waktu pemilihan berjalan lancar sampai 11 hari sebelum waktu pemilihan.
Ketepatan	✓	Schroeder (2010) menyebutkan keberhasilan pelaksanaan sangat tergantung pada ketepatan waktu yang dipilih. Untuk memulainya, pemilihan waktu ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang telah direncanakan, dan harus pula selaras dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh unit-unit taktis lainnya. Aspek ini kembali terpenuhi mengingat penetapan manajer kampanye dibentuk setelah nama pasangan calon setelah rekomendasi dari DPP PDIP keluar walaupun belum memasuki masa kampanye calon dari KPUD Batu. Hal itu memungkinkan kesiapan Tim Pemenangan untuk mencapai sasaran yang ditentukan.
Tren	✓	Tren yang beredar di masyarakat saat Pilkada 2017 adalah membentuk hubungan emosional masyarakat dengan partai politik

	atau pasangan calon. Hal itu dipilih karena adanya pengalaman keberhasilan dari partai yang terbukti berhasil melalui metode <i>Blusukan</i> Joko Widodo sejak maju sebagai Calon Walikota Solo, Calon Gubernur DKI Jakarta, dan Calon Presiden RI. Metode tersebut memiliki nilai lebih karena adanya pendekatan pengenalan calon secara langsung kepada masyarakat.
--	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Schroeder (2010) mengatakan fleksibilitas merupakan pengenalan dan pemahaman yang lebih baik atas tantangan atau peluang spesifik dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi di lapangan. Hal ini mampu dicapai melalui adanya rapat evaluasi internal yang dilakukan berkala dan mempengaruhi penjadwalan kampanye dan bentuk kampanye. Rapat ini juga menghasilkan adanya inovasi untuk mempertahankan basis massa seperti adanya bantuan alat produksi petani untuk menjaga basis massa.

Prinsip terakhir dalam faktor operasional adalah prinsip ilusi. Schroeder (2010) mengatakan bahwa prinsip ilusi berisi manuver-manuver tipuan atau ilusi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan strategis. Namun, prinsip ini tidak memiliki tempat yang baik dalam perencanaan strategi Tim Pemenangan. Adanya bidang riset, analisa dan strategi hanya berfungsi sebagai pusat informasi kekuatan dan kelemahan. Walaupun Tim Pemenangan tidak pernah membuka informasi strategi selama pelaksanaan strategi. Tim Pemenangan merasa adanya kemiripan strategi yang diterapkan lawan sehingga penanggulangan kondisi tersebut ditanggapi melalui penguatan kemampuan kader dan relawan melalui pertemuan dan

arahan dan Tim Pemenangan. Penguatan tersebut ditujukan supaya basis massa yang dimiliki sebelumnya tidak tergerus oleh aktivis dari pasangan calon lain bahkan ditujukan untuk menggerus basis massa dari pasangan calon lain.

Selain faktor-faktor operasional yang disebutkan Schroeder diatas. Schroeder (2010) menyatakan di masa kini, sumber daya finansial sangat penting, tetapi tidak menentukan segalanya. Dan karena bersifat sangat penting untuk menggerakkan seluruh elemen pemenangan, komponen ini harus diperiksa secara cermat dan teliti. Sumberdaya ini dapat dikatakan cukup mengingat pasangan calon Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso merupakan pasangan calon terkaya kedua dari empat calon yang ada. Hal itu juga didukung dengan adanya kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh Tim Pemenangan melalui Bidang Sumber Daya Dana dan Logistik dan penjualan *souvenir* kampanye oleh “Relawan Dewanti”.

Faktor pendukung sumber daya manusia dan operasional dalam strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pilkada Kota Batu 2017, diantaranya:

- 1) Faktor pendukung sumber daya manusia, meliputi :
 - a) Kapasitas dan kapabilitas dari pimpinan partai dan manajer kampanye mampu merencanakan dan menggerakkan seluruh elemen yang berkaitan dengan partai sehingga dapat tercapainya tujuan pemenangan PDIP Kota Batu.

- b) Kuantitas dan kualitas kader PDIP Kota Batu yang mampu menguasai seluruh elemen masyarakat Kota Batu sehingga mampu mempertahankan suara yang di dapat di ajang kontestasi politik sebelumnya untuk memenangkan pasangan calon yang diusung partai pada Pilkada Kota Batu 2017.
- c) Pengorganisasian terhadap relawan yang ditujukan untuk memperluas basis massa kepada pasangan calon yang terfokuskan untuk meningkatkan elektabilitas Dewanti Rumpoko melalui “Sahabat Dewanti”.
- 2) Faktor pendukung operasional, meliputi :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan bentuk strategi yang disusun sejak awal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh DPC PDIP Kota Batu.
 - b. Adanya penyesuaian strategi ketika kontestasi berlangsung berhasil mendukung dan mencapai sasaran yang ditetapkan karena adanya arus informasi yang berjalan dengan baik.
 - c. Pengambilan keputusan untuk memperkuat kondisi internal sampai berjalannya waktu pemilihan terbukti berhasil mempertahankan basis massa pasangan calon dan menggerus basis massa pasangan calon lain.
 - d. Sokongan dana yang dapat dikatakan kuat mampu menjaga keberlangsungan strategi dan menghindari adanya kemandegan strategi karena kehabisan sumber daya.

b. Faktor Penghambat

Menurut segi kuantitas, jumlah dukungan aktif kader di Kota Batu terdiri dari 5000 anggota dapat dikatakan cukup dan dampaknya terasa hingga mampu mempertahankan PDIP Kota Batu dalam ajang kontestasi politik daerah, provinsi, dan nasional. Namun, jumlah tersebut harus terus bertambah apabila adanya keinginan dari organisasi untuk mendominasi di wilayah tersebut. Namun, dari segi kualitas. Diakui oleh Ketua Tim Pemenangan bahwa walaupun aktivis mampu menjaga komunikasi masyarakat dengan partai. Landasan ideologi yang dibangun selama masa kampanye politik tergerus di kalangan masyarakat dan aktivis karena adanya kepentingan pragmatis yang muncul dan masa kampanye pemilihan.

Motivasi relawan merupakan bagian terakhir faktor-faktor manusia. Salah satu aspek mengenai adanya komunikasi yang baik ditandai dengan adanya pertemuan dengan pasangan calon yang dapat diketahui oleh partai. Pertemuan tersebut dapat dikatakan memberikan hasil kedekatan emosional dan profesional antara relawan dan pasangan calon. Selain itu, aspek arahan atau informasi dari partai juga disesuaikan melalui metode pembedaan sasaran. Dalam mempertahankan dan memperluas dukungan Ketua Tim Pemenangan memberikan arahan adanya pembedaan antara relawan dan tim kampanye. Hal ini membuat relawan dapat fokus mengerjakan tugas-tugas yang berikan sehingga strategi pemenangan berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih tugas antara tim kampanye dan relawan.

Namun, DPC PDIP Kota Batu memiliki kekuarangan karena tidak dapat mengakomodir seluruh golongan relawan. Adanya relawan yang tidak terkondisikan menyebabkan pengawasan terhadap gerakan relawan dimasyarakat. Hal itu terjadi dikarenakan adanya golongan relawan yang tidak melaporkan atau menyatakan dukungan sehingga adanya komunikasi yang kurang baik terhadap sebagian golongan relawan. Sampai Pilkada Kota Batu 2017 selesai, hanya ada satu golongan relawan atas nama “Sahabat Dewanti” yang benar-benar mampu dikomunikasikan secara baik oleh partai.

Walaupun ada keberhasilan menjalankan prinsip-prinsip operasional sebelumnya mendapatkan hambatan karena berkembangnya isu dinasti politik yang dibangun oleh lawan politik dari pasangan calon. Walaupun pada akhirnya Tim Pemenangan berhasil mencapai kemenangan untuk pasangan Dewanti-Punjul, isu tersebut diakui sangat mempengaruhi pergerakan kader dan relawan dalam berkampanye.

Selain itu, walaupun sudah melakukan langkah melalui hierarki terbawah. Sasaran untuk menggerus basis massa lawan diakui mengalami kesulitan dalam menembus beberapa daerah rukun warga yang sudah terlebih dulu dimasuki oleh pasangan calon lain. Hal itu membuat bidang Analisa, Riset, dan Strategi trus berkoordinasi dengan Regu Penggerak Pemilih lebih dalam saat menuju masa pemilihan. Hasil koordinasi dan upaya menggerus massa pasangan calon lain tetap menghasilkan kemenangan secara umum bagi Dewanti-Punjul.

Faktor pendukung dan penghambat operasional dalam strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada kemenangan Pilkada Kota Batu 2017, diantaranya:

- 1) Faktor penghambat sumber daya manusia, meliputi :
 - a) Adanya sebagian kader dan relawan yang bersifat pragmatis dan mengutamakan kepentingan pribadi serta tidak mengutamakan ideologi dan program calon dan partai saat bergerak meraih suara.
 - b) Adanya golongan relawan tertentu yang tidak mendaftarkan dukungan sehingga menghilangkan potensi penggalangan suara yang lebih besar untuk Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso.
- 2) Faktor penghambat operasional, meliputi :
 - a) Berkembangnya isu dinasti politik yang dibawa oleh lawan politik untuk menjatuhkan popularitas dan elektabilitas pasangan calon yang diusung oleh DPC PDIP Kota Batu.
 - b) Adanya hambatan dalam menembus beberapa basis massa lawan politik dalam tingkata Rukun Warga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi penelitian terkait strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pilkada Kota Batu 2017 maka dalam sub-bab ini peneliti akan menarik kesimpulan, antara lain:

1. Proses strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pilkada Kota Batu 2017, diantaranya :
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu memanfaatkan pembentukan citra politik Kota Wisata Batu serta keberhasilan kader partai saat memimpin Pemerintahan Kota Batu.
 - b. Peran media dan instrumen hubungan masyarakat dimanfaatkan secara masif sebelum masa kampanye pemilu dilaksanakan untuk membentuk citra positif bagi calon kandidat berikutnya dan partai selama masa kepemimpinan Eddy Rumpoko.
 - c. Pemanfaat metode *blusukan* yang digunakan sebelum dan sesudah masa penetapan calon digunakan untuk mempertahankan basis massa partai dan calon dan menggerus basis massa lawan yang mengandalkan kuantitas dan kualitas dari atavis partai terbukti berhasil.

- d. Membangun komunikasi politik dengan elit partai politik dalam menggalang dukungan dan kepercayaan partai politik di Kota Batu untuk memperluas dukungan
 - e. Kampanye pemilihan yang didukung dengan adanya relawan “Sahabat Dewanti” yang diakomodir partai sangat membantu berjalannya keberhasilan strategi dari Tim Pemenangan.
 - f. Strategi mempertahankan pasar ditujukan kepada kelompok petani, kelompok industri wisata, serta aktor-aktor politik di Kota Batu.
2. Faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pilkada Kota Batu 2017, diantaranya :
- a. Hubungan kelembagaan internal PDIP Kota Batu disokong oleh kekuatan DPD Jawa Timur dan DPP PDIP meringankan beban DPC PDIP Kota Batu dalam pelaksanaan strategi komunikasi politik.
 - b. Kuantitas aktivis partai yang mendukung berjalannya strategi komunikasi politik. Namun, sebagian aktivis partai memiliki sifat pragmatis dan dilandasi kepentingan pribadi di luar kepentingan ideologis partai
 - c. Dukungan dana yang mencukupi dari pasangan calon dan sumbangan dari berbagai pihak menjadikan strategi komunikasi politik mampu berjalan dengan baik.

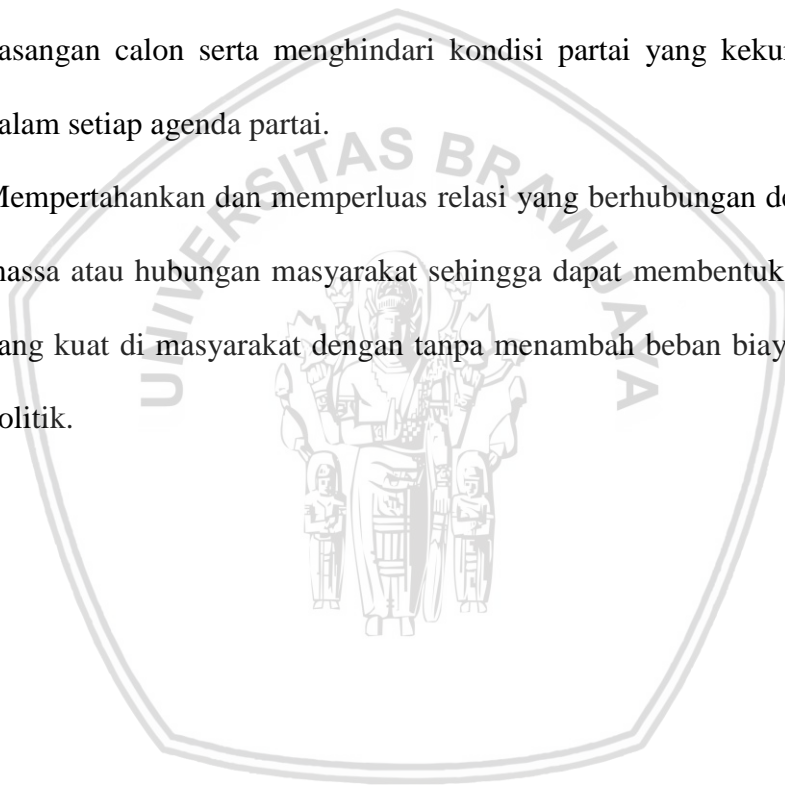
- d. Kapabilitas Tim Pemenangan dalam merencanakan, menjalankan, dan menilai strategi komunikasi politik yang ditentukan mampu memenuhi harapan DPC PDIP Kota Batu dan hierarki di atasnya.
- e. Serangan kampanye hitam oleh lawan politik yang berupa isu dinasti politik Eddy Rumpoko memiliki pengaruh terhadap informasi politik di Kota Batu
- f. Daerah atau basis massa lawan politik menjadi bagian dari kesulitan untuk meraih dukungan suara karena sudah terbandung dengan strategi politik dari lawan politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu dalam strategi komunikasi politik PDIP Kota Batu pada pemenangan Pilkada Kota Batu 2017. Masukan tersebut di antara lain:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu membentuk investasi kader yang potensial secara jangka panjang sehingga membuka jalan kaderisasi politik dari masa ke masa sehingga dapat memunculkan calon yang kuat setiap masa Pilkada Kota Batu berikutnya.
2. Pembentukan strategi jangka panjang sehingga dalam membentuk pemilih tetap yang dapat digerakkan dalam setiap kontestasi politik untuk memperluas basis massa partai.

3. Membentuk program edukasi politik baik untuk internal partai dan eksternal partai. Hal itu ditujukan untuk menanamkan ideologi partai secara komprehensif serta menghilangkan sifat pragmatis yang berkembang di lingkungan partai dan masyarakat.
4. Pembentukan program penggalangan dana yang bersifat jangka panjang dari partai. Hal ini berguna untuk meringankan sumbangan kampanye dari pasangan calon serta menghindari kondisi partai yang kekurangan dana dalam setiap agenda partai.
5. Mempertahankan dan memperluas relasi yang berhubungan dengan media massa atau hubungan masyarakat sehingga dapat membentuk citra politik yang kuat di masyarakat dengan tanpa menambah beban biaya pencitraan politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik : Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik*. Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia Jakarta
- BPS Kota Batu. 2017. *Kota Batu Dalam Angka Tahun 2017 : Batu Municipality in Figures 2017*. Batu: BPS Kota Batu
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Choi, Nankyung. 2009. *Democracy and Patrimonial Politics in Local Indonesia*. 131-164
- Creswell. J. W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Dephukam. 2007. *Laporan Akhir Kompendium Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kiswara, B.Y. 2016. Priyo Bogank: Dinasti Rumpoko Masih Bisa Dikalahkan. http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/277429/priyo_bogank:_dinasti_rumpoko_masih_bisa_dikalahkan.html . Dilihat pada 25 Desember 2017
- KPUD Batu. 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012. Batu. KPUD Batu

- KPU RI. 2017. Hasil Hitung TPS (Form C1) Kota Batu. https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_timur/kota_batu . Dilihat pada 20 Januari 2017
- Labolo, Muhammad & Ilham, Teguh. 2017. *Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Press
- Kaid, L. K. 2015. *Handbok Penelitian Komunikasi Politik*. Diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi. Bandung: Nusa Media
- Mayasari, Dayu. 2007. 4 Pasangan Calon Peserta Pilkada Batu Lolos Verifikasi Pertama. http://www.suarasurabaya.net/print_news/Politik/2007/44162-4-Pasangan-Calon-Peserta-Pilkada-Batu-Lolos-Verifikasi-Pertama . Dilihat pada 24 Desember 2017
- McNair, Brian. 2016. *Pengantar Komunikasi Politik. Edisi Kelima*. Diterjemahkan oleh : Imam Muttaqien. Bandung: Nusa Media
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin. 2016. Mandat PDIP Itu Punya Pesan Penting Partai. <https://www.timesindonesia.co.id/read/132156/1/20160906/104329/mandat-pdip-itu-punya-pesan-penting-partai/> . Dilihat pada 22 Desember 2017
- Muiz, A.A. 2016. PDIP Tak Gentar Lawan Koalisi Besar di Pilkada Kota Batu. <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/04/01/pdip-tak-gentar-lawan-koalisi-besar-di-pilkada-kota-batu> . Dilihat pada 21 Desember 2017
- Mulyana, Deddy. 2014. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- PDIP. 2015. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015-2020*. Jakarta

- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Sayuti & Dalah S. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Schroeder, Peter. 2010. *Strategi Politik*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh: Aviantie Agoesman. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit
- Soyomukti, Nurani. 2013. *Komunikasi Politik: Kudeta, Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa*. Malang: Intrans Publishing.
- Subiakto, Hemny & Ida, Rachmah. 2014. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*. Jakarta: Prenamedia Group
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

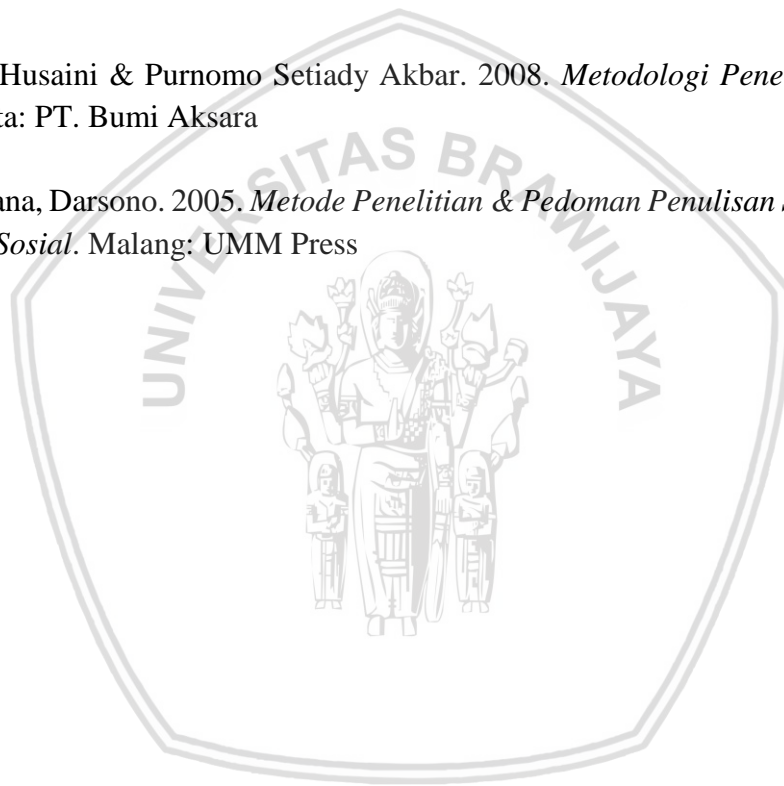
Supingah, Iping. 2007. KPUD Tetapkan Walikota dan Wawalikota Batu Terpilih. <http://politik.suarasurabaya.net/news/2007/46269-KPUD-Tetapkan-Walikota-dan-Wawalikota-Batu-Terpilih> . Dilihat pada 24 Desember 2017

Susanto, Eko Harry. 2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ure, Heru. 2016. Kusnadi: Pilkada Batu Harus Menang. <http://pdiperjuangan-jatim.com/kusnadi-pilkada-batu-harus-menang/> . Dilihat pada 22 Desember 2017

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi untuk Ilmu Sosial*. Malang: UMM Press



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 2016 /UN10.F03.11.11/PN/2018

Lampiran :-

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kota Batu
Jl. Oro-Oro Ombo No. 11
Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ismail Priyo Wicaksono

Alamat : Jalan Kerto Asri No. 120 RT. 08/RW. 01
Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Malang

NIM : 1450301001111128

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (Studi kasus terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kota Batu).

Lamanya : 2 (dua) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 31 Januari 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Dr. Kely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524200212 2 002





**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC – PDI PERJUANGAN)
KOTA WISATA BATU**

Nomor : 291 / EX / DPC-BTU / V / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

K E P A D A
Yth : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
di,
Malang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini DPC PDI Perjuangan Kota Batu, dengan ini menyatakan dan memberitahukan bahwa :

Nama : **ISMAIL PRIYO WICAKSONO**
NIM : 145030101111128
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Brawijaya Malang

Bahwa yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di DPC PDI Perjuangan Kota Batu.

Demikian pemberitahuan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Batu, 04 Mei 2018
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA WISATA BATU

MASA BAKTI 2015 - 2020

KETUA

SULIADI

SEKRETARIS

H. PURNO SANTOSO, SH, MM

Sekretariat : Jl. Raya Oro Oro Ombo No. 11 Tlp/Fax. (0341) 595703 Kota Batu
Website : www.pdi-perjuangan-kotabatu.co.cc
Email : pdi-perjuangan.kotabatu@gmail.com



PEDOMAN WAWANCARA

DPC PDI-P KOTA BATU

1. Bagaimana DPC PDIP Kota Batu mempersiapkan Pilkada Kota Batu 2017 sebelum masa penetapan calon?
2. Bagaimana DPC PDIP Kota Batu mempersiapkan pasangan calon dan menentukan calon yang diusung untuk maju?
3. Siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan strategi pemenangan calon yang diusung oleh DPC PDIP Kota Batu?
4. Keputusan strategi apa yang dijadikan prioritas dalam strategi pemenangan pasangan calon tersebut?
5. Selain strategi prioritas, apakah DPC PDIP Kota Batu memiliki rencana atau strategi lain yang disiapkan?
6. Bagaimana bentuk strategi pemenangan yang ditentukan untuk mencapai kemenangan pasangan calon tersebut?
7. Saat memasuki masa kampanye pemilu, apakah strategi yang digunakan berbeda dengan masa kampanye politik?
8. Keberhasilan strategi bertahan DPC PDIP Kota Batu menghasilkan perolehan suara 44,57% suara sah. Namun, dari tajuk berita pada tribunnews.com disebutkan bahwa angka tersebut masih belum sesuai target dari Calon Walikota (Dewanti) yaitu 50%. Apakah faktor yang berpengaruh dalam melesetnya target tersebut?
9. Bagaimana kondisi sumber daya manusia DPC PDIP Kota Batu dalam menghadapi Pilkada 2017?
 - a. Pemimpin Politik
 - b. Manajer Kampanye
 - c. Aktivis Partai
 - d. Sukarelawan atau simpatisan partai
10. Bagaimana operasional strategi DPC PDIP Kota Batu dilaksanakan?
 - a. Unsur Ketepatan Waktu
 - b. Unsur Fleksibilitas
 - c. Prinsip Ilusi
11. Selain faktor manusia dan operasional, apakah ada faktor lain yang menjadi pendukung strategi tersebut?
12. Selain faktor pendukung, apakah ada faktor yang menjadi faktor penghambat strategi pemenangan tersebut?

MODEL LPPDK 5 - PARPOL



**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA BATU**
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON DEWANTI RUMPOKO DAN H. PUNJUL SANTOSO, SH, MH**
Periode dari Tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017

No	Tgl	Jumlah sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	No Rekening Penyumbang	No Rekening Penerima	Bukti	Keterangan
		Rp	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
1	01-Nov-17	70.000.000		70.000.000			H. PUNJUL SANTOSO, SH, MH			Kuitansi	Diberikan Tengah Malam
2	08-Nov-16	80.000.000		80.000.000			H. PUNJUL SANTOSO, SH, MH			Kuitansi	Diberikan Tengah Malam
3	19-Nov-16	200.000.000		200.000.000			DEWANTI RUMPOKO			Kuitansi	Diberikan Waktu Hari Libur Bank
4	25-Des-16	253.000.000		253.000.000			DEWANTI RUMPOKO			Kuitansi	Diberikan Waktu Hari Libur Bank
		603.000.000		603.000.000							

KETUA UMUM
SUCINDO

KETUA UMUM
RENDHANA UMINGA

KEBANGSANTUNAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

Laporan Pemasukan Dana Kampanye Dewanti-Punjul



**NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon : **DEWANTI RUMPOKO – H.PUNJUL SANTOSO,SH.MM**

Bersama ini menyampaikan :

a. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, Yaitu :

1. Nama Lengkap : **SUTIYO**
Alamat : JL. Sarimun Krajan RT 02 RW 01 Desa Beji
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA TIM
2. Nama Lengkap : **SUTRISNO**
Alamat : Jl. Wukir RT 01 RW 04 Kelurahan Temas
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL KEPALA 1
3. Nama Lengkap : **DIDIK MACHMUD H**
Alamat : JL. Bukit Berbunga 235 Desa Sidomulyo
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL KEPALA 2
4. Nama Lengkap : **ADY SAYOGA**
Alamat : Kecamatan Bumiaji
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL KEPALA 3
5. Nama Lengkap : **ASMADI**
Alamat : JL. Cemara Kipas RT 01 RW 03 Desa Sidomulyo
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS
6. Nama Lengkap : **HELly SUYANTO**
Alamat : Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL SEKRETARIS 1
7. Nama Lengkap : **WIN SUNARKO**
Alamat : Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL SEKRETARIS 2
8. Nama Lengkap : **LUDI TANARTO**
Alamat : Jl. Pande Desa Junrejo
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL SEKRETARIS 3
9. Nama Lengkap : **HJ. ENDANG SUSILANING RAHAYU**
Alamat : JL. Raya Beji 110 Desa Beji
Pekerjaan/Jabatan : BENDAHARA

10. Nama Lengkap : **DJAYUS DWI ATMOJO**
 Alamat : Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG RISET, ANALISA DAN PERENCANAAN STRATEGI
11. Nama Lengkap : **MARGIYANTO**
 Alamat : Puri Indah Desa Beji Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG RISET, ANALISA DAN PERENCANAAN STRATEGI
12. Nama Lengkap : **DIDIK SUMINTARJO**
 Alamat : Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG RISET, ANALISA DAN PERENCANAAN STRATEGI
13. Nama Lengkap : **SAIFUDIN**
 Alamat : Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG RISET, ANALISA DAN PERENCANAAN STRATEGI
14. Nama Lengkap : **H. ATMOJO**
 Alamat : Jl. Purwosenjoto Desa Bulukerto
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA DANA DAN LOGISTIK
15. Nama Lengkap : **H. HARI DANAH WAHYONO**
 Alamat : Meduran Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA DANA DAN LOGISTIK
16. Nama Lengkap : **SANTI VITRIA DEWI**
 Alamat : Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA DANA DAN LOGISTIK
17. Nama Lengkap : **IFAN HUSNI**
 Alamat : Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA DANA DAN LOGISTIK
18. Nama Lengkap : **SASMITO HARI**
 Alamat : Jl. Flamboyan Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KAMPANYE
19. Nama Lengkap : **KATARINA DIAN S**
 Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KAMPANYE
20. Nama Lengkap : **HARIJONO MC**
 Alamat : Jl. Arjuno 49 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KAMPANYE

21. Nama Lengkap : **JUHAIMI**
 Alamat : Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KAMPANYE
22. Nama Lengkap : **SAMPURNO**
 Alamat : Jl. Pande Desa Junrejo Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG PENGALANGAN DAN PENGERAHAN
23. Nama Lengkap : **BUDIARTO**
 Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG PENGALANGAN DAN PENGERAHAN
24. Nama Lengkap : **ROCHMAD BASUKI**
 Alamat : Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG PENGALANGAN DAN PENGERAHAN
25. Nama Lengkap : **NAFIS**
 Alamat : Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG PENGALANGAN DAN PENGERAHAN
26. Nama Lengkap : **SITI FARITA**
 Alamat : Jl. Hasanuddin Desa Junrejo Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KESEKRETARIATAN, PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEMILU
27. Nama Lengkap : **HERY SUSILO**
 Alamat : Kelurahan Temas Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KESEKRETARIATAN, PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEMILU
28. Nama Lengkap : **ALI USMAN**
 Alamat : Kelurahan Temas Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KESEKRETARIATAN, PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEMILU
29. Nama Lengkap : **EKO TEGUH TRIWISUDA**
 Alamat : Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG KESEKRETARIATAN, PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEMILU
30. Nama Lengkap : **ANDI FIRASANDI,SH.MH**
 Alamat : Jl. Kendangsari Industri 57 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI
31. Nama Lengkap : **CAHYO EDI PURNOMO,S.Pd.SH.MH**
 Alamat : Jl. Wilis Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI

32. Nama Lengkap : **RUSLAN EFENDI, SH**
 Alamat : Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI
33. Nama Lengkap : **LILY RIWAYATININGSIH**
 Alamat : Kelurahan Temas Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR KECAMATAN
34. Nama Lengkap : **HARUN**
 Alamat : Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR KECAMATAN
35. Nama Lengkap : **GATOT IMAM SUWOTO**
 Alamat : Desa Tulungrejo Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR KECAMATAN
36. Nama Lengkap : **HAMZAH ASRORI**
 Alamat : Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : KOORDINATOR KECAMATAN
37. Nama Lengkap : **WIRIADI NOTO**
 Alamat : Desa Beji Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : HUMAS
38. Nama Lengkap : **HARINOTO**
 Alamat : Jl. Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : HUMAS
39. Nama Lengkap : **ELYAS**
 Alamat : Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji
 Pekerjaan/Jabatan : HUMAS
40. Nama Lengkap : **ANAS IBRAHIM**
 Alamat : Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : HUMAS

B. Nama Penghubung Pasangan Calon , Yaitu :

1. Nama Lengkap : **KAYAT HARIANTO**
 Alamat : Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo
 Pekerjaan/Jabatan : PENGHUBUNG / LO
2. Nama Lengkap : **DWI YUNIAR SANIMAN**
 Alamat : Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu
 Pekerjaan/Jabatan : PENGHUBUNG / LO

Demikian untuk menjadi maklum,

Batu, 03 Oktober 2016

DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KOTA WISATA BATU

MASA BAKTI 2015 - 2020

KETUA

SULIADI

SEKRETARIS

H. PUNJUL SANTOSO, SH, MM

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (Satu) Rangkap untuk Pasangan Calon
2. 1 (Satu) Rangkap untuk KPU Provinsi / KPU Kota Batu
3. 1 (Satu) Rangkap untuk Bawaslu Provinsi / Panwaslih Kota Batu
4. 1 (Satu) Rangkap untuk Polres Batu



Lomba untuk dukungan Dewanti Rumpoko



Sosialisasi Figur Kandidat Dewanti Rumpoko



Undangan Pertemuan Relawan Sahabat Dewanti



Desain Baliho Kampanye Dewanti-Punjul





Sosialisasi
#BOSANBLACKCAMPAIGN



- 9 NAWA BHAKTI**
Membangun Desa Kelangka Batu
1. Pemerintah Kota senantiasa hadir untuk melindungi seluruh warga dan mengorganisir hal-hal yang akan atau akan datang dan memprioritaskan di Kota Batu, dengan jalan menciptakan dan menjaga stabilitas politik, keamanan ketertahanan ketahanan dan per di daerah.
 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan berprestasi untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara profesional, mudah, cepat dan berkeadilan.
 3. Membangun daerah Batu dari pinggiran, dengan jalan memperkuat sendiri-sendiri pedesaan dalam kerangka kemajuan dan pemerataan secara bersama, agar tercipta sumbu daya yang berkelanjutan baik guna mempertahankan ketahanan dan memperkuat restorasi budaya.
 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan gizi, kesehatan, kesetaraan hidup sehat dan bersih, serta ketahanan keluarga dan partisipasi gender.
 5. Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab atas pengembangan potensi kepariwisataan dan pariwisata, serta menjamin tercapainya kualitas hidup sehat dan layak bagi ibu dan anak.
 6. Melanjutkan kemajuan pariwisata dengan mengembangkan modal wisata berbasis etika dan budaya serta pertanian yang berorientasi organik, dengan didukung oleh infrastruktur yang berkualitas dan berorientasi ekonomi kerakyatan.
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi domestik di Kota Batu melalui penciptaan iklim investasi, produksi, distribusi, konsumsi dan UMKM, serta mendorong masuknya investor bagi pembangunan daerah secara merata.
 8. Meningkatkan produktifitas rakyat agar bekerja saling tinggi, yang berorientasi peran sentral warga Kota Batu sebagai subjek usaha dalam kerangka bidang.
 9. Komitmen Pemerintah Kota Batu untuk merawat dan memantapkan area pariwisata dan ketahanan lingkungan, utamanya sumber air, serta keanekaragaman hayati.
- www.sahabatdewanti.com

Konten Kampanye
Visi-Misi Media Online



Wawancara dengan Bpk. Suliadi
Selaku Ketua DPC PDIP Kota Batu



Situs Penelitian
Kantor DPC PDIP Kota Batu

